

PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DAN PENYERAPAN TENAGA KERJA:

Dinamika dan Kesejahteraan Petani

Di Kabupaten Langkat - Sumatera Utara

Oleh :
YB. Widodo
Soewartoyo
Daliyo
Ngadi
Sri Hargiono

Penyunting :
YB. Widodo
Daliyo



PUSAT PENELITIAN KEPENDUDUKAN
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
(PPK - LIPI) 2004

KATALOG DALAM TERBITAN

Perkembangan Kelapa Sawit dan Penyerapan Tenaga Kerja
YB Widodo, Daliyo -Jakarta: LIPI Press, 2005
xi + 145hlm.; 15 x 23 cm

ISBN 979-3673-39-7

Diterbitkan Oleh:



LIPI Press, anggota IKAPI
Jl. Gondangdia Lama 39, Menteng, Jakarta 10350
Telp. (021) 314 0228, 314 6942, Fax. (021) 314 4591
e-mail : bmrlipi@uninet.net.id
lipipress@uninet.net.id

KATA PENGANTAR

Penelitian tentang 'Perkebunan Kelapa Sawit dan Penyerapan Tenaga Kerja : Dinamika dan Kesejahteraan Petani', telah dilakukan di Propinsi Sumatera Utara dengan mengambil kasus petani plasma di perkebunan kelapa sawit Desa PIR-ADB Besitang. Penelitian tersebut merupakan salah satu penelitian Bidang Ketenagakerjaan yang dilakukan oleh para peneliti Pusat Penelitian Kependudukan - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PPK - LIPI) pada tahun 2004.

Kajian dalam penelitian ini berfokus kepada kondisi dan isu penyerapan tenaga kerja di perkebunan kelapa sawit pola PIR serta prospek penyerapan tenaga kerjanya. Hasil kajian menunjukkan bahwa hubungan antara inti dan plasma telah terjalin dengan baik. Petani plasma sejak tahun 90-an telah mencapai suatu kemandirian dalam mengelola kebun plasmanya. Usaha perkebunan plasma kelapa sawit memiliki kegiatan yang variatif. Kegiatan-kegiatan tersebut yang meliputi penyiangan, pemupukan, pemberantasan hama, pembersihan lingkungan, pembersihan pohon sampai pemanenan, ternyata mampu memberikan lapangan kerja yang cukup banyak, baik bagi petani plasma, anggota keluarga maupun penduduk di sekitarnya. Hadirnya perkebunan kelapa sawit telah menciptakan kesempatan kerja lain, seperti di pabrik pengolahan, usaha angkutan, usaha perdagangan, usaha perbengkelan, usaha pendidikan, usaha telekomunikasi, dan jasa lainnya. Implikasinya, perkebunan plasma kelapa sawit ini telah memberikan pendapatan yang cukup baik bagi rumah tangga petani plasma maupun penduduk sekitarnya. Prospek penyerapan tenaga kerja di daerah penelitian masih cukup baik dan dapat terus dipertahankan/ dikembangkan dengan melakukan intensifikasi tanaman, *replanting* yang tepat serta diversifikasi produk buah kelapa sawit. Pabrik tidak hanya menghasilkan produk CPO, tapi juga harus mampu menghasilkan produk lain seperti oleokimia, kompos, pakan ternak dan arang. Adanya diversifikasi produk tersebut akan membuka divisi-divisi baru di pabrik pengolahan dan harus menggunakan teknologi yang lebih maju, sehingga sekaligus akan memberi peluang kerja bagi tenaga kerja dengan pendidikan yang lebih tinggi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Berbagai metoda pengumpulan data telah dilakukan, seperti wawancara dengan kuesioner, wawancara mendalam dan diskusi terfokus dengan beberapa sumber informasi baik dari kalangan pemerintah daerah, swasta maupun masyarakat (petani) setempat. Pengumpulan data kuantitatif dilakukan terhadap 150 responden yang diambil secara *purposive quota sampling*.

Penelitian ini dapat terlaksana berkat bantuan dari berbagai pihak, antara lain pemerintah daerah, lembaga pemerintah dan swasta serta tokoh masyarakat. Ucapan terima kasih kami sampaikan atas kerjasama tersebut. Kepada para peneliti PPK-LIPI yang telah menyelesaikan tulisan ini, kami ucapkan selamat. Khusus kepada Bpk. Dr. Agus Wahyudi, MS, Peneliti Litbang Perkebunan Departemen Pertanian yang telah bersedia memberi masukan dan saran terhadap tulisan ini kami ucapkan terima kasih. Juga kepada para teknisi serta semua pihak yang telah membantu demi selesainya tulisan ini, kami ucapkan terima kasih. Akhirnya, untuk penyempurnaan tulisan ini, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan.

Jakarta, Desember 2004
Kepala Pusat Penelitian
Kependudukan - LIPI

Dr. Ir. Aswatini, MA
NIP. 320003450

A B S T R A K

Penelitian tentang 'Perkebunan Kelapa Sawit dan Penyerapan Tenaga Kerja : Dinamika dan Kesejahteraan Petani' dilakukan di Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara. Dengan mengambil kasus petani plasma di perkebunan Perusahaan Inti Rakyat (PIR) Kelapa Sawit, Besitang. Tujuan umum penelitian ini adalah mengkaji kondisi dan dinamika penyerapan tenaga kerja di perkebunan kelapa sawit (PIR). Secara khusus tujuan penelitian adalah : (1). mengkaji hubungan inti-plasma dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit; (2). mengkaji kemandirian plasma dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit; (3). mengkaji penyerapan tenaga kerja, implikasi terhadap kesejahteraan petani dan prospek ke depan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara inti dan plasma telah berjalan cukup baik, di mana inti sebagai pengelola, pembinaan dan petani plasma sebagai penyedia lahan dan tenaga kerja. Hanya selama dikelola inti dalam pemasaran yang kadang dikeluhkan petani. Kemandirian petani plasma mulai nampak setelah plasma dikelola KUD. PIR perkebunan kelapa sawit telah menciptakan berbagai kegiatan ekonomi bagi penduduk. Berbagai kegiatan di perkebunan plasma kelapa sawit meliputi penyiangan, pemupukan, pembrantasan hama, pembersihan lingkungan, pembersihan pohon sampai pemanenan. Hal tersebut memberikan lapangan kerja yang cukup bagi petani plasma, keluarga dan penduduk di sekitarnya. Hadirnya perkebunan kelapa sawit juga telah menciptakan *multiplier effect* terhadap terbukanya lapangan kerja yang lain, seperti kesempatan kerja di pabrik pengolahan, usaha angkutan, usaha perdagangan, usaha perbengkelan, usaha pendidikan, usaha telekomunikasi, dan jasa lainnya. Adanya penyerapan tenaga kerja di perkebunan plasma kelapa sawit telah memberikan kesejahteraan yang cukup baik bagi petani plasma. Hal ini tercermin dari pendapatan yang cukup baik, kondisi perumahan dan pemilikan barang-barang berharga. Prospek penyerapan tenaga kerja di daerah penelitian, dapat dikembangkan/ dipertahankan melalui intensifikasi tanaman, *replanting* yang tepat serta diversifikasi produk buah kelapa sawit. Selain menghasilkan produk CPO, juga jenis produk yang lain seperti oleokimia, kompos, pakan ternak dan arang. Adanya diversifikasi produk tersebut akan membuka divisi-divisi bagi di pabrik pengolahan dan harus menggunakan teknologi yang lebih maju, sekaligus membuka peluang kerja bagi tenaga kerja dengan tingkat pendidikan yang sesuai.

Kata kunci : Perkebunan, Kelapa Sawit, Penyerapan, Tenaga Kerja, Kesejahteraan, Prospek, Langkat.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	2
1.3. Tujuan dan Sasaran Penelitian	3
1.4. Ruang Lingkup	4
1.5. Alur Pikir	5
1.6. Metode Penelitian	6
1.7. Organisasi Penulisan	7
BAB II INDUSTRI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DAN DAYA SAING EKONOMI PETANI: Tinjauan pustaka	9
2.1. Pengantar	9
2.2. Ekspor Produk Perkebunan Kelapa Sawit Nasional	10
2.3. Kesejahteraan Petani Kelapa Sawit dan Perdagangan CPO	16
2.4. Perkembangan Perkebunan Kelapa Sawit dan CPO	18
2.5. Beberapa Masalah Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit	22
2.6. Penutup	28
BAB III. GAMBARAN UMUM DAERAH KABUPATEN LANGKAT, PROPINSI SUMATERA UTARA	31
3.1. Pengantar	31
3.2. Kondisi Geografis	31
3.3. Potensi Sumber Daya Alam	35
3.4. Potensi Sumber Daya Manusia	37
3.5. Potensi Sumber Daya Ekonomi	46
3.6. Sarana dan Prasarana	48
3.7. Penutup	50

BAB IV. DINAMIKA PERUSAHAAN INTI RAKYAT (PIR) - PERKEBUNAN KELAPA SAWIT	53
4.1. Pengantar	53
4.2. Sejarah dan Perkembangan Perkebunan Kelapa Sawit	53
4.3. Hubungan Perusahaan Inti-Plasma	62
4.4. Lembaga KUD dan Kemandirian Petani Plasma	64
4.5. Kebijakan dan Iklim Investasi	68
4.6. Produksi dan Pemasaran	71
4.7. Penutup	73
BAB V. DINAMIKA PENYERAPAN TENAGA KERJA DAN KESEJAHTERAAN PETANI PIR DI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT	77
5.1. Pengantar	77
5.2. Kegiatan di Perkebunan Kelapa Sawit	77
5.3. Dinamika Penyerapan Tenaga Kerja di Perkebunan Kelapa Sawit	82
5.4. Kondisi Sosio Demografi Petani di Perkebunan Kelapa Sawit	93
5.5. Kesejahteraan dan Strategi Kelangsungan Hidup	96
5.6. Penutup	112
BAB VI. PROSPEK PENYERAPAN TENAGA KERJA DI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT	115
6.1. Pengantar	115
6.2. Kebijakan Daerah dan Kelangsungan Pengelolaan Kelapa Sawit	116
6.3. Prospek Potensi Perkebunan Kelapa Sawit	119
6.4. Prospek Pemasaran Kelapa Sawit	122
6.5. Peluang dan Tantangan Penyerapan Tenaga Kerja di Perkebunan Kelapa Sawit	124
6.6. Isu Ketenagakerjaan	126
6.7. Penutup	129
BAB VII. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	131
7.1. Kesimpulan	131
7.2. Implikasi Kebijakan	133
DAFTAR PUSTAKA	137

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Ekspor Minyak Kelapa Sawit Mentah Indonesia	11
Tabel 2.2. Distribusi Tanaman Sawit Indonesia, 2000	19
Tabel 3.1. Jumlah dan Tingkat Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Langkat dan Propinsi Sumatera Utara, Tahun 1980, 1990 dan 2000	38
Table 3.2. Penduduk Kecamatan Kabupaten Langkat Menurut Jenis Kelamin & Tingkat Kepadatan Tahun 2002	39
Tabel 3.3. Struktur Penduduk Kabupaten Langkat Menurut Umur dan Jenis Kelamin, tahun 2002	40
Tabel 3.4. Pendidikan Tertinggi Ditamatkan Penduduk Usia 5 tahun ke atas, Kabupaten Langkat, Tahun 2000 dan Desa PIR-ADB, Tahun 2002	42
Tabel 3.5. Status Migrasi Seumur Hidup di Kabupaten Langkat Menurut Desa/Kota Tahun 2000 dan Desa PIR-ADB Besitang, Tahun 2002	43
Tabel 3.6. Angkatan Kerja Kabupaten Langkat Menurut Daerah Tingkat II, Pedesaan/Perkotaan dan Jenis Kelamin, Tahun 2000	44
Tabel 3.7. Lapangan Pekerjaan Penduduk Kabupaten Langkat dan Propinsi Sumatera Utara, Tahun 2000	45
Tabel 3.8. Status Pekerjaan Utama Penduduk Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara, Tahun 2000	46
Tabel 3.9. Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Langkat, (Atas Dasar Harga Konstan), Tahun 2002	48
Tabel 4.1. Perkembangan Luas Lahan Perkebunan Sumatera Utara, 1998-2002	55
Tabel 4.2. Perkembangan Luas Areal Perkebunan Sumatera Utara Periode 1998-2002	56
Tabel 4.3. Volume dan Nilai Ekspor Primer Perkebunan Sumatera Utara, 1999-2002	70
Tabel 4.4. Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit Menurut Jenis Usaha di Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Langkat dan PIR-ADB Besitang	72

Tabel 5.1.	Pengurus KUD Rahmat Tani Menurut Tingkat Pendidikan	85
Tabel 5.2.	Komposisi Karyawan KUD Rahmat Tani Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Jabatan	88
Tabel 5.3.	Jenis Pekerjaan Yang Dilakukan oleh Tenaga Kerja Harian Lepas dan Besar Upah yang Diberikan	90
Tabel 5.4.	Status Kegiatan Ekonomi Sebelum menjadi Petani Peserta dan Jenis Pekerjaan Tambahan Saat Ini	91
Tabel 5.5.	Komposisi Petani Peserta PIR Menurut Latar Belakang Sosial Demografi	94
Tabel 5.6.	Jumlah Rumah Tangga Petani Plasma Menurut Luas Lahan yang Dimiliki, di PIR-ADB Besitang, tahun 2004	104
Tabel 6.1	Perkembangan Produksi dan Konsumsi CPO di Indonesia, Tahun 1996-2003	123

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lamp 1 : Diagram 2.2. Rangkaian Pengembangan Industri Kelapa Sawit	29
Lamp 2 : KUD Rahmat Tani PIR-ADB Besitang	75
Lamp 3 : Daftar Istilah Lokal	143
Lamp 4 : Peta Desa PIR-ADB, Besitang, Kab. Langkat	145

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sektor pertanian merupakan sumber kehidupan bagi sebagian besar penduduk Indonesia dan mata pencaharian bagi 43,8 persen tenaga kerja Indonesia pada tahun 2000. Sejak krisis ekonomi (akhir 1997) sektor pertanian semakin memperlihatkan sebagai sektor yang dapat diandalkan untuk penyerapan tenaga kerja. Selama lima tahun setelah krisis ekonomi (1997-2003) jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian meningkat sebesar 7 persen, yaitu dari 35,8 juta menjadi 42 juta orang (Statistik Indonesia, 2003). Sementara dalam indikator makro ekonomi, sektor pertanian pada saat ini tetap tumbuh positif sekitar 1,74 persen per tahun (BPS, 2003). Kontribusi sektor pertanian terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) nasional mengalami peningkatan dari 14,8 persen (1997) menjadi 16,5 persen (2003).

Subsektor perkebunan merupakan salah satu subsektor dalam sektor pertanian yang sangat strategis untuk terus dikembangkan. Pertimbangan ini didasarkan pada makin luasnya lahan perkebunan yang ada di Indonesia serta terbukanya peluang pasar domestik dan internasional. Beberapa produk yang potensial untuk dikembangkan adalah teh, cengkeh, tembakau, kakao, kopi, dan kelapa sawit. Perkembangan luas lahan dan produksi perkebunan serta ekspor minyak sawit yang cukup signifikan menjadi alasan utama mengapa tanaman sawit menjadi salah satu tanaman yang potensial untuk dikembangkan di Indonesia.

Perkebunan kelapa sawit di Indonesia mengalami peningkatan produksi yang cukup tinggi sejalan dengan meluasnya areal perkebunan. Pada tahun 2002 luas perkebunan kelapa sawit Indonesia telah mencapai 3,1 juta hektar dengan kapasitas produksi mencapai 6,7 juta ton CPO. Dalam lima tahun terakhir terdapat penambahan areal baru sekitar 230 ribu hektar/tahun. Dari perkembangan tersebut, apabila diproyeksikan dengan asumsi tambahan luas yang sama (230 ribu hektar/tahun) maka dapat diperkirakan pada tahun 2010 luas lahan perkebunan kelapa sawit di Indonesia akan mencapai lebih dari 4,8 juta hektar. Hal ini berarti kapasitas produksi akan meningkat menjadi sekitar 10,9 juta ton (35 persen dari proyeksi pangsa pasar dunia). Perkembangan ini akan menempatkan Indonesia sebagai produsen terbesar kelapa sawit dunia. Kondisi ini diharapkan dapat mendukung peningkatan kegiatan ekspor kelapa sawit Indonesia ke berbagai negara seperti ke Belanda, Amerika Serikat, India, Brasil (Dewan Riset Nasional, 2001). Data

lain menunjukkan terjadinya kenaikan produksi kelapa sawit dari 5.380 ribu ton pada tahun 1997 menjadi sebesar 6.689 ribu ton pada tahun 2003 (BPS, 2003). Berkembangnya subsektor perkebunan kelapa sawit di Indonesia tidak lepas dari adanya kebijakan pemerintah yang memberikan berbagai insentif. Insentif tersebut terutama kemudahan dalam hal beberapa bantuan subsidi investasi untuk pembangunan perkebunan rakyat dengan pola PIR-BUN dan dalam perijinan pembukaan lahan baru untuk areal perkebunan besar swasta.

Usaha perkebunan kelapa sawit merupakan komoditas yang dapat dijadikan sebagai alternatif untuk menciptakan lapangan kerja di Indonesia. Usaha ini mampu menyerap tenaga kerja yang cukup besar dan memberikan efek ganda, baik industri hulu maupun industri hilir (Dwinita, 1999). Diperkirakan pada tahun 2002 sekitar 3,5 juta orang tenaga kerja terlibat secara langsung dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Apabila diasumsikan per pekerja memiliki satu orang istri dan 2 anak, maka terdapat sekitar 14 juta orang yang kehidupannya tergantung dari kegiatan usaha kelapa sawit (Dewan Riset Nasional, 2002).

Kelapa sawit merupakan komoditas yang diandalkan sebagai penyumbang devisa negara dan menjadi sumber pendapatan daerah. Selain itu, ada indikasi bahwa tingkat pendapatan petani di perkebunan kelapa sawit khususnya PIR cukup tinggi, sehingga menjamin kesejahteraan petani. Hasil evaluasi yang dilakukan oleh Dirjenbun menunjukkan bahwa terdapat peningkatan pendapatan petani plasma di perkebunan PIR Kabupaten Pasaman pada tahun 1991-1995. Pendapatan kotor petani pada tahun 1991 sebesar Rp 433.561,- per bulan kemudian meningkat menjadi Rp 1.036.161,- pada tahun 1995 (Dirjenbun, 1996). Studi lain yang dilakukan di Padang menunjukkan bahwa tingkat pendapatan petani yang cukup baik pada perkebunan kelapa sawit yang dikelola secara kolektif. Pada panen pertama yaitu pada tahun 1983 pendapatan petani sebesar Rp 433.000,- kemudian pada tahun kedua meningkat menjadi Rp 3.264.000,- (Daswir, 1985). Propinsi Sumatera Utara merupakan salah satu propinsi yang mempunyai andalan komoditas perkebunan kelapa sawit, sedangkan di Kabupaten Langkat memiliki konsentrasi pengelolaan perkebunan PIR kelapa sawit yang cukup luas, sehingga dianggap cocok untuk dilakukan penelitian tentang penyerapan tenaga kerja dan potensi perkembangannya.

1.2. Perumusan Masalah

Sejak tahun 1976, pemerintah telah mengembangkan program Perusahaan Inti Rakyat (PIR) sebagai pola dari pengembangan subsektor perkebunan yang memadukan perusahaan perkebunan dengan para petani dalam suatu proses produksi. Tujuan PIR adalah untuk pemerataan kesempatan kerja dan perbaikan kondisi sosial ekonomi para petani yang terlibat di perusahaan

tersebut. Perusahaan perkebunan besar berfungsi sebagai inti, sedang para petani berfungsi sebagai plasma-nya. Sebagai inti perusahaan perkebunan memberi dukungan dalam berbagai kegiatan produksi pengolahan dan pemasaran, sebagai plasma menghasilkan bahan olah yang dijual kepada intinya. Kedua lembaga tersebut melakukan kemitraan yang saling menguntungkan dan berkesinambungan.

Pola PIR berpengaruh langsung terhadap penyerapan tenaga kerja terutama dalam hal kualitas dan kuantitas tenaga kerja. Namun dalam perkembangannya plasma kelapa sawit merupakan pihak yang paling lemah dibandingkan perusahaan inti (Akatiga, 1994). Plasma hanya berperan sebagai penyedia kebutuhan tandan buah segar (TBS) kelapa sawit bagi perusahaan pengolahan yang dimiliki oleh Perusahaan Swasta Nasional maupun Perusahaan Milik Negara.

Keberlangsungan pengelolaan PIR selama ini masih memprihatinkan karena adanya keterbatasan modal, teknologi dan akses pasar. Keterbatasan akses pasar yang sering menjadi masalah adalah penentuan harga tandan buah segar (TBS), dalam hal ini petani plasma sering mengeluhkan perihal rendahnya harga TBS serta banyak potongan yang harus dibayarkan. Penentuan harga TBS diputuskan sesuai dengan SK. Menteri Kehutanan dan Perkebunan No.627/kpts-II/1998 yang mana ketentuan tersebut merupakan penyempurnaan dari Keputusan Menteri Pertanian No.839/kpts/KB.320/8/97 (Sawit Watch, 2004).

Kelemahan lain yang dialami program PIR disebabkan oleh : (1) Kebijakan pemerintah yang kurang konsisten. Di satu pihak pemerintah ingin mengembangkan perkebunan rakyat melalui pemberdayaan kelembagaan ekonomi pedesaan (koperasi) agar mampu mandiri, di lain pihak pemerintah mengeluarkan paket deregulasi dengan memberi ijin pembukaan perkebunan dan perusahaan agribisnis skala besar tanpa melihat keberdayaan petani di sekitarnya. Tidak konsistennya kebijakan pemerintah tersebut lebih lanjut berdampak pada marginalisasi petani plasma. (2) Ketidakharmisan hubungan antara inti dan plasma selama ini dapat menghambat kemandirian dan keberlangsungan perkebunan rakyat (PIR). Terhambatnya kemandirian dan keberlangsungan usaha perkebunan rakyat akan mengancam kesempatan usaha dan lapangan kerja bagi petani dan keluarganya. Hal tersebut dapat berimplikasi pada penyerapan tenaga kerja dan secara langsung terhadap kesejahteraan petani.

1.3. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan umum dari tulisan ini adalah mengkaji kondisi dan dinamika penyerapan tenaga kerja di perkebunan kelapa sawit (PIR), kasus PIR-BUN di Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara.

Adapun tujuan khusus dari tulisan ini adalah :

1. Mengkaji bagaimana hubungan inti-plasma dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit dan berbagai permasalahannya di daerah penelitian.
2. Mengkaji kondisi kemandirian plasma dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit di daerah penelitian.
3. Mengkaji penyerapan tenaga kerja dan implikasinya terhadap kesejahteraan petani plasma serta prospeknya ke depan di daerah penelitian.

Kegunaan :

Kegunaan hasil penelitian ini adalah memberi sumbangan informasi dan pengetahuan tentang kondisi dan dinamika penyerapan tenaga kerja di perkebunan kelapa sawit (PIR) di daerah penelitian. Di samping itu, penelitian ini juga memberikan masukan kepada para pengambil keputusan di daerah untuk kebijakan penyerapan tenaga kerja di perkebunan kelapa sawit.

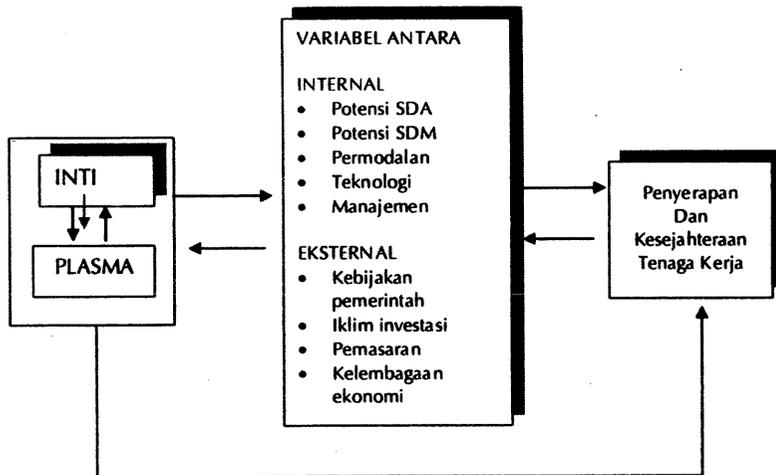
1.4. Ruang Lingkup

Lingkup lokasi penelitian mengambil kasus di Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatra Utara. Untuk mendapat gambaran yang lebih luas, studi kasus serupa juga diadakan di Propinsi Riau dan Kalimantan Timur. Penelitian ini menekankan pada penyerapan tenaga kerja di Desa PIR – ADB Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat. Nama Desa PIR-ADB diberikan, karena dalam pengelolaannya dibiayai dari pinjaman Asian Development Bank (ADB). Penelitian lapangan dilakukan pada bulan Mei 2004. Sasaran penelitian adalah para petani plasma dan tenaga kerja yang bekerja di perkebunan PIR kelapa sawit.

Lingkup tulisan ini antara lain melihat perkembangan perkebunan kelapa sawit, khususnya di Perkebunan Inti Rakyat (PIR) dalam dua dekade terakhir. Kajian juga melihat hubungan kemitraan antara inti dan plasma dalam melakukan pengelolaan perkebunan kelapa sawit. Selanjutnya bagaimana peran KUD dalam mengelola perkebunan di plasma dan indikasi adanya kemandirian petani plasma. Kegiatan dan kesempatan kerja yang ada serta yang muncul dengan adanya plasma kelapa sawit selama ini juga dibahas. Dinamika penyerapan tenaga kerja di PIR perkebunan kelapa sawit dan sektor-sektor penunjangnya akan menjadi pembahasan utama. Kemudian bagaimana penyerapan tenaga kerja tersebut implikasinya terhadap kesejahteraan petani akan menjadi pembahasan selanjutnya. Terakhir prospek

perkebunan kelapa sawit dan prospek penyerapan tenaga kerja ke depan akan menjadi perhatian penting dalam pembahasan.

1.5. Alur Pikir



Penyerapan tenaga kerja di perkebunan kelapa sawit pola PIR tidak dapat lepas dari pola kemitraan antara inti dan plasma, terutama dalam rangka kelangsungan usaha perkebunan. Pola kemitraan dan kelangsungan usaha perkebunan berpengaruh langsung terhadap penyerapan dan kesejahteraan petani plasma. Pola kemitraan tersebut dipengaruhi oleh variabel antara yang terdiri dua faktor penting yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi potensi SDA (Sumber Daya Alam), potensi SDM (Sumber Daya Manusia), teknologi, dan pengelolaan. Potensi sumber daya alam meliputi luas lahan yang dimiliki dan kemungkinan perluasannya, topografi, iklim dan kesuburan tanahnya. Potensi sumber daya manusia meliputi jumlah penduduk dan angkatan kerja, pendidikan angkatan kerja, jenis pekerjaan dan lapangan kerja. Teknologi meliputi peralatan dan meterial yang digunakan oleh para petani plasma mulai dari pemeliharaan, pemanenan sampai pemasaran, juga mengenai rencana peremajaan tanaman. Pengelolaan merupakan proses menjalankan/ mengendalikan usaha perkebunan plasma kelapa sawit, mulai dari pemeliharaan, pemanenan, pemasaran sampai peremajaan tanaman. Jika semua faktor internal ini berjalan baik maka produktivitas tanaman akan tinggi dan kelangsungan perkebunan akan berlanjut. Hal ini akan berdampak positif terhadap penyerapan tenaga kerja dan kehidupan petani plasma.

Faktor eksternal meliputi kebijakan pemerintah, iklim investasi, pemasaran dan kelembagaan ekonomi. Adanya kebijakan pemerintah yang menjamin

bagi perkembangan perkebunan kelapa sawit, khususnya pola PIR-BUN. Kebijakan ini diperlukan agar pembinaan usaha perkebunan pola PIR-BUN yang ada tetap berlanjut dan berkembang. Iklim investasi yang kondusif sangat diperlukan untuk memberikan pinjaman dana bagi perkebunan baru dan dana peremajaan tanaman bagi petani plasma lama. Pemasaran hasil TBS yang bebas ke pabrik-pabrik pengolahan dan tidak tergantung pada perusahaan inti tertentu yang cenderung monopolis, agar petani memiliki bargaining power yang lebih kuat. Di samping itu, peran kelembagaan ekonomi (seperti KUD) sangat penting untuk mempersatukan dan menggerakkan para petani plasma agar mampu mandiri dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit dari pemeliharaan sampai pemasaran.

Faktor internal dan eksternal tersebut akan mempengaruhi hubungan kemitraan antara plasma dan inti. Hubungan kemitraan yang baik antara inti dan plasma serta didukung oleh faktor internal dan eksternal yang positif akan berdampak terhadap keberlangsungan dan kemandirian petani plasma. Pola kemitraan yang harmonis serta kemandirian petani plasma dengan sendirinya dapat mendorong peningkatan penyerapan dan kesejahteraan tenaga kerja di perkebunan kelapa sawit.

1.6. Metode Penelitian

Data yang dipakai dalam tulisan ini terdiri dari data primer dan sekunder, yang dikumpulkan dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif primer dikumpulkan melalui pendekatan survei terhadap 150 responden, yang dilakukan dengan menggunakan kuesioner berstruktur. Responden adalah kepala keluarga petani plasma di lokasi penelitian. Pemilihan responden dilakukan dengan teknik purposive quota sampling. Data sekunder (makro dan mikro) dikumpulkan melalui berbagai instansi, antara lain BPS, Kantor Statistik Daerah, Departemen/Dinas terkait, PTPN, Lembaga Penelitian Kelapa Sawit, Kantor Desa dan KUD. Data kualitatif dikumpulkan dengan wawancara mendalam terhadap sejumlah informan, seperti pimpinan instansi pemerintah daerah, pimpinan PTPN, pengurus KUD, BKPM, tokoh masyarakat dan kelompok tani. Wawancara mendalam dibantu dengan instrumen pedoman wawancara, yang telah disiapkan sebelumnya dan berkembang selama di lapangan. Pengumpulan data kualitatif juga dilakukan melalui observasi, desk review dan diskusi kelompok terfokus (FGD – Focus Group Discussion).

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan, kemudian diedit, diolah, ditabulasi dan dianalisis untuk menjawab permasalahan dalam penelitian. Data kuantitatif sekunder dikumpulkan untuk melihat kecenderungan penyerapan tenaga kerja berkaitan dengan pengelolaan perkebunan kelapa sawit secara makro. Sedangkan data kuantitatif primer dilakukan untuk

melihat gambaran mikro dari penyerapan tenaga kerja di perkebunan kelapa sawit dengan pola PIR-BUN. Data dan informasi yang telah dikumpulkan tersebut dianalisis secara deskriptif analitik untuk menjawab permasalahan penelitian. Analisis tersebut juga dilengkapi dengan data kualitatif untuk lebih memahami permasalahan dan isu-isu penyerapan tenaga kerja terkait pengelolaan perkebunan kelapa sawit sesuai dengan lokasi penelitian.

1.7. Organisasi Penulisan

Uraian dalam buku ini terdiri dari tujuh bagian. Bagian pertama adalah pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup, alur pikir, metode penelitian dan organisasi penulisan. Bagian kedua dari buku ini berisi tinjauan pustaka tentang industri perkebunan kelapa sawit dan daya saing ekonomi petani perkebunan serta potensi penyerapan tenaga kerja. Bagian ke tiga menerangkan gambaran umum daerah yang mendeskripsikan tentang kondisi fisik dan potensi alam dan manusia yang mendukung untuk usaha pengembangan perkebunan kelapa sawit. Dalam uraian tersebut meliputi kondisi geografis, potensi sumber daya alam dan potensi sumber daya manusia serta sarana dan prasarana di daerah penelitian.

Bagian ke empat menjelaskan dinamika perkebunan kelapa sawit di daerah penelitian, dengan memberi gambaran tentang sejarah singkat perkembangan perkebunan, hubungan perusahaan inti dan plasma, peran KUD dan kemandirian petani plasma, kebijakan dan iklim investasi, produksi dan pemasaran. Bagian ke lima merupakan fokus dari penelitian ini tentang dinamika penyerapan tenaga kerja di perkebunan kelapa sawit pola PIR. Dalam uraian menganalisis tentang berbagai tahapan dan kegiatan di PIR perkebunan kelapa sawit. Kemudian diikuti dengan dinamika penyerapan tenaga kerja di masing-masing tahapan dan kegiatan. Dari penyerapan tenaga kerja di perkebunan kelapa sawit pola PIR tersebut, kemudian dilanjutkan dengan menganalisis bagaimana implikasinya terhadap kesejahteraan petani plasma.

Bagian ke enam tulisan ini membahas tentang bagaimana prospek penyerapan tenaga kerja di perkebunan kelapa sawit dan upaya mengatasi pengangguran tenaga kerja di wilayah tersebut. Sebagai komoditi yang potensial untuk perkembangan agroindustri (industri pengolahan) dan agribisnis (usaha pemasaran). Pada bagian ini juga akan mencakup isu ketenagakerjaan baik di perkebunan kelapa sawit maupun pada usaha-usaha lain yang terkait. Akhirnya atau sekitarnya. Dengan demikian Uni-versitas Sumatera Utara, tulisan dalam sebagai bagian akhir dari tulisan ini ditutup dengan kesimpulan dan rekomendasi.

**INDUSTRI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
DAN DAYA SAING PETANI: Tinjauan Pustaka****2.1. Pengantar**

Sebuah analisis usaha tani dan pemasaran kelapa sawit untuk proyek pengembangan perkebunan rakyat di Propinsi Sumatera Utara yang dilakukan oleh Dja'far, Bahtiar Saleh Abbas, dan Burhani Syah (1982), sekitar 22 tahun yang lalu, menyimpulkan bahwa pada tahun 1981 rata-rata pendapatan keluarga petani yang berasal dari 2 hektar kelapa sawit mencapai Rp 1.217.683,- untuk tahun tanam 1975; Rp 728.184,- untuk tahun tanam 1976; dan Rp 365.184,- untuk tahun tanam 1977. Dengan tingkat pendapatan tersebut ternyata pada tahun tanam 1975 petani dapat memenuhi seluruh kebutuhan hidup keluarga dari hasil kelapa sawit. Bila kestabilan harga dapat dipertahankan dan produksi dapat ditingkatkan tanpa mengurangi kualitas, petani akan dapat mencapai tingkat pendapatan US\$ 1000 per keluarga per tahun, sebagaimana target pemerintah untuk petani perkebunan.

Setelah 22 tahun (tahun 2000-an) pendapatan per kapita rata-rata penduduk Indonesia telah mencapai sekitar US\$ 1000, dan pertumbuhan ekonomi nasional diperkirakan telah mencapai 4.8 persen. Sementara itu inflasi hanya akan mencapai 7.0 persen, dan nilai tukar rupiah tertekan hingga sebesar Rp. 8.900 per dolar Amerika Serikat (AS). Itu dengan patokan bahwa harga minyak bumi mencapai US\$ 36 per barel dengan produksi nasional rata-rata sehari sebesar 1 072 barel. Sementara suku bunga Sertifikat Bank Indonesia dalam 3 bulan terakhir tercatat rata-rata 7.5 persen, dan PDB ditetapkan mencapai sebesar 1990,3 triliun rupiah. Hal ini tentunya dapat diartikan atau dipahami bahwa perekonomian nasional mulai bergerak menuju keseimbangan yang pernah dicapai pada tahun sebelum krisis ekonomi 1997.

Padahal pendapatan petani kelapa sawit di Sumatera Utara sudah pernah merasakan pendapatan sebesar itu 22 tahun yang lalu. Hal ini menunjukkan, bahwa lahan usaha perkebunan kelapa sawit merupakan andalan yang potensial bagi upaya peningkatan penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan penduduk.

Pertumbuhan ekonomi yang akan dicapai tersebut tentunya tidak dapat dengan mudah dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi di tahun 1970-an dan 1980-an yang mencapai 2 (dua) digit setiap tahunnya. Pertumbuhan ekonomi pada dekade 1970-an dan 1980-an sangat ajaib dan

mencengangkan. Di dunia ekonomi internasional, Indonesia bersama-sama dengan Thailand, Filipina dan Malaysia dikelompokkan ke dalam Macan Asia Kedua Berikutnya, *The Next Second Asian Tigers*, setelah Singapura, Korea Selatan, Taiwan dan Hongkong. Gambaran tersebut tampaknya tidak dapat dipertahankan, kenyataannya, Indonesia sampai sekarang belum kembali pada kondisi perekonomian seperti yang pernah terjadi pada dasawarsa 1970-an dan 1980-an. Sementara itu, kalau diperhatikan, negara-negara yang dikategorikan ke dalam Macan Asia Kedua (seperti Thailand, Filipina dan Malaysia), pada dasarnya, telah mampu menyelesaikan berbagai persoalan krisis ekonomi yang melanda negaranya. Apakah pengembangan perkebunan kelapa sawit untuk menghasilkan berbagai produk olahan lain dapat dijadikan primadona target kegiatan ekonomi? Persoalan inilah yang akan dicoba dicarikan penjelasannya, melalui kajian beberapa kepustakaan yang relevan.

2.2 Ekspor Produk Perkebunan Kelapa Sawit Nasional

Sejak tahun 2001, ada kecenderungan bahwa daya saing ekspor Indonesia mulai membaik. Hal ini diperlihatkan melalui jumlah ekspor yang terus meningkat (Tabel 2.1). Sementara itu, pada tahun-tahun berikutnya terlihat bahwa daya saing ekspor Indonesia semakin kuat, walau masih di dalam kategori tingkat keseimbangan antara ekspor dan impornya. Hal ini ditunjukkan semakin membesar nilai koefisiennya. Kenyataan tersebut tentunya dapat diantisipasi bahwa perkembangan neraca perdagangan Indonesia menunjukkan gambaran yang positif, tentunya terjadi surplus perdagangan yang pada gilirannya akan memperbaiki posisi devisa negara.

Ekspor Indonesia pada dasarnya dikelompokkan ke dalam 10 (sepuluh) kategori, antara lain adalah :

1. Bahan makanan dan binatang hidup (produk olahan kelapa sawit tampaknya ada disini),
2. Minuman dan tembakau,
3. Bahan mentah (kelapa sawit tampaknya berada disini),
4. Bahan bakar, bahan penyemir dan lainnya (produk olahan kelapa sawit tampaknya ada disini),
5. Minyak dan/atau lemak nabati dan hewani (produk olahan kelapa sawit tampaknya ada disini),
6. Bahan kimia (produk olahan kelapa sawit tampaknya ada disini),
7. Hasil industri menurut bahan (produk olahan kelapa sawit tampaknya ada disini),

8. Mesin dan alat angkut (produk pendukung pengolahan kelapa sawit tampaknya ada disini),
9. Hasil industri lainnya (produk olahan kelapa sawit tampaknya ada disini), dan
10. Barang dan transaksi lainnya.

Komoditas ekspor pertanian lainnya yang menonjol antara lain adalah kopi, udang, rempah-rempah, biji coklat dan ikan. Kontribusi kelima komoditas ini terhadap total ekspor komoditas pertanian di tahun 1993 telah mencapai US \$ 1,9 milyar atau sebesar 73,2 persen. Kontribusi kelima komoditas ini pada tahun 1999, secara relatif maupun absolut meningkat menjadi 83,3 persen atau senilai US \$ 2,4 milyar. Sementara itu pertumbuhan per tahunnya mencapai 4,4 persen. Artinya bahwa pertumbuhan kelima komoditas ini melebihi pertumbuhan per tahun total ekspor komoditas pertanian.

Tabel 2.1 : Ekspor Minyak Kelapa Sawit Mentah Indonesia, 1995-2000.

<i>Tahun</i>	Minyak Sawit (Ton)	Produksi (Ton)	Jumlah (Ton)
1995	1.004	0.261	1.265
1996	0.986	0.686	1.672
1997	1.448	1.519	2.967
1998	0.404	1.075	1.479
1999	0.865	2.434	3.299
2000	1.818	2.292	4.110

Sumber : BPS; Kompas 21-10-01, hal 29: Sawit: Potensi Besar, Dukungan Kurang

Dalam kaitannya dengan aspek sumber daya alam, ekspor yang didasarkan pada pengelompokkan sumber daya alam, dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa hal sebagai berikut :

1. Hasil Sektor Pertanian, terdiri dari kelapa sawit, kopi, udang, rempah-rempah, teh, ikan dan sejenisnya, biji coklat dan lain-lainnya,
2. Hasil Sektor Industri, terdiri dari, produk olahan kelapa sawit tampaknya ada disini, kayu lapis, pakaian jadi, karet olahan, mebel dan sejenisnya, kain tenunan, barang logam tidak mulia, alat listrik, audio visual, pupuk, minyak kelapa sawit, makanan olahan dan lainnya, dan
3. Hasil Sektor Pertambangan, terdiri dari biji tembaga, batubara, biji nikel, pasir alam, bauksit dan lainnya.

Gambaran ekspor serta pangsa pasar dalam negeri pada komoditas kelapa sawit, ekspornya tampak menggembirakan. Dengan ekspor yang menggembirakan tersebut dapat memberikan beberapa rekomendasi terhadap kinerja pembangunan, baik untuk jangka pendek, menengah dan panjang. Pengembangan industri manufaktur berbasis sumber daya alam dan sumber daya manusia mensyaratkan kandungan lokal yang tinggi. Orientasi kebijakan tersebut ditekankan pada peningkatan daya saing dan reposisi kelembagaan proses produksi.

Komoditas kelapa sawit tampaknya merupakan salah satu unsur pembangunan kelembagaan ekonomi di Indonesia. Kelapa sawit juga dapat menampung berbagai kegiatan pengembangan berbagai produk yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Nilai ekonomi produk kelapa sawit untuk ekspor dan pasar domestik, serta luas perkebunan tahun 2001 sebesar 3.584.486 hektar, demikian pula dukungan 10 PTP (16 persen, 573.518 hektar), 14 Grup Swasta Besar (51 persen, 1.828.088 hektar) dan Perkebunan Rakyat (33 persen, 1.182.880 hektar) dapat memberi kontribusi pada banyak luaran.

Apabila kebijakan untuk menjaga kualitas produksi tandan buah segar 15-25 ton per hektar yang dikelola satu orang petani dilakukan oleh pemerintah, maka paling tidak lapangan kerja untuk sekitar 3,5 juta petani dapat tersedia. Jika petani itu adalah seorang kepala keluarga dengan tiga orang anggota, maka sekitar 14 juta penduduk miskin kemungkinan dapat melanjutkan kehidupannya. Suatu studi yang dilakukan pada tahun 2002 (Prasetyohadi, 2002), menunjukkan bahwa penduduk miskin di Indonesia sudah mencapai angka sekitar 80 juta, dibandingkan dengan posisi tahun 1996, yang tercatat hanya 27 juta (Prasetyohadi, 2002). Tampaknya pemerintah Republik Indonesia harus segera membuat kebijakan agar kelapa sawit dapat diandalkan untuk mengurangi kemiskinan dan membangun ekonomi kerakyatan. Negara tetangga yang telah melakukan hal itu adalah Malaysia, Thailand dan Nigeria.

Turunan produk kelapa sawit berupa oleo-chemical tampaknya merupakan bagian dari berbagai kegiatan di bidang manufaktur; informasi dan mikroelektronika; bahan baru dan kesehatan. Pabrik pengolahan minyak mentah kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) Mill dengan kapasitas 30 ton per jam sudah dapat didesain dan diproduksi pengusaha lokal. Sedangkan kelembagaan pengolahan untuk oleo-chemical dengan kapasitas 60 ton per hari, tampaknya 70 persennya masih dikuasai oleh pengusaha luar negeri (terutama Lurgi-Jerman). Tantangannya adalah apakah alih teknologi segera dapat dikuasai dengan cara proses alih teknologi secara bertahap, seperti kasus Pembangunan Pupuk Sriwijaya tahun 1980-an. Sementara itu, kini Malaysia mengekspor CPO hanya 5 persen, sedangkan produk sawit yang

sudah diproses 95 persen. Indonesia sebaliknya : ekspor CPO 85 persen, olahannya hanya 15 persen (Djoko Pitono, 2002).

Kebutuhan CPO-Mill (kapasitas 30 ton per jam, seharga US\$5 juta per pabrik) menghadapi panen kebun kelapa sawit baru sekitar 15-20 pabrik per tahun. Suatu permintaan yang luar biasa besarnya dan perlu segera digarap. Oleo-chemical Mill (kapasitas 60 ton/hari, seharga US\$20-30 juta per pabrik) belum menjadi perhatian pengusaha Indonesia yang mendesak, tetapi secara kebijakan nasional seharusnya bisa diupayakan.

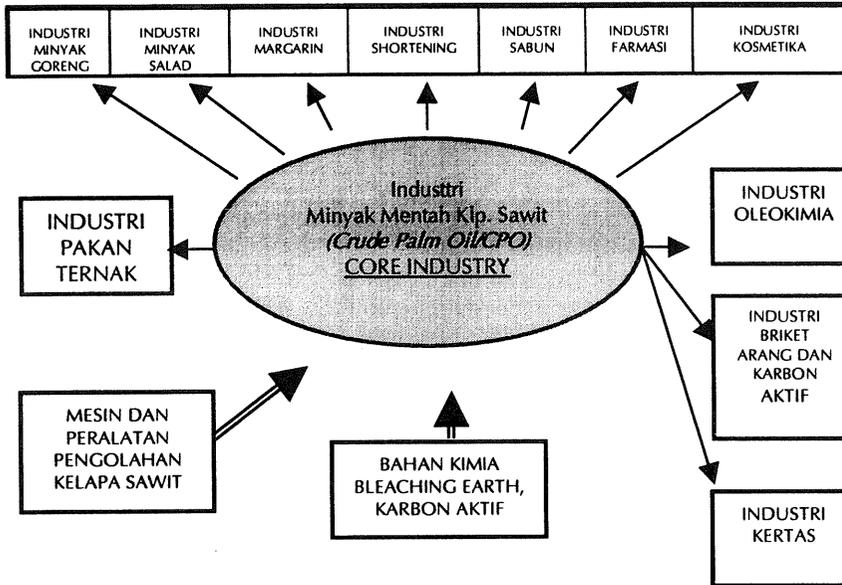
Produk ikutan kelapa sawit lainnya akan mengundang perhatian pada bidang kesehatan, pangan, obat, kecantikan, rekayasa, manufaktur sebagai pengguna produk kelapa sawit, dan seharusnya sebagai pemicu berkembangnya teknologi-teknologi baru. Kebun kelapa sawit seluas 3,5 juta hektar yang tersebar di 16 propinsi memerlukan jasa transportasi yang memadai. Tandan buah segar kelapa sawit yang dengan cepat dikirim ke pabrik penggilingan, tampaknya akan banyak mengurangi faktor rendemen CPO. Para stakeholder di bidang transportasi dan logistik mempunyai peranan penting dalam kegiatan ini, termasuk dukungan infrastruktur serta sarana dan prasarana di lokasi kegiatan perkebunan kelapa sawit (Djoko Pitono, 2002).

Dalam rangka peningkatan daya saing kemampuan litbang (penelitian dan pengembangan) dan rekayasa nasional, maka semua 16 propinsi yang mempunyai kebun kelapa sawit diharuskan mempunyai unit litbang dan atau unit rekayasa bidang sawit. Saat ini enam ex-Pusat Antar Universitas (PAU) milik universitas besar, dan beberapa lembaga penelitian besar seperti LIPI, BPPT telah memiliki kemampuan tersebut, namun dibandingkan dengan luasnya kebun sawit serta tantangan masa depan baik nasional maupun global, dirasa jauh kurang memadai. Diharapkan The Indonesian Palm Oil Board dapat mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan tersebut secara nasional dan terpadu (Rosediana Suharto, 2002). Diagram 2.1 dalam kajian ini ditampilkan untuk memberi gambaran betapa besar potensi pengembangan usaha perkebunan dan industri perkebunan kelapa sawit (Djoko Pitono, 2002).

Diagram 2.1

Contoh Keterkaitan antar Cluster dalam Sektor Industri dengan Industri Minyak Sawit Kasar (Crude Palm Oil) sebagai INDUSTRI INTI (Core Industry), dan lainnya sebagai INDUSTRI PENUNJANG (Supporting Industry)

Supporting Industries



Sumber : Djoko Pitono, 2002

Produk perkebunan kelapa sawit di Indonesia tidak hanya minyak mentah kelapa sawit (crude palm oil - CPO). Dalam sebuah artikel yang dibuat Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Derom Bangun, untuk konferensi internasional tentang kelapa sawit di Nusa Dua, Bali, pada tahun 1998, disebutkan permintaan domestik terhadap komoditas minyak kelapa sawit terus meningkat dari tahun ke tahun. Bangun menuliskan hingga tahun 2010 diperkirakan kebutuhan minyak sawit mencapai lebih dari 3 juta ton per tahun (Derom Bangun, 1998). Pada tahun 1998 kebutuhan rata-rata minyak goreng dalam negeri tercatat mencapai 9,4 kilogram per kapita per tahun. Sejalan dengan itu, dalam prediksi yang dibuat GAPKI, kebutuhan minyak kelapa sawit akan terus meningkat dari 2,6 juta ton per tahun pada tahun 1998 menjadi 3,4 juta ton per tahun pada tahun 2010. Pada saat itulah kebutuhan masyarakat terhadap minyak dan lemak mencapai 13 kilogram per kapita per tahun.

Sedangkan di pasar dunia, dalam dua dekade terakhir kebutuhan terhadap minyak mentah kelapa sawit (CPO) dan turunannya juga semakin meningkat, menggeser kedudukan minyak nabati lainnya, seperti minyak kedelai. Jumlah ekspor minyak nabati dunia pada tahun 2000 mencapai 35,9 juta ton. Bangun (1998) juga mencatat, pada tahun 1970 volume perdagangan minyak mentah kelapa sawit hanya 7 persen terhadap total ekspor minyak nabati dunia sementara minyak kedelai mencapai 21 persen dari total ekspor. Namun, menjelang tahun 2000 suplai minyak mentah kelapa sawit meningkat menjadi 17 persen, sedangkan minyak kedelai hanya meningkat 22 persen. Jurnal minyak nabati dunia Oil World meramalkan pada tahun 2015 minyak kelapa sawit akan mencapai 23 persen, sedangkan konsumsi minyak kedelai akan menyusut menjadi 21 persen.

Sekarang dari jumlah kebutuhan tersebut, Indonesia mampu men-suplai sekitar 5 juta ton per tahun. Artinya, Indonesia masih mampu memenuhi kebutuhan itu karena dukungan yang optimal dari pelaku usaha yang dimulai sejak tahun 1911, di Sumatera Utara. Saat itu, kebun kelapa sawit pertama kali dibangun dengan luas mencapai 2.715 hektar. Pada tahun 1968 luasan kebun kelapa sawit semakin bertambah besar. Sampai dengan tahun 1968 luas areal kelapa sawit mencapai 119.600 hektar. Pada tahun 1978 luasan itu berkembang menjadi 250.116 hektar. Kemudian, sejak tahun 1979 hingga tahun 1997 laju pertambahan areal kelapa sawit mencapai rata-rata 150.000 hektar per tahun. Saat ini, jumlah luas lahan sawit di Indonesia telah jauh berkembang hingga lebih dari tiga juta hektar.

Dengan demikian, hal ini tentu saja mempengaruhi tingkat produksi yang juga terus meningkat. Pada periode tahun 1979 hingga tahun 1991 laju produksi rata-rata per tahun mencapai sekitar 230.000 ton. Sementara itu, laju pertumbuhan pada periode tahun 1992 hingga 1997 meningkat hingga 420.000 ton per tahun. Pada masa itu produksi kelapa sawit Indonesia mencapai lebih dari 5 juta ton per tahun. Berdasarkan data dari sebuah simposium, diketahui bahwa kualitas dan perdagangan produksi minyak sawit mentah yang diadakan di Kuala Lumpur tahun 1968, tercatat produksi minyak sawit mentah Indonesia baru mencapai 190.000 ton, sedangkan Malaysia telah mampu memproduksi sekitar 370.000 ton minyak sawit mentah (Bangun Derom, 1998). Dalam 33 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2001, produksi minyak sawit Malaysia melonjak drastis menjadi 11 juta ton, sedangkan Indonesia juga meningkat menjadi 8 juta ton lebih. Sekitar 5 juta ton dari produksi CPO Indonesia itu di lepas ke pasar ekspor, yakni ke India, Cina, dan Thailand. Dari jumlah produksi nasional yang mencapai 8 juta ton CPO tersebut, Sumatera Utara memiliki kontribusi produksi lebih dari 4,5 juta ton CPO per tahun. Jumlah itu terus meningkat seiring makin besarnya kebutuhan terhadap komoditas tersebut. Peningkatan itu disebabkan

kemampuan produksi meningkat karena pendapatan dari sektor ini juga terus meningkat.

Pada awal tahun 2002 harga rata-rata tandan buah segar kelapa sawit (TBS) mencapai Rp 600 per kilogram. Kondisi harga TBS di tingkat petani itu terus menunjukkan kinerja yang membaik. Bahkan hingga akhir tahun 2002 sampai awal tahun 2003 harga TBS di tingkat petani mencapai lebih Rp 700 per kilogram. Membaiknya harga TBS itu dipengaruhi oleh membaiknya harga CPO di bursa minyak nabati dunia di Rotterdam, Belanda. Meski pada awal tahun 2003 harga minyak kelapa sawit dunia sempat mengalami fluktuasi harga akibat krisis di Timur Tengah, namun harga komoditas itu di pasar dunia terus berada di atas 420 dollar AS per metrik ton.

2.3 Kesejahteraan Petani Kelapa Sawit dan Perdagangan CPO

Ada hal yang cukup menarik, harga CPO di pasar dunia itu dipengaruhi oleh gejolak minyak kedelai di pasar Chicago, serta merosotnya nilai tukar dollar AS terhadap rupiah. Selain itu, kinerja kelapa sawit nasional semakin baik. Pada tahun 2003 diperkirakan jumlah volume produksi meningkat kurang lebih mencapai 10 persen. Menurut data, dari jumlah itu Sumatera Utara memberi andil ekspor CPO dan turunannya, seperti minyak inti sawit, palm fatty acid dan shortening dengan volume lebih dari 2,4 juta ton. Jumlah nilai ekspor dari produk itu hingga Oktober 2002 tercatat lebih dari 681 juta dollar AS. Tentu saja hal itu amat menguntungkan para pengusaha di bidang ini. Dari tiap metrik ton CPO yang berharga US\$440 per metrik ton, pengusaha sawit nasional mampu mengantongi sekitar Rp.143 per kilogram. Menurut Bangun (1998) hal itu merupakan pendapatan bersih dari CPO saja. Namun, angka itu tidak bisa diambil sebagai tolok ukur keuntungan bagi pengusaha karena bisa dianggap terlalu kecil.

Dalam industri sawit pengusaha umumnya mengambil keuntungan dari penjualan minyak inti sawit atau disebut dengan kernel palm oil yang merupakan turunan dari CPO. Di pasar dunia dari tiap kilogram minyak inti sawit para pengusaha memperoleh laba sebesar Rp 1.550, papar Bangun. Ia menjelaskan untuk tiap 20 ton minyak sawit jika diolah bisa menghasilkan sekitar 5 ton minyak inti sawit. Dengan kondisi harga minyak yang membaik, maka berdampak positif juga terhadap petani sawit di Sumatera Utara.

Ketika harga minyak sawit mentah di bursa Rotterdam mencapai angka di atas 400 dollar AS per metrik ton, TBS di tingkat petani dapat dibeli dengan harga di atas Rp 500 per kilogram. Bahkan, ketika harga jual CPO di pasar dunia mencapai tingkat 440 dollar AS per metrik ton, petani sawit dapat menjual TBS-nya hingga harga Rp 700 per kilogram. Hal itu tentu saja memberi keuntungan besar pada para petani sawit.

Dalam catatan Dinas Perkebunan Sumatera Utara pada tahun 2002 dari kebun rakyat dihasilkan 2,3 juta ton TBS. Besarnya produksi tersebut terdongkrak karena banyak petani rakyat yang mengkonversi lahan karet, tebu, dan cokelat mereka menjadi lahan kelapa sawit. Pada tahun 2002, tercatat lahan kelapa sawit rakyat mencapai 180.600 hektar. Seorang petani asal Desa Karangredjo, Langkat, Sumatera Utara, Pak SM misalnya, sejak tahun 1998 beralih menjadi petani sawit. Sebelumnya, ia adalah seorang petani tebu. Namun, ketika harga gula lokal hanya sebesar Rp 2.800 per kilogram, ia mengalihkan tanaman tebunya ke komoditas andalan Sumatera Utara, kelapa sawit.

Seorang petani kelapa sawit di Dusun Karang Rejo, Kecamatan Stabat, Langkat, Sumatera Utara mengatakan bahwa dari 2 hektar kebun sawitnya, ia memperoleh sekitar dua ton TBS per hektar. Jumlah itu makin bertambah menjadi tiga ton pada puncak musim panen yang jatuh pada bulan Juni atau September. Selama satu tahun dari dua hektar kebun sawitnya, Pak SM memperoleh sekitar 20 hingga 24 ton TBS. Jika harga rata-rata TBS per kilogramnya mencapai Rp 600, maka pendapatan yang diperolehnya sebanyak Rp 12 juta hingga Rp 14 juta per tahun atau sekitar Rp 1,2 juta per bulan. Dalam tiap tahun, ia memupuk sebanyak empat kali. Pada tiap kali masa pemupukan Pak SM menyisihkan dana sebesar Rp 600.000. Berdasarkan rincian itu, rata-rata dalam setiap tahun mereka dapat mengantungi hasil kebun sebesar Rp 12 juta lebih atau sekitar Rp 1 juta per bulan.

Hal tersebut juga diikuti oleh rekan-rekannya yang lain yang sebelumnya juga menanam tebu. Mereka meninggalkan tebu karena komoditas itu tidak lagi memberi keuntungan, bahkan tiap tahun nyaris menguras kantung mereka tanpa bisa kembali lagi. Hal ini mempengaruhi kemampuan petani untuk menanam tanaman baru. Pak SM mengatakan, saat ini banyak anggota kelompok tani yang dibinanya beralih ke kelapa sawit. Bahkan saat ini, mereka tengah membangun pabrik kelapa sawit mini dengan kapasitas 30 ton per jam. Pabrik itu dibangun di tengah-tengah areal perkebunan sawit di kawasan Sei Lapan, Langkat. Pabrik yang mulai dibangun itu, rencananya akan menampung TBS dari para petani dan TBS yang dihasilkan dari kebun kelompok tani, yang luasnya mencapai 1.250 hektar.

Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, Derom Bangun memperkirakan, prospek industri kelapa sawit nasional akan terus meningkat (Bangun Derom, 1998). Meskipun pada tahun 2003 dan tahun 2004, peningkatan volume produksi dan nilai ekspor diperhitungkan tidak lebih dari 10 persen. Hal ini dilihat dari makin kecilnya pertumbuhan lahan dan penjualan bibit baru. Dari tiga penghasil benih bersertifikat di Sumatera Utara, PT London Sumatera Indonesia, PT. Sucofindo, dan Pusat Penelitian Kelapa Sawit hingga tahun 2002 hanya terjual 13,6 juta benih. Angka itu merosot dari jumlah penjualan tahun 2001 yang mencapai 20,5 juta bibit.

Meskipun demikian, industri ini akan terus membaik. Optimisme itu muncul karena harga minyak sawit mentah di pasar dunia terus membaik. Bahkan, Bangun memprediksikan, harga tersebut dalam waktu dekat akan meningkat. Indikasi ke arah itu tampaknya semakin menguat setelah melihat perkembangan harga pasar. Naik turunnya harga TBS dalam negeri dipengaruhi oleh naik turunnya harga minyak sawit mentah di bursa Rotterdam dan Malaysia. Perbaikan harga ini di kedua bursa itu, dipicu oleh permintaan industri minyak nabati India yang terus membesar. Pada tahun 2002 industri minyak India membutuhkan lebih dari satu juta ton per bulan dan separuh dari total permintaan itu dipasok dari industri minyak sawit Indonesia.

Dengan demikian, dukungan pemerintah terhadap industri ini masih terus diperlukan. Para eksportir berharap pemerintah tidak lagi menaikkan pajak ekspor yang naik dari 40 persen menjadi 60 persen pada tahun 1998. Bahkan, diharapkan pemerintah menghapus pajak ekspor tersebut. Selain itu, untuk pemberlakuan otonomi daerah juga berpengaruh pada kinerja industri. Bangun menyebutkan, ada daerah tertentu yang mengenakan pajak jalan dan listrik pada perusahaan kelapa sawit. Selain itu, maraknya kasus tanah dan persoalan hubungan industrial antara buruh dan perusahaan juga menjadi kendala terhadap industri ini. Oleh karena itu, ia berharap pemerintah mampu memberi alternatif terhadap penyelesaian kasus tersebut, sehingga industri andalan ini tetap bertahan bahkan menjadi salah satu upaya pemulihan ekonomi.

2.4. Perkembangan Perkebunan Kelapa Sawit dan CPO

Perkebunan kelapa sawit merupakan usaha unggulan petani di Republik Indonesia. Hal ini diungkapkan sendiri oleh pimpinan nasional negeri ini. Pimpinan nasional mengharapkan CPO harus menjadi produk unggulan Indonesia di masa datang. Untuk jangka menengah panjang, CPO harus menjadi unggulan pertama di Indonesia karena sekarang Indonesia nomor dua di dunia (Suara Pembaharuan, 24/7/2004). Pada pertengahan tahun 2004 pimpinan nasional meresmikan pabrik CPO Telaga Hikmah PT Selapan Jaya; pabrik pengolahan kayu Medium Density Cyberboard, PT Sumatera Prima Cyberboard; melepaskan benih kelapa sawit varitas DXP Sriwijaya. Menurut pimpinan nasional, saat ini komoditas kelapa sawit dan karet Malaysia nomor satu di dunia, padahal luas semenanjung Malaysia lebih kecil dari Sumatera. Jadi luas lahan Indonesia yang dapat ditanami kelapa sawit dan karet masih luas. Untuk itu, pimpinan nasional mengajak masyarakat untuk bekerja keras. Menurutnya tanpa kerja keras Indonesia akan terlambat menghasilkan kelapa sawit dan karet. Diakuinya bahwa salah satu kelemahan produk Indonesia adalah masalah mutu. Oleh karena itu, selain meningkatkan produksi, maka prioritas yang lain adalah meningkatkan kualitas yang baik sehingga produk

Indonesia bisa diterima di luar negeri. Pada tahun 2000 luas lahan perkebunan kelapa sawit di Indonesia baru mencapai sekitar 2,85 juta hektar dan tersebar di 16 propinsi (Tabel 2.2). Namun pada 2002 luas areal kelapa sawit Indonesia telah meningkat menjadi sekitar 4,78 juta hektar dengan produksi 8,85 juta ton CPO. Sementara eksportnya 6,33 juta ton dan menghasilkan devisa 3,4 miliar dollar AS. Sementara itu, Mentan Bungaran Saragih mengatakan bahwa dalam tiga tahun terakhir, subsektor perkebunan tumbuh 5,6 persen per tahun, padahal sebelum krisis 4,9 persen per tahun.

Tabel 2.2 : Distribusi Tanaman Sawit Indonesia, 2000

Propinsi	Luas Lahan (ha)	Propinsi	Luas Lahan (ha)
1. Aceh	206.405	9. Banten+Jabar	21.502
2. Sumut	612.617	10. Kalbar	279.535
3. Sumbar	137.952	11. Kalteng	110.376
4. Riau	500.165	12. Kalsel	93.902
5. Jambi	236.059	13. Kaltim	78.938
6. Sumsel	309.761	14. Sulteng	18.036
7. Bengkulu	57.006	15. Sulsel	83.215
8. Lampung	74.530	16. Papua	31.080
Sub-Total	2.134.495	Sub-Total	716.584
Jumlah	2.851.079		

Sumber : BPS; Kompas 21-10-01, hal 29: Sawit: Potensi Besar, Dukungan Kurang

Sebagian besar perkebunan Indonesia yakni 85 persen milik petani rakyat dan bukannya milik perusahaan. Mentan mengharapkan petani dapat memiliki saham perusahaan seperti yang dilakukan oleh Koperasi Karet Mitra Usaha. Pada dua tahun yang lalu, koperasi tersebut, memiliki 20 persen saham dan diharapkan dengan adanya penandatanganan pembelian saham akan meningkat menjadi 45 persen. Sisi negatif pengembangan perkebunan kelapa sawit adalah kadang-kadang merusak kawasan hutan yang menjadi konservasi alam. Alasannya adalah untuk perkebunan kelapa sawit, tetapi yang diincar adalah hutan-hutan yang masih 'perawan'.

Kawasan hutan di sekitar Taman Nasional Danau Sentarum, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, barangkali merupakan salah satu kawasan yang menjadi bukti terjadinya penyalahgunaan tata ruang di Kalimantan Barat. Buktinya, kawasan yang dikenal sebagai daerah konservasi internasional untuk lahan basah atau yang dikenal sebagai lokasi Ramsar itu justru dialokasikan menjadi areal perkebunan kelapa sawit. Kasus itu hampir saja lolos dari perhatian. Untungnya, Sawit Watch, Walhi (Wahana Lingkungan Hidup), Buana Khatulistiwa, dan Lapan (Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional) melakukan pengideraan jarak jauh di sekitar TN Danau Sentarum dan hasilnya sangat mencengangkan. Di sekitar TN Danau Sentarum ditemukan konversi hutan yang secara besar-besaran digunakan untuk perkebunan kelapa sawit.

Berdasarkan temuan tersebut, mereka kemudian meminta kepada Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dan Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat agar mencabut izin hak guna usaha (HGU) terhadap empat dari 15 perusahaan perkebunan kelapa sawit yang ada di sekitar TN Danau Sentarum. Alasannya jelas, lokasi lahan mereka itu adalah kawasan lindung. Adapun 11 perusahaan lainnya, walaupun secara fisik telah sesuai, perlu juga dikaji ulang mengenai kelayakan kemampuan operasional perusahaan dan sosial budaya terhadap masyarakat setempat. Pembukaan hutan untuk perkebunan yang sama sekali tidak memperhatikan keseimbangan lingkungan seharusnya dihentikan. Kasus pemberian izin perkebunan kelapa sawit di sekitar kawasan lindung yang memiliki nilai keanekaragaman hayati endemis ini menunjukkan tidak dipatuhinya berbagai aturan tentang kelestarian lingkungan.

Menurut Johannes, Direktur Eksekutif Walhi Kalbar (Kompas, 6/12/2003), kalau perusahaan-perusahaan itu serius membuka perkebunan sawit, seharusnya di daerah itu sudah terlihat hamparan perkebunan kelapa sawit atau setidaknya bibit sawit. Namun nyatanya, di areal itu justru lebih banyak lahan telantar meskipun hutannya sudah lama ditebang. Kondisi seperti ini juga memicu terjadinya penebangan liar (illegal logging). Bahkan, sebagian besar kayu hasil tebangan liar tersebut melalui jalan tikus dibawa ke Sarawak, Malaysia.

Tidak aneh dengan pola semacam itu, hanya dalam waktu enam tahun (1994-2000) kawasan hutan di daerah itu berkurang 204.600,08 hektar. Sementara itu, lahan terbuka bertambah 107.539,55 hektar, perkebunan bertambah 91.342,88 hektar, dan semak belukar bertambah 48.461 hektar. Parahnya, banyak lahan yang telanjur dibuka itu kini ditinggalkan dan ditelantarkan.

Ketua Gabungan Perusahaan Perkebunan Indonesia (GPPI) Kalbar Sukarman Hartoyo, misalnya, mengatakan, di Kalbar saat ini ada 29 perusahaan perkebunan yang tergabung dalam GPPI dengan luas areal perkebunannya mencapai 229.172 hektar, terdiri dari 127.555 hektar kebun plasma dan

101.617 hektar kebun inti. Luas areal ini diperkirakan baru 25 persen dari lahan perkebunan yang bisa dikembangkan di Kalbar. Berdasarkan data dari Kantor Dinas Perkebunan Kalbar, tahun 2002 luas areal yang berproduksi baru sekitar 159.135 hektar dengan produksi sekitar 220.366 ton per tahun. Perkebunan ini dikelola oleh sekitar 52.000 petani (Kompas, 6/12/2003).

Sedikitnya lahan perkebunan sawit yang berproduksi ini tentu sangat memprihatinkan karena sangat kontras dengan minat awal perusahaan besar swasta (PBS), PBS asing, kelompok tani maupun koperasi. Awalnya mereka sangat menggebu-gebu untuk membuka areal perkebunan kelapa sawit. Buktinya, untuk kelompok tani dan koperasi saja ada sekitar 11 kelompok yang mendapat konfirmasi lahan dengan luas mencapai 62.560 hektar. Adapun PBS yang belum melakukan kegiatan ada enam perusahaan dengan luas lahan yang mendapat arahan mencapai 184.000 hektar. PBS yang memanfaatkan cadangan lahan untuk transmigrasi ada delapan perusahaan dengan luas lahan yang telah diarahkan 201.650 hektar, sekitar 129.000 hektar di antaranya telah mendapat izin prinsip. Namun, realisasi tanamnya baru 28.439 hektar. Selain itu, PBS yang telah mendapatkan informasi lahan melakukan prasarvei dan membuat proposal, namun belum memiliki izin prinsip ada 25 perusahaan dengan luas lahan yang telah diarahkan 375.250 hektar.

Sementara itu, PBS yang beroperasi ada 28 perusahaan dengan luas lahan 426.450 hektar dan telah mendapat izin prinsip di antaranya seluas 241.918 hektar. Untuk PBS asing, luas lahan pengembangan kebunnya ada 12 perusahaan dengan lahan yang diarahkan seluas 281.880 hektar, dan telah mendapat izin prinsip seluas 175.000 hektar. Dinas Perkebunan Kalbar sampai tahun 2002 telah mengusulkan agar 22 perusahaan perkebunan kelapa sawit dicabut izinnya. Ini karena mereka tidak melakukan kegiatan penanaman sawit, bahkan menelantarkan lahan yang telah dicadangkan seluas 453.350 hektar, dan 274.050 hektar di antaranya sudah mendapatkan izin prinsip. Data ini tentu saja belum menggambarkan keadaan sesungguhnya.

Direktur Eksekutif World Wild Fund (WWF) Mubariq Ahmad menyatakan kepada Kompas (6/12/2003), bukan cuma pengusaha lokal yang bermasalah di sektor perkebunan kelapa sawit, perusahaan asing pun mempunyai beragam masalah, terutama karena mereka menerapkan standar ganda. Di negara asalnya, mereka berusaha agar hutan tetap lestari, tetapi saat berinvestasi di Indonesia, hutan perawan pun mereka babat.

Penerapan standar ganda ini terus berlangsung hingga sekarang dan sama sekali tidak memperhatikan masalah lingkungan. Misalnya, penggunaan pestisida serta pada saat mendirikan pabrik pengolahan kelapa sawit tanpa disertai analisis mengenai dampak lingkungan (amdal), termasuk ketentuan mengenai tanah adat dan tanah ulayat juga dilanggar. Hal ini berakibat

terjadi sengketa dengan masyarakat lokal maupun masyarakat adat di sektor perkebunan kelapa sawit. Faktor ini menyebabkan banyak pihak meminta pemerintah menghentikan investasi perkebunan kelapa sawit yang tidak memperhatikan lingkungan dan sosial (Suara Pembaharuan, 23/9/2004).

Gubernur Kalimantan Barat, Usman Ja'far di hadapan pengurus GPPI Kalimantan Barat periode tahun 2003-2008 di Pontianak, Jumat pekan lalu, mengatakan, sejak krisis ekonomi tahun 1997, perkembangan perkebunan kelapa sawit mengalami stagnasi. Usman Ja'far menawarkan dua strategi untuk mengatasi permodalan sekaligus menggarap perkebunan sawit secara serius. Pertama, para pengusaha perkebunan mengembangkan usaha dengan jalan membangun perusahaan bersama atau konsorsium (Suara Pembaharuan, 23/9/2004). Dengan cara ini, diharapkan para pengusaha memiliki modal yang cukup besar dengan pengelolaan perusahaan yang sehat. Melalui cara itu, diharapkan tidak ada lagi tudingan negatif terhadap usaha di sektor perkebunan kelapa sawit. Sebab, selama ini gencar tudingan yang menyebutkan bahwa dalihnya untuk membuka perkebunan kelapa sawit, padahal yang diincar sebenarnya adalah hutan perawan.

2.5. Beberapa Masalah Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit

Proyeksi minyak goreng di dalam negeri, baik yang menggunakan bahan minyak kelapa sawit mentah ataupun juga minyak kelapa selama 6 tahun terakhir mengalami kenaikan rata-rata 10,6 persen per tahun. Minyak goreng yang dibuat dari bahan kelapa sawit mengalami peningkatan hingga 11,7 persen per tahun, dan minyak goreng yang terbuat dari kelapa hanya meningkat rata-rata 8,3 persen per tahun. Peningkatan produksi ini tampaknya masih akan dan terus terjadi pada tahun-tahun mendatang, karena di samping adanya pertumbuhan penduduk sekitar 1,8 persen per tahun, juga adanya peningkatan konsumsi nyata atau riil akibat perbaikan kondisi ekonomi serta faktor-faktor lainnya, termasuk kenaikan produksi minyak goreng dalam situasi krisis moneter sampai dengan dua tahun terakhir.

Menurut data dari Badan Pusat Statistik, sumbangan ekspor dari subsektor ini rata-rata naik 4,1 persen per tahun. Perkembangan perkebunan kelapa sawit ini menunjukkan gejala yang menggembirakan sejak tahun 1989 sampai sekarang, data luasan yang diperoleh 42 persen dari total areal perkebunan kelapa sawit ini dikelola oleh perusahaan negara, 26 persen oleh perusahaan swasta dan sisanya 32 persen dikelola oleh rakyat. Namun pada tahun 1996 lalu perkebunan besar swasta menjadi terbesar yaitu 955.326 hektar atau merupakan 46 persen. Sedangkan perkebunan kelapa sawit yang dikelola oleh perkebunan besar rakyat pada tahun 1996 mencapai 722.533 hektar dan mulai menurun sejak krisis terjadi sekitar tahun 1998.

Perlu diakui bahwa krisis ekonomi, moneter dan politik yang terjadi di Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 dampaknya masih berlanjut hingga saat ini, dan tidak seorang pakar pun dapat meramalkan secara tepat sebenarnya kapan akan berakhir. Dengan terjadinya krisis yang berkepanjangan itu, tampaknya mempengaruhi kemampuan pembiayaan (financing) pemerintah terhadap program-program pembangunan. Termasuk, kemampuan masyarakat sebagai mitra pemerintah dalam pembiayaan pembangunan sangat lemah. Lembaga keuangan bank maupun bukan-bank, secara tiba-tiba kehilangan kemampuan, sehingga pembiayaan proyek-proyek dibatalkan atau dihapuskan, dan segenap konsentrasi diarahkan kepada upaya recovery dan rehabilitasi. Gejala ini merupakan kelemahan (weakness) yang terjadi di Republik Indonesia saat ini. Ditambah dengan belum pulihnya keamanan di beberapa daerah dan masih lemahnya pemahaman terhadap UU RI No. 22/1999 tentang Otonomi Daerah. Sehingga menyebabkan situasi yang belum kondusif untuk berusaha atau menanamkan modal. Banyaknya penjarahan terhadap hasil-hasil tanaman atau perkebunan yang siap panen, serta faktor-faktor gangguan keamanan lainnya telah menjadi salah satu alasan bagi Lembaga Ekonomi International Standard dan Poor's serta Moody's untuk menempatkan Indonesia dalam kategori atau rating yang sangat rendah (risiko sangat tinggi) sebagai negara tujuan investasi.

Gejala lain yang dapat dikategorikan sebagai kelemahan dalam pengembangan perkebunan di Indonesia adalah lemahnya kemampuan manajemen, serta kelemahan penguasaan teknologi baik dalam pembibitan, produksi maupun pengolahan pasca panen. Sedangkan hal-hal yang dapat digolongkan sebagai ancaman adalah belum pulihnya kepercayaan internasional terhadap Indonesia, belum pulihnya perekonomian regional, fluktuasi yang cukup besar dari harga komoditas perkebunan di pasaran internasional, serta adanya perkembangan teknologi di negara-negara maju sehingga memungkinkan dibuatnya bahan-bahan pengganti atau substitusi dari komoditas perkebunan tertentu.

Suatu sektor industri layak menjadi strategi besar pembangunan perekonomian, jika kontribusinya dalam perekonomian agregat relatif besar. Dengan demikian, jika sektor tersebut berkembang pastilah akan menarik keseluruhan sektor-sektor ekonomi ikutannya. Artinya, sektor ekonomi yang berbasis pada sektor pertanian membawa dampak yang positif secara luas terhadap ketahanan ekonomi. Dampak positifnya juga akan terasa pada sektor kehidupan ekonomi yang lain. Salah satu contoh nyatanya adalah di bidang jasa, dapat juga sebagai jasa transportasi atau berdirinya manufaktur di bagian hilir yang dapat menyerap tenaga kerja dan kemungkinan manufaktur hilir tersebut dapat menggantikan komponen-komponen import yang dibutuhkan oleh industri lainnya.

Kurang lebih seratus tahun sejak tanam paksa dinyatakan formal berakhir, era pembangunan perkebunan pasca kolonialisme dimulai. Sampai saat ini era pembangunan perkebunan dapat dibagi ke dalam 3 generasi :

- ◆ Pertama adalah generasi perkebunan inti akyat atau PIR. Pada generasi ini mulai diterapkan sistem Inti - Plasma. Generasi ini terbagi ke dalam 2 periode yaitu periode PIR-BUN dengan Pola Nucleus Smallholder Estate (NES) yang sumber dana bantuannya dari negara asing melalui World Bank, ADP dan lain-lain. Komoditi-komoditi yang akan dikembangkan antara lain karet, kelapa sawit, kelapa hibrida dan tebu, dan PIR-BUN lokal dan PIR-BUN khusus yang sumber dananya dari Pemerintah. Generasi PIR-BUN ini dilaksanakan mulai tahun 1975 sampai 1986. Pada generasi ini diantaranya diterapkannya program Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI) melalui Inpres No. 9 tahun 1975. Untuk lebih lanjut meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya para petani perkebunan dikeluarkan Inpres No. 5 tahun 1977 Jo Inpres No. 5 tahun 1978.
- ◆ Kedua adalah generasi PIR-Trans. Generasi ini muncul sebagai akibat semakin menurunnya pendapatan devisa pemerintah dari minyak, sehingga pemerintah berupaya untuk meningkatkan devisa non-migas dengan cara menarik para investor/ privatisasi untuk berpartisipasi dalam mengembangkan perkebunan melalui pemberian pinjaman kredit investasi dengan tingkat bunga rendah baik untuk inti maupun plasma, yaitu sebesar 16 persen. Pemberian kredit investasi dengan bunga rendah ini ternyata lebih banyak menguntungkan para investor saja, para petani tetap merupakan golongan yang dirugikan.
- ◆ Ketiga adalah generasi PIR – KKPA. Dengan adanya peraturan bank yang dikenal dengan istilah Paket 1 Januari 1990, yang memberhentikan kredit investasi untuk PIR-Trans. Kebijakan ini melahirkan kredit KKPA sebagai upaya pemerintah untuk lebih banyak melibatkan rakyat kecil. Kredit PIR-KKPA terdiri dari 2 jenis yaitu kredit PIR-KKPA murni dan kredit KKPA PIR-Trans di wilayah KTI. Kredit PIR-KKPA murni sudah dimulai berjalan, sedangkan kredit KKPA PIR-Trans di wilayah KTI sebetulnya sudah ada 8 perusahaan disetujui untuk dikucurkan kreditnya, tetapi sampai sekarang belum terlaksana karena terjadi krisis moneter, kredit ini bebas untuk komoditi apa saja.

Dengan adanya program-program di atas kinerja perkebunan di tanah air kita secara kuantitatif tampak berkembang, luas areal perkebunan total pada tahun 1968 hanya 0,5 hektar menjadi 14,2 juta hektar pada tahun 1998. Yang paling mengesankan adalah pertumbuhan luas areal perkebunan rakyat bertambah dari 4,1 hektar dari tahun 1968 menjadi 11,2 juta hektar pada

tahun 1998. Di dalam periode yang sama luas lahan perkebunan besarpun berkembang, untuk BUMN dari 0,4 juta hektar menjadi 1 juta hektar dan untuk PBSN dari 0,4 juta hektar menjadi 2,2 juta hektar. Sampai saat ini dapat digambarkan perkembangan jenis komoditas kelapa sawit sebagai berikut :

Volume ekspor kelapa sawit dengan bentuk CPO meningkat sebesar 14,75 persen dan nilai ekspornya meningkat 25,8 persen. Dengan pangsa pasar sebesar 25 persen posisi Indonesia merupakan penghasil CPO ke 2 didunia setelah Malaysia. Hal ini menunjukkan pula bahwa pengembangan kelapa sawit masih berpeluang untuk ditingkatkan. Akan tetapi meskipun Indonesia mencapai keberhasilan dalam pengembangan komoditi kelapa sawit, tetapi sebetulnya Indonesia dinilai terlambat mengembangkan produksi hilir karena tenggelam dengan ekspor CPO dan bukan produk lain seperti Fatti Acid, Glycerin, Steame Acid dan Fatti Alkohol yang kesemua mempunyai nilai tambah mana kala di ekspor. Bahkan sekarang terjebak dengan produk CPO sepenuhnya untuk minyak goreng, padahal di ekspor inipun Indonesia kalah dari Malaysia dan sedang terancam oleh Thailand.

Penanganan komoditas perkebunan secara bersungguh-sungguh untuk meraih pangsa pasar yang tinggi akan menghasilkan peningkatan devisa non migas. Oleh karena itu, dukungan dari segi peraturan untuk mengantisipasi perkembangan ekonomi global dan untuk lebih meningkatkan arus penanaman modal juga sudah dipersiapkan. Namun apabila dilihat secara kualitatif perkebunan nasional masih tertinggal dari perkebunan negara tetangga, khususnya Malaysia dan Thailand. Misalnya produktivitas kelapa sawit di Malaysia dapat mencapai 30 – 40 ton TBS/ hektar sedangkan di Indonesia baru mencapai 15 – 25 ton/ hektar. Dengan kemajuan/ kondisi perkebunan seperti itu, sampai saat ini pangsa pasar dan posisi di pasar dunia beberapa jenis komoditas perkebunan Indonesia di pasaran internasional adalah sebagai berikut:

- ◆ *Pangsa pasar komoditas kopi baru mencapai 7 persen dengan posisi nomor 3.*
- ◆ *Pangsa pasar kelapa sawit 25 persen dengan posisi nomor dua setelah Malaysia.*
- ◆ *Pangsa pasar kakao 9,79 persen dengan posisi nomor 8.*
- ◆ *Pangsa pasar kelapa 30 persen dengan posisi nomor 2 setelah Philipina.*
- ◆ *Pangsa pasar karet 34 persen.*
- ◆ *Pangsa pasar lada 26 persen.*

- ◆ Pangsa pasar minyak kelapa 22 persen dan
- ◆ Pangsa pasar teh 9 persen.

Melihat pangsa pasar dan posisi komoditas ekspor di pasar dunia, masih besar peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan produksi komoditas perkebunan. Namun di lain pihak banyak kendala dan permasalahan yang sekarang dihadapi para petani antara lain sebagai berikut :

- ◆ *Kondisi yang paling memprihatinkan adalah kondisi di mana kebun plasma belum ditanami, bibit belum tersedia dan bahkan untuk beberapa daerah keprihatinan itu semakin parah lagi, dengan tidak adanya informasi tentang kepastian kapan kebun-kebun akan dapat dimulai kegiatannya.*
- ◆ *Berkaitan dengan masalah perbankan, para investor tidak mampu lagi mengembangkan perkebunannya dan tersangkut kredit macet lalu menjadi pasien BPPN.*
- ◆ *Banyak lahan perkebunan bermasalah dari aspek keabsahannya atau legal.*

Ketiga persoalan itu, terutama yang pertama dan kedua adalah persoalan yang paling mendesak untuk diselesaikan, sebab berdampak langsung terhadap eksistensi pengembangan usaha para petani plasma. Sampai saat ada lima buah perusahaan yang menjadi pasien BPPN. Tampaknya kelima perusahaan itu kini, menyengsarakan kehidupan sekitar 12.348 kepala keluarga petani plasma. Beberapa sebab kelima perusahaan tersebut menjadi pasien BPPN. Pengakuannya dapat diklasifikasi ke dalam beberapa kategori berikut :

- ◆ Pertama adalah karena bencana alam (kebakaran dan kebanjiran) yang menyebabkan investor tidak mampu lagi mengembangkan perkebunannya. Sedangkan para petani plasmanya, beberapa telah menghasilkan tandan buah segar kelapa sawit (TBS-KS), tetapi tidak ada penampungnya. Sehingga mereka terpaksa mencari pasar sendiri. Beberapa petani kelapa sawit lain kehilangan plasmanya, karena bencana alam. Beberapa petani tampaknya berhasil memanen TBS-KS, meskipun dengan kualitas remdeman yang sangat rendah.
- ◆ Kedua adalah karena perilaku investor yang tidak bertanggung-jawab. Mereka membangun plasma, tetapi tidak membangun inti, dan sekaligus tidak membayarkan pengembalian kredit para petani plasma ke bank pemberi kredit. Kondisi ini tampak pada beberapa lokasi kebun, yang plasmanya sudah ada tetapi biaya operasional dan pemeliharaan terkendala. Dengan demikian kebun plasmanya akan

terbengkalai atau terlantar. Hal ini menyebabkan economic performance nya dari waktu ke waktu akan semakin buruk, dan pada gilirannya, apabila dibiarkan terus menerus keseluruhan usaha perkebunan tersebut menjadi terhenti.

- ◆ Ketiga adalah terdapat beberapa perkebunan yang diambil alih oleh perusahaan lain karena ditinggalkan oleh perusahaan yang lama. Gejala ini tampaknya menjadi sebab biaya operasional dan pemeliharaan terbengkalai. Pada gilirannya akan berdampak pada rendahnya kualitas perkebunan plasma para petani. Selain itu pertanggung-jawaban progres pengembalian kredit petani plasmanya juga tidak jelas, dan ini berdampak pada ketidak-jelasan posisi hutang para petani kelapa sawit pada bank pemberi pinjaman.
- ◆ Keempat adalah suatu kondisi di mana petani kelapa sawit ini tidak dapat direkrut pada saat TBS-KS ini siap dipanen. Akibat dari keadaan tersebut sangat bersifat negatif, karena sifat dari buah kelapa sawit yang sangat vulnerable tidak tahan atau cepat rusak (resistensi tinggi) setelah dipanen. Buah kelapa sawit ini yang telah dipanen harus segera diangkut ke pabrik untuk diolah. Sebab, jika tidak, tandan buah kelapa sawit yang rusak itu tidak akan memiliki nilai sama sekali, atau dengan kata lain jadi tidak layak untuk diolah.

Dari keempat persoalan itu, tampaknya menyebabkan petani plasma perkebunan kelapa sawit tidak dapat bekerja mengusahakan perkebunannya secara maksimal. Sedangkan pemerintah sangat berharap besar kepada mereka, para petani kelapa sawit. Paling sedikit pemerintah mengharapkan terjadinya peningkatan produksi pertanian dan atau perkebunan kelapa sawit, khususnya, dan produk pertanian dan perkebunan lainnya pada skala yang sangat tinggi. Alasannya adalah karena sektor pertanian dan perkebunan ini menjadi salah satu andalan dalam peningkatan devisa negara. Dengan demikian diperlukan sekali terobosan-terobosan kebijakan strategis pembangunan ekonomi di bidang agrobisnis terutama perkebunan.

Pembangunan perkebunan harus dilakukan dengan upaya meningkatkan peran badan usaha milik negara (BUMN) perkebunan, sehingga menjadi sumber andalan penerimaan negara. Upaya-upaya itu dapat dilakukan dengan strategi kebijakan restrukturisasi, profitisasi dan privatisasi BUMN perkebunan. BUMN perkebunan dibangun sebagai suatu corporate culture yang bertaraf internasional. Caranya adalah perkebunan besar diperlakukan secara terpisah dari perkebunan rakyat. Artinya, perkebunan besar hanya akan bertugas sebagai pencipta pasar produk di kawasan pasar internasional, untuk mendulang keuntungan sebesar-besarnya bagi devisa negara.

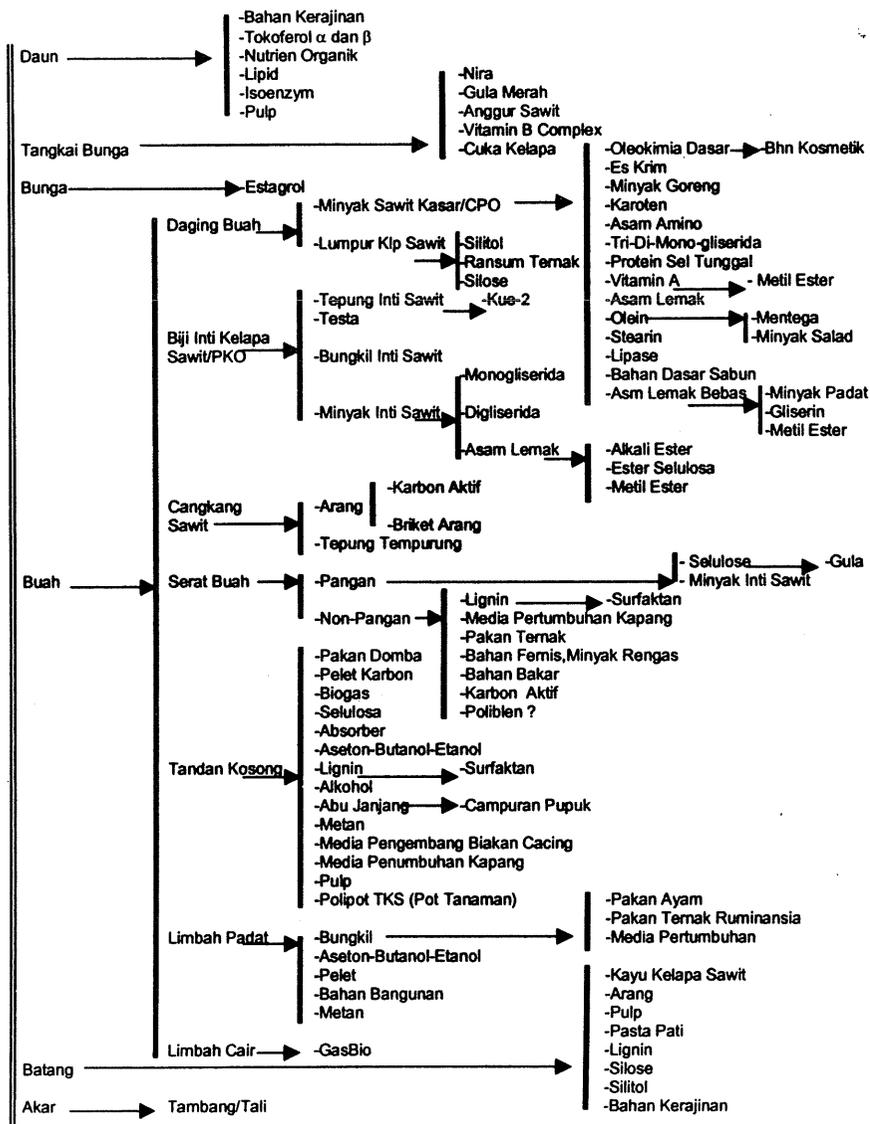
Selain itu, tugas yang sangat penting juga adalah menjadi semacam foster parent atau bapak angkat dari perkebunan rakyat. Strategi ini ditujukan untuk jangka menengah dan jangka panjang yang diharapkan usaha perkebunan bagian hulu dapat berjalan secara berkesinambungan. Dengan demikian akan terjadi pengembangan restrukturisasi perkebunan, yang pada gilirannya diharapkan mampu mengembangkan kelembagaan, sumber daya manusia, dan Iptek, serta mengembangkan tata nilai yang dapat dipergunakan untuk mensinergiskan ketiga unsur di atas secara positif dan dinamis.

2.6. Penutup

Terjadinya krisis moneter yang berkepanjangan telah membuka kesadaran bahwa sektor pertanian utamanya perkebunan merupakan subsektor yang paling bertahan terhadap badai krisis yang menimpa di Indonesia. Perkebunan merupakan salah satu subsektor yang dapat diandalkan untuk memperkuat perekonomian Indonesia. Selama ini para petani belum diberdayakan secara optimal. Petani perlu segera mendapat uluran tangan. Guna menyelesaikan persoalan ini dan untuk memperkuat basis perkebunan dan pertanian di Republik Indonesia yang tercinta ini, setidaknya diperlukan pembangunan perkebunan kelapa sawit yang berbasis pada pemberdayaan rakyat. Selain itu, melihat kondisi keuangan Republik Indonesia saat ini, tampaknya menarik investor asing untuk mengembangkan perkebunan kelapa sawit di Republik Indonesia yang memiliki lahan yang cukup luas merupakan langkah yang perlu terus dilakukan.

Lampiran 1.

Diagram 2.2 Rangkaian Pengembangan Industri Kelapa Sawit



Sumber Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah (PDII)-LIPI, LIPI Press 2000

GAMBARAN UMUM DAERAH KABUPATEN LANGKAT, PROPINSI SUMATERA UTARA**3.1. Pengantar**

Seting daerah penelitian memberikan gambaran tentang latar belakang geografis, potensi daerah, sarana dan prasarana daerah Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara. Semua kondisi fisik dan non-fisik daerah tersebut dapat memberikan modal daerah untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit. Gambaran kondisi geografis menguraikan tentang keadaan letak astronomis, batas wilayah, luas dan tataguna lahan, kondisi topografis, kesuburan tanah dan tata air. Dalam potensi daerah akan diuraikan tentang sumber daya alam dan sumber daya manusianya. Uraian sumber daya alam meliputi sumber alam yang paling menonjol perannya dalam perekonomian daerah, terutama yang bertalian dengan pengembangan perkebunan kelapa sawit dan prospek pengembangannya. Sumber daya manusia yang diuraikan di sini untuk melihat tentang bagaimana potensi sumber daya manusia yang dimiliki Kabupaten Langkat sebagai modal pembangunan ekonomi dan pengembangan perkebunan kelapa sawit. Terakhir bagian ini menguraikan tentang sarana dan prasarana daerah yang dapat memberikan kemudahan dalam pengembangan ekonomi daerah, utamanya yang terkait dengan perkebunan.

3.2. Kondisi Geografis**Letak geografis**

Kabupaten Langkat merupakan salah satu dari 11 kabupaten/ kota di Propinsi Sumatera Utara. Kabupaten ini terletak di daerah tropis yang secara astronomis antara 3° 14' dan 4U 13' Lintang Utara, antara 93U 51' dan 98U 45' Bujur Timur. Dengan letaknya di wilayah tersebut kondisi iklim dan musim di daerah ini mengikuti wilayah tropis. Curah hujan rata-rata per tahun cukup tinggi dan suhu rata-rata mencapai sekitar 30° C. Kondisi ini cukup cocok untuk pengembangan usaha tanaman perkebunan tropis.

Wilayah kabupaten ini sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Langsa (Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam), sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Karo dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tenggara. Karena letaknya yang berbatasan dengan wilayah Aceh yang merupakan daerah konflik, Kabupaten Langkat mendapatkan dampak negatif dari masalah tersebut, antara lain merupakan daerah penampungan dan pelarian para

pengungsi dari Aceh. Masuknya para pengungsi tersebut telah menjadi beban bagi pemerintah dan masyarakat Kabupaten Langkat.

Dalam penelitian ini desa sampel yang dipilih adalah Desa PIR-ADB di Kecamatan Besitang atau dikenal dengan Desa PIR-ADB Besitang. Wilayah desa ini sebelah utara berbatasan dengan Desa Selesai, sebelah selatan berbatasan dengan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) – daerah konservasi alam, sebelah barat berbatasan dengan Bukit Mas dan sebelah timur berbatasan dengan Desa Harapan Jaya, Kecamatan Seilepa. Letaknya yang berbatasan dengan TNGL ini mengakibatkan penduduk desa ini dapat memanfaatkan adanya pelestarian alam taman nasional tersebut, antara lain kelangsungan sumber air, pencegahan erosi dan tanah longsor. Namun juga ada segi negatifnya, yaitu karena dekat dengan pemukiman penduduk daerah cagar alam tersebut dapat menjadi wilayah perambahan hutan bagi penduduk yang haus akan lahan pertanian. Kegiatan tersebut yang tidak diharapkan demi kelestarian lingkungan di wilayah Kabupaten Langkat pada khususnya dan Propinsi Sumatera Utara pada umumnya.

Luas dan tata guna lahan

Kabupaten Langkat terdiri dari 20 kecamatan, yang meliputi luas wilayah 626 329 km², dengan jumlah penduduk tahun 2002 sebanyak 926.069 orang, maka kepadatan penduduk pada tahun tersebut sebesar 148 orang/km². Sebagai daerah pertanian dan perkebunan tingkat kepadatan penduduk sebesar 148 orang/km² tersebut termasuk sudah cukup padat. Namun tingkat kepadatan penduduk tersebut adalah kepadatan global (physiological density) termasuk untuk daerah perkotaannya. Daerah Kecamatan Besitang yang merupakan daerah fokus kajian luasnya 71.048 km², dengan jumlah penduduk 49 206 orang tahun 2002, hampir seluruh wilayahnya merupakan pedesaan, pertanian dan perkebunan, kepadatan penduduknya hanya sebesar 69 orang/ km² (BPS, 2002). Wilayah ini sebagian besar merupakan lahan perkebunan kelapa sawit dan karet. Sebagian lagi untuk lahan pertanian tanaman pangan dan permukiman serta sebagian lagi merupakan areal pelestarian alam Taman Nasional Gunung Leuser. Areal taman nasional tersebut kemiringannya cukup tajam yang secara topografis kurang memungkinkan untuk usaha pertanian dan perkebunan maupun permukiman. Areal terakhir ini yang harus dipertahankan menjadi hutan lindung. Namun sayang sebagian wilayah TNGL tersebut ada yang sudah mulai dirambah oleh penduduk sekitarnya untuk usaha tanaman pangan dan perkebunan. Kegiatan tersebut apabila terus dibiarkan jelas akan mengancam kelestarian taman ini sebagai suaka alam, pelestarian tanah dan air di wilayah Kabupaten Langkat pada khususnya dan Propinsi Sumatera Utara pada umumnya.

Sedangkan Desa PIR-ADB sebagai desa sampel memiliki luas wilayah 1.457,5 hektar. Dari luas wilayah tersebut, penggunaan lahan untuk pemukiman penduduk seluas 28 hektar (1,9 persen); bangunan umum (perkantoran – KUD, balai desa, sekolah; pasar; masjid; gereja; jalan) seluas 5,5 hektar (0,4 persen); ladang 120 hektar (8,2 persen); perkebunan rakyat (termasuk plasma dan lahan pangan/ food crop) seluas 1.335 hektar (89,5 persen). Sebagai desa perkebunan dominan lahan pertaniannya diperuntukkan usaha tanaman kelapa sawit dan hanya sebagian kecil lahan untuk usaha tanaman pangan.

Kondisi topografis

Dalam perencanaan suatu wilayah mempelajari kondisi topografis daerah sangat diperlukan. Kajian topografis dapat menggambarkan tentang kondisi bentang alam, yakni kondisi ketinggian dan kemiringan suatu wilayah. Dengan memperhatikan ketinggian dan kemiringan wilayah tersebut dapat merencanakan tentang penggunaan ruang dan lahan secara tepat jenis vegetasi apa yang boleh ditanam. Hal tersebut perlu untuk menghindari atau mengurangi kerusakan lingkungan alam akibat penggunaan ruang yang kurang tepat.

Secara topografis wilayah Kabupaten Langkat dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) wilayah, yaitu :

1. Wilayah timur, merupakan dataran pantai dengan ketinggian antara 0 – 4 m di atas permukaan laut. Sebagian wilayah ini dimanfaatkan untuk usaha perikanan dan usaha pertanian tanaman pangan.
2. Wilayah tengah, merupakan dataran rendah dengan ketinggian sampai 30 m di atas permukaan laut, dimanfaatkan untuk daerah pertanian tanaman pangan dan perkebunan. Daerah areal perkebunan kelapa sawit kebanyakan memanfaatkan daerah dataran dengan ketinggian sampai 30 m di atas permukaan laut tersebut. Menurut Poeloengan (1988) tanaman kelapa sawit sangat tergantung pada kondisi iklim, topografi lahan, lengas, karakteristik fisik tanah, kesuburan, salinitas dan alkalinitas. Tanaman kelapa sawit yang baik adalah yang ditanam di daerah tropis, daerah topografi datar, kelembaban tinggi dan lahan yang subur, seperti di wilayah tengah Kabupaten Langkat ini.
3. Wilayah barat yang merupakan dataran tinggi dengan ketinggian antara 30 – 1200 m di atas permukaan laut, sebagian wilayah yang dimanfaatkan untuk daerah perkebunan termasuk perkebunan kelapa sawit. Namun ada kecenderungan petani perkebunan kelapa sawit rakyat telah mulai merambah daerah lereng TNGL (Taman nasional Gunung Leuser). Ada beberapa puluh hektar daerah TNGL yang pada

tahun 90-an sempat dilakukan illegal logging oleh oknum pengusaha hutan dan setelah kayu gelondongannya diangkut lahannya dibiarkan tetap gundul dan tumbuh menjadi hutan alang-alang. Kemudian oleh masyarakat sekitar dirambah untuk digunakan sebagai ladang dan kebun kelapa sawit. Kegiatan perambahan hutan TNGL tersebut apabila dibiarkan terus dikawatirkan akan merusak kelestarian taman nasional tersebut. Kondisi tersebut diperparah dengan masuknya para pengungsi dari Aceh menempati sebagian lokasi hutan lindung TNGL dan di antara mereka ada yang mengolah lahan hutan lindung untuk usaha tanaman pangan. Kemudian muncul kecemburuan dari penduduk di desa-desa sekitar TNGL. Seolah-olah para pengungsi diizinkan menempati dan mengolah di hutan lindung, mengapa orang setempat tidak diperbolehkan (Kompas, 6 April 2001). Sekitar Desa PIR ADB Kecamatan Besitang, banyak penduduk yang tinggal dan menempati wilayah TNGL, dalam kondisi yang miskin dan tidak memiliki lahan garapan. Kemudian ditambah lagi adanya perhatian khusus pemerintah untuk para pengungsi yang berupa bantuan beras 400 gram dan uang lauk-pauk Rp 1.500,- per orang per hari, menciptakan kecemburuan sosial. Penduduk lokal yang tidak mampu juga menganggap bahwa dirinya juga pantas mendapatkan bantuan. Pengungsi di TNGL tersebut mencapai sekitar 200 KK. Apabila kegiatan perambahan hutan TNGL dibiarkan terus akan sangat mengganggu kelestarian taman nasional tersebut.

Desa PIR-ADB Besitang secara topografis, wilayahnya merupakan dataran dan perbukitan. Wilayah dataran meliputi luas 601 hektar dan wilayah perbukitannya atau wilayah bergelombang seluas 900 hektar. Sebagian besar wilayahnya telah dimanfaatkan untuk usaha perkebunan kelapa sawit, yaitu sebagai perkebunan rakyat yang berupa plasma dan bukan plasma. Sebagian kecil lainnya yang dimanfaatkan untuk tanaman pangan.

Kesuburan tanah

Jenis-jenis tanah dan penggunaan lahan yang berada di wilayah Kabupaten Langkat secara umum juga dapat diklasifikasikan menjadi 3 wilayah. Tiga wilayah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Di sepanjang pantai terdiri dari jenis tanah aluvial yang cukup subur dan dapat digunakan untuk usaha tanaman pertanian pangan. Dengan irigasi yang bagus daerah ini menjadi daerah persawahan untuk tanaman padi, di samping juga untuk jenis tanaman pangan lainnya.
2. Di daerah dataran rendah dengan jenis tanah glei humus rendah, hydromorf kelabu dan planosol. Daerah-daerah ini yang sangat cocok untuk pengembangan usaha perkebunan kelapa sawit. Oleh karena

itu, sejak zaman penjajahan Belanda yang diusahakan untuk perkebunan kelapa sawit. Di samping untuk usaha perkebunan kelapa sawit juga dapat digunakan untuk usaha tanaman perkebunan jenis komoditi lainnya, seperti karet, tembakau, coklat, kelapa dsb. Sejarah perkebunan karet di daerah Langkat dan Sumatera Utara pada umumnya juga sudah cukup lama dikembangkan, ingat sejarah tentang kuli kontrak (Cultuurstelsel) pada tahun 1930 yang dicetuskan oleh van den Bosch pada zaman Kolonial Belanda. Seperti di Desa PIR-ADB kedalaman solum tanah antara 50 – 200 cm. Pada kedalaman 50 – 99 cm meliputi areal 115 hektar dan antara 100 – 200 cm meliputi 1.486 hektar. Oleh karena itu, cukup cocok untuk usaha perkebunan tanaman kelapa sawit.

3. Di daerah dataran tinggi merupakan tanah podsolid berwarna merah kuning. Daerah ini yang paling cocok adalah untuk dilestarikan sebagai daerah hutan lindung. Daerah TNGL (Taman Nasional Gunung Leuser – Gunung Leuser National Park) merupakan daerah yang perlu dilestarikan sebagai konservasi alam. Di taman ini menyimpan jenis flora sekitar 8 500 species dan jenis fauna sekitar 700 species binatang. Mereka terdiri dari 320 burung, 176 binatang mamalia dan 194 reptilia dan amphibi. Agar daerah tetap lestari, maka perlu dihindari perambahan hutan, agar bencana alam akibat penggundulan hutan seperti tanah longsor dan matinya sumber air dimasa mendatang bagi penduduk di sekitar Gunung Leuser tidak terjadi.

Tata air

Wilayah daerah Kabupaten Langkat memiliki dan dialiri oleh sebanyak 26 buah sungai, yang terdiri dari sungai-sungai besar dan sungai-sungai kecil. Di antara sungai-sungai yang besar adalah Sungai Wampu, Sungai Batang Serangan, Sungai Lapan dan Sungai Besitang. Pada umumnya sungai-sungai tersebut berair sepanjang tahun. Oleh karena itu, sungai-sungai tersebut dapat digunakan untuk pengairan pertanian sepanjang tahun terutama di daerah dataran rendah. Ada beberapa wilayah kecamatan di Kabupaten Langkat yang merupakan daerah tanaman padi sawah. Bahkan ada beberapa sungai di antaranya masih dapat digunakan untuk dilewati sarana perhubungan sungai, seperti sampan dan perahu motor. Sarana perhubungan tersebut biasa membawa hasil produksi pertanian dari hulu ke hilir.

3.3. Potensi Sumber Daya Alam

Potensi sumber daya alam meliputi sumber daya tambang, sumber daya lahan, sumber daya laut, sumber daya hutan, sumber daya air dsb. Dalam subbab ini fokus kajian hanya pada sumber daya alam yang ada di wilayah

Kabupaten Lahat. Di samping itu, juga akan menguraikan sumber daya alam yang paling menonjol dan yang perannya besar terhadap pendapatan daerah Kabupaten Lahat, serta sumber daya alam yang sangat terkait dengan usaha perkebunan kelapa sawit.

Potensi alam yang terkenal di Kabupaten Langkat adalah pertambangan minyak. Minyak di daerah ini merupakan satu-satunya tambang minyak bumi di Propinsi Sumatera Utara yang dikelola Pertamina (BPS Kab. Langkat, 2002). Tambang minyak bumi terdapat di Kota Pangkalan Brandan dan Pangkalan Susu.

Adapun diposit tambang minyak bumi di Kota Pangkalan Brandan dapat menghasilkan :

- ◆ Kapasitas CDU (MBCD) :
- ◆ Actual 0,51 (510 barel/ hari)
- ◆ Discharged 4,50 (4 500 barel/ hari)
- ◆ Kapasitas CDU – II (MBCD)
- ◆ Actual 400 Mm³/ hari (400 000 m³/ hari)
- ◆ Discharged 850 Mm³/ hari (850 000 m³/ hari)

Sedangkan di Kota Pangkalan Susu dapat menghasilkan aspal :

- ◆ Actual 400 Mm³/ hari (400 000 m³/ hari)
- ◆ Discharged 850 Mm³/ hari (850 000 m³/ hari)

Selain tambang minyak bumi dan aspal di kabupaten ini juga ada deposit tambang lain yang belum dikelola. Tambang-tambang tersebut adalah batu bara, tras, kapur dan pasir kuarsa. Sebagai sumber daya alam yang unrenewable (tidak dapat diperbarui), nampaknya deposit 4 jenis tambang tersebut tidak begitu besar dan masih kurang ekonomis apabila akan dieksploitasi.

Di samping potensi tambang, potensi tanah dan lahan juga merupakan kekayaan yang cukup besar di kabupaten ini. Potensi tersebut telah lama diusahakan untuk pertanian dan perkebunan. Pertanian dan perkebunan merupakan salah satu renewable resouces di Kabupaten Langkat yang dapat terus dikembangkan dan dilestarikan. Perkebunan besar yang ada di Kabupaten Langkat meliputi perkebunan karet, perkebunan kelapa sawit, perkebunan coklat, perkebunan tebu, perkebunan kelapa dan perkebunan kopi. Namun di antara perkebunan-perkebunan tersebut yang terluas arealnya ternyata adalah perkebunan kelapa sawit. Hal ini nampaknya berkaitan dengan sejarah kepala sawit di Propinsi Sumatera Utara. Usia perkebunan kelapa sawit di propinsi ini sudah cukup tua, yaitu sejak masa penjajahan

Belanda dulu. Menurut sejarahnya pada akhir abad ke 19 pada waktu itu Belanda telah menguasai wilayah-wilayah di Sumatera Utara dan perkebunan-perkebunan besar mulai dibuka. Ada tiga perkebunan besar yang dibuka Belanda melalui NV Deli Bataviaasch Maatschappij membuka perkebunan tembakau, karet dan kelapa sawit (Profil Sumatera Utara, 1992). Apabila dibandingkan dengan areal perkebunan karet di Kabupaten Langkat (tahun 2002) luas arealnya hanya 36.837 hektar, sedangkan areal perkebunan kelapa sawit sudah mencapai 64.799 hektar (Dinas Perkebunan Kab. Langkat, 2002). Perkebunan coklat pada tahun yang sama hanya mencapai luas 5 933 hektar, areal tebu 4 921 hektar, kelapa 6 247 hektar dan kopi hanya 1.190 hektar. Perkebunan kelapa dan kopi masih merupakan perkebunan rakyat.

Areal perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Langkat dapat dibedakan dua, yaitu perkebunan rakyat dan perkebunan negara. Sebagian besar areal perkebunan tersebut merupakan perkebunan negara (PTPN). Luas areal perkebunan negara pada tahun 2002 mencapai 44.974 hektar, sedangkan luas areal perkebunan rakyat hanya seluas 19.825 hektar. Luas areal perkebunan rakyat tersebut termasuk areal PIR – BUN kelapa sawit.

3.4. Potensi Sumber Daya Manusia

Jumlah, pertumbuhan dan penyebaran penduduk

Berdasarkan hasil sensus penduduk 1980 – 2000, jumlah penduduk Propinsi Sumatera Utara adalah sebanyak 8.361. 000 orang (Sensus Penduduk 1980), meningkat menjadi 10.252.000 orang (Sensus Penduduk 1990), kemudian meningkat menjadi 11.642.000 orang (Sensus Penduduk 2000). Berdasarkan hasil sensus penduduk selama dua dekade tersebut tingkat pertumbuhan penduduk di Propinsi Sumatera Utara telah terjadi penurunan yaitu sebesar 2,06 persen (1980-1990) menjadi sebesar 1,32 persen (1990-2000). Kabupaten Langkat sebagai kabupaten yang menjadi wilayah penelitian, jumlah penduduk adalah sebanyak 701.380 orang (Sensus Penduduk 1980), dan sepuluh tahun kemudian meningkat menjadi 812. 229 orang (Sensus Penduduk 1990) dan meningkat lagi menjadi 902.986 orang (Sensus Penduduk 2000). Dengan demikian tingkat pertumbuhan penduduk di Kabupaten Langkat pada periode 1980–1990, sebesar 1,16 persen, kemudian pada periode 1990-2000 turun menjadi 1,11 persen. Angka tersebut menunjukkan suatu pertumbuhan relatif rendah dibanding dengan angka pertumbuhan penduduk tingkat propinsi.

Dari data yang tergambar pada Tabel 3.1 menunjukkan bahwa baik di tingkat propinsi maupun Kabupaten Langkat terjadi angka kelahiran maupun migran masuk cenderung rendah, hal tersebut dapat berpengaruh positif maupun negatif. Pengaruh positif adalah bila terjadi rendahnya tingkat kelahiran,

maka akan memberi dampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik karena tidak menanggung beban tingginya jumlah anggota keluarga. Akan tetapi pengaruh negatif apabila terjadi banyak penduduk usia produktif meninggalkan daerahnya, karena mencari pekerjaan, maka kondisi ini akan sangat merugikan daerah tersebut karena justru potensi sumber daya manusia akan sangat berkurang untuk membangun daerahnya.

Tabel 3.1 : Jumlah dan Tingkat Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Langkat dan Propinsi Sumatera Utara, Tahun 1980, 1990 dan 2000.

Daerah	Jumlah Penduduk				Tingkat Pertumbuhan Penduduk	
	1980	1990	2000	2003*	1980 - 1990	1990-2000
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
Kab. Langkat	701.380	812.229	902.986	940.570	1,16	1,11
Prop. Sumt. Utr	8.361.000	10.252.000	11.642.000		2,06	1,32

- Sumber : - BPS, Penduduk Indonesia : Hasil Sensus Penduduk 1990, Sumatera Utara Seri : S2.02
 - BPS, Penduduk Indonesia : Hasil Sensus Penduduk 2000, Sumatera Utara Seri : L2.2.2
 - BPS, Kab. Langkat Dalam Angka 1990 dan 2003*

Apabila dilihat dari tingkat persebaran penduduk, maka pada Tabel 3.2 menunjukkan bahwa terjadi tidak meratanya penduduk pada masing-masing kecamatan di Kabupaten Langkat. Sebagian besar kecamatan di Kabupaten Langkat mempunyai tingkat kepadatan di atas 200 orang per km², akan tetapi ada beberapa kecamatan yang mempunyai tingkat kepadatan penduduk yang relatif rendah di bawah rata-rata bahkan di bawah 100 orang per km². Kecamatan yang termasuk tingkat kepadatan penduduknya rendah adalah Kecamatan Bahorok, Batang Serangan, Sawit Seberang. Demikian pula kecamatan Besitang sendiri yang menjadi fokus penelitian, tingkat kepadatan penduduk sangat rendah yaitu hanya sebesar 69 orang per km². Tinggi rendahnya tingkat kepadatan penduduk pada masing-masing kecamatan tersebut disebabkan adanya perbedaan geografis pada wilayah kecamatan tersebut. Di samping itu, juga kecenderungan yang terjadi adalah kecamatan yang dekat dengan ibukota kabupaten atau ibukota propinsi akan cenderung mempunyai tingkat kepadatan penduduk yang lebih tinggi, karena tersedia sarana dan prasarana yang lebih lengkap. Hal ini sesuai dengan hukum "permintaan dan penawaran" tenaga kerja, di mana daerah kota dan sekitarnya mempunyai permintaan yang tinggi terhadap tenaga

kerja, sehingga akan menyebabkan penduduk berdatangan di wilayah tersebut.

Tabel 3. 2 : Penduduk Kecamatan Kabupaten Langkat, Menurut Jenis Kelamin dan Tingkat Kepadatan, 2002

Kecamatan	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	
	Absolut	Persen	Absolut	Persen	Absolut	Tkt. Kepadatan Orang/ km2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Bahorok	21.368	4,78	21.130	4,60	42.498	45
2. Salapian	25.403	5,68	24.904	5,42	50.307	107
3. Sei. Bingei	22.175	4,96	22.148	4,82	44.323	131
4. Kuala	19.841	4,44	20.014	4,35	39.855	205
5. Selesai	28.813	6,45	28.776	6,26	57.589	379
6. Binjai	17.868	4,00	17.671	3,85	35.539	717
7. Stabat	33.925	7,59	33.882	7,37	67.807	748
8. Wampu	19.622	4,39	18.677	4,06	38.299	198
9. Batang Serangan	16.875	3,78	16.527	3,60	33.402	36
10. Sawit Seberang	13.233	2,96	12.835	2,80	26.068	60
11. Padang Tualang	22.666	5,07	22.415	4,88	45.081	164
12. Hinai	24.283	5,46	23.782	5,20	48.065	421
13. Secanggih	34.456	7,70	33.749	7,35	68.205	274
14. Tanjung Pura	32.152	7,20	31.796	6,92	63.948	386
15. Gebang	22.666	5,07	21.778	4,74	44.444	273
16. Babalan	27.362	6,12	27.062	5,90	54.424	535
17. Sei. Lapan	25.393	5,68	24.871	5,41	50.264	164
18. Bradan Barat	10.147	2,27	9.749	2,12	19.896	216
19. Besitang	24.740	5,54	24.466	5,32	49.206	69
20. Pangkalan Susu	23.668	5,30	23.181	5,05	46.849	173
Jumlah	466.656	100,0	459.413	100,0	926.069	Rata-rata 148

Sumber : BPS, Langkat Dalam Angka 2002.

Struktur umur dan rasio jenis kelamin

Struktur umur penduduk dapat digunakan untuk mengetahui apakah di daerah tersebut masih termasuk struktur penduduk muda atau telah mencapai struktur penduduk dewasa atau tua. Struktur umur penduduk di Kabupaten Langkat tahun 2000 dapat diklasifikasikan struktur penduduk ke arah dewasa, sebab proporsi kelompok umur penduduk di bawah 15 tahun sebesar 38 persen dan 60 persen lebih telah berusia 15 tahun ke atas. Hal ini kemungkinan akibat penurunan tingkat kelahiran. Penurunan tersebut dapat digunakan sebagai salah satu indikator keberhasilan program keluarga berencana.

Dilihat dari rasio jenis kelamin penduduk di Kabupaten Langkat tahun 2002, secara umum sebesar 102, artinya di kabupaten tersebut setiap 100 orang perempuan ada 102 orang laki-laki. Rasio jenis kelamin yang lebih tinggi penduduk laki-lakinya ini biasanya terjadi di daerah-daerah yang migran masuknya cukup menonjol. Jumlah laki-laki yang lebih besar tersebut

disebabkan karena pengaruh adanya migran masuk yang umumnya lebih didominasi laki-laki, sehingga rasio jenis kelamin menjadi lebih banyak laki-laki dari pada perempuan. Untuk Kabupaten Langkat rasio yang lebih banyak penduduk laki-laki ini lebih didominasi pada kelompok penduduk usia produktif antara 30-64 tahun 102,3. Hal ini menunjukkan bahwa banyak migran masuk dari kelompok laki-laki ke kabupaten tersebut.

Khusus penduduk di Desa PIR-ADB rasio penduduk laki-laki terhadap perempuan adalah 96, artinya bahwa penduduk perempuan jauh lebih besar dari pada penduduk laki-laki. Kondisi tersebut secara demografis menunjukkan bahwa kemungkinan salah satu faktor adalah tingginya jumlah penduduk laki-laki yang meninggalkan desanya. Dalam kenyataannya banyak penduduk laki-laki usia produktif meninggalkan desanya untuk mendapat pengalaman baru, mencari kerja atau melakukan usaha perkebunan di daerah lain. Rasio penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan pada usia produktif tersebut sebesar 96, artinya tiap 100 orang perempuan usia produktif hanya ada 96 orang laki-laki. Sebagai contoh banyak terjadi penduduk Desa PIR-ADB meninggalkan desanya menuju Propinsi Riau, membuka lahan kelapa sawit. Hal semacam ini juga banyak dilakukan oleh penduduk di Propinsi Sumatera Utara yang mempunyai latar belakang pertanian kelapa sawit melakukan usaha perkelapasawitan di Propinsi Riau. Dengan demikian telah terjadi transfer of knowledge antara kedua wilayah tersebut.

Tabel 3.3. : Struktur Penduduk Kabupaten Langkat Menurut Umur dan Jenis Kelamin, 2002

Golongan Umur	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	
	Absolut	Persen	Absolut	Persen	Absolut	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0 - 4	54.664	11,71	53.670	11,68	108.334	11,70
5 - 9	61.615	13,20	57.896	12,60	119.511	12,90
10 - 14	62.587	13,41	59.923	13,04	122.510	13,23
15 - 19	56.520	12,11	53.746	11,70	110.266	11,90
20 - 24	40.851	8,75	44.922	9,78	85.773	9,26
25 - 29	34.446	7,38	42.417	9,23	76.863	8,30
30 - 34	30.191	6,47	28.775	6,26	58.966	6,37
35 - 39	29.649	6,35	28.568	6,22	58.217	6,29
40 - 44	26.814	5,74	25.093	5,46	51.907	5,60
45 - 49	22.263	4,77	19.561	4,26	41.824	4,52
50 - 54	14.752	3,16	13.721	3,00	28.473	3,07
55 - 59	12.477	2,67	11.886	2,59	24.363	2,63
60 - 64	7.564	1,62	7.248	1,58	14.812	1,60
65 +	12.263	2,63	11.987	2,61	24.250	2,62
Jumlah	466.656	100,0	459.413	100,0	926.069	100,0

Sumber : BPS, Langkat Dalam Angka 2002.

Jumlah penduduk usia kerja berdasarkan kelompok umur di suatu daerah, akan memberi arti penting dalam menentukan arah kebijakan ketenagakerjaan di daerah tersebut. Jumlah penduduk usia kerja di wilayah tersebut menggelembung pada kelompok umur 15 – 24 (21,0 persen) dan kelompok umur 25 – 34 (14,67 persen). Penduduk usia kerja pada golongan umur muda (15 – 34) di Kabupaten Langkat adalah sebesar 35,7 persen. Sedangkan Desa PIR-ADB Besitang sebagai daerah penelitian adalah sebesar 27,7 persen. Tingginya jumlah penduduk usia kerja pada kelompok usia tersebut, perlu mendapatkan perhatian tertentu dari pemerintah daerah, betapa pentingnya kebijakan ketenagakerjaan bagi kelompok usia muda di wilayah tersebut

Pendidikan penduduk

Tingkat pendidikan penduduk di Kabupaten Langkat usia 5 tahun ke atas, dapat dilihat pada Tabel 3.4. Tabel tersebut menunjukkan bahwa mayoritas penduduk usia 5 tahun keatas mempunyai latar belakang pendidikan tamat SD ke bawah, yaitu sebesar 67,5 persen. Demikian pula penduduk yang mempunyai tingkat pendidikan SD di Desa PIR-ADB jauh lebih banyak jumlahnya, yaitu sebesar 80,4 persen (Tabel 3.4). Sedangkan yang mempunyai pendidikan menengah di Kabupaten Langkat sebesar 31 persen dan di Desa PIR-ADB jauh lebih rendah yaitu sebesar 19,0 persen. Di kabupaten Langkat, mereka yang mempunyai pendidikan diploma ke atas sekitar 1,3 persen, sedangkan di Desa PIR-ADB hanya sebesar 0,60 persen. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa baik di Kabupaten Langkat dan di Desa PIR-ADB sebagian besar adalah kelompok penduduk usia kerja yang masih mempunyai pendidikan rendah.

Suatu kendala atau hambatan di Kabupaten Langkat maupun di Desa PIR-ADB adalah penduduk usia kerja baik yang mempunyai pendidikan SLTA ke atas baru sekitar 15 persen, dan kurang dari satu persen menamatkan perguruan tinggi. Rendahnya penduduk yang mempunyai pendidikan tinggi tersebut, merupakan hambatan dalam pengembangan otonomi daerah dan pengembangan ekonomi daerah. Khusus di Desa PIR-ADB Besitang yang merupakan daerah pedesaan, jenis pekerjaan seperti di plasma kelapa sawit, perdagangan dan angkutan nampak belum membutuhkan tenaga kerja dengan tingkat pendidikan menengah keatas. Namun apabila telah berkembang usaha industri dan jasa yang lebih luas lagi, maka diharapkan dapat menampung tenaga kerja dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi.

Tabel 3.4 : Pendidikan Tertinggi Ditamatkan Penduduk Usia 5 tahun ke atas Kabupaten Langkat dan Desa PIR-ADB, 2002

Pendidikan Tertinggi Ditamatkan	Penduduk Laki-laki Kabupaten Langkat		Penduduk Perempuan Kabupaten Langkat		Desa PIR-ADB Besitang 2002	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tidak/Belum Tamat SD	120.579	29,57	127.450	31,98	1.117	51,60
Tamat SD	145.045	35,57	151.417	38,00	625	28,80
SLTP	73.822	18,10	65.912	16,54	325	15,00
SLTA	62.543	15,33	48.562	12,18	85	04,00
Diploma I / II	1.467	0,36	1.547	0,39	7	00,32
Akademi/ Diploma III	1.207	0,30	1.291	0,32	-	-
Universitas	3.091	0,76	2.269	0,57	6	00,28
Jumlah	407.754	100,0	398.448	100,0	2.165	100,0

Sumber : - BPS, Sumatera Utara : Hasil Sensus Penduduk 2000
 - Potensi Desa PIR – ADB Besitang 2004

Migrasi penduduk

Perkembangan kependudukan di Kabupaten Langkat tidak lepas dari sejarah di daerah tersebut. Dalam perkembangannya, sebagian besar penduduk daerah tersebut adalah pendatang dari Jawa dan Cina serta wilayah sekitarnya seperti daerah Karo yang pada saat itu direkrut oleh pemerintah Belanda, sebagai buruh perkebunan dan buruh perusahaan. Hasil sensus penduduk 2000 menunjukkan bahwa penduduk yang berstatus sebagai migran seumur hidup di Kabupaten Langkat sebesar 10,6 persen, dengan perbandingan di kota sebesar 12,12 persen dan di desa sebesar 10,22 persen (Tabel 3.5). Demikian halnya dengan di Desa PIR-ADB, besarnya migran masuk sebesar 15,04 persen, di sini posisinya lebih besar dari pada pedesaan di Kabupaten Langkat.

Dari angka perbandingan tersebut menunjukkan bahwa mayoritas penduduk migran masuk di Kabupaten Langkat tidak terjadi perbedaan yang nyata antara desa dan kota. Gambaran tersebut menunjukkan bahwa Langkat bukan merupakan daerah yang terisolasi. Nampak bahwa dalam dua puluh tahun terakhir, semenjak perkebunan kelapa sawit menjadi idola di wilayah tersebut. Kesempatan usaha lebih banyak pada subsektor perkebunan, sektor perdagangan dan jasa lainnya. Faktor lain adalah terbukanya kesempatan kerja baru, yang ditunjang dengan sarana transportasi di wilayah tersebut. Hal ini dapat diungkapkan kasus yang terjadi di Desa PIR – ADB, data menunjukkan bahwa pada tahun 2003 telah terjadi migran masuk (pendatang)

sebanyak 399 orang baik yang datang secara sukarela maupun terpaksa (pengungsi). Para pendatang sukarela adalah mereka yang mencari pekerjaan di perkebunan plasma, sebagai pekerja harian lepas. Sedangkan yang datang secara terpaksa adalah pengungsi Aceh yang terpaksa meninggalkan wilayah Aceh karena konflik di wilayah tersebut, akibat sedang dilakukan operasi militer, untuk memerangi para pemberontak. Sebagian besar para pengungsi tersebut adalah para transmigran dari Jawa, yang sudah menempati wilayah Aceh selama puluhan tahun.

Tabel 3.5 : Status Migrasi Seumur Hidup di Kabupaten Langkat Menurut Desa/ Kota Tahun 2000 dan Desa PIR-ADB Besitang Tahun 2002

Desa/ Kota	Non- Migran	Migran Masuk	Jumlah	Persen Migran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
- Kota	167.649	23.129	190.778	12,12
- Desa	639.428	72.780	712.208	10,22
Jumlah Kab. Langkat	807.077	95.909	902.986	10,62
Desa PIR-ADB	2255	399	2.654	15,04

Sumber : - BPS, Sumatera Utara: Hasil Sensus Penduduk 2000
 - Potensi Desa PIR – ADB, Besitang, 2004

Jumlah dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Angkatan kerja yang dimaksud dalam tulisan ini adalah penduduk yang berumur 15-64 tahun, yang kegiatan utamanya dalam seminggu terakhir bekerja dan sedang mencari pekerjaan. Sedangkan penduduk yang beumur 15- 64 tahun yang kegiatan utamanya dalam seminggu terakhir tidak bekerja dan tidak mencari pekerjaan disebut bukan angkatan kerja. Kegiatan utama mereka adalah sekolah, mengurus rumah tangga sendiri atau lainnya. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan rasio antara kelompok penduduk umur 15-64 tahun yang bekerja dan yang mencari kerja dengan seluruh kelompok penduduk usia 15-64 tahun. TPAK biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain, umur, jenis kelamin dan kondisi sosial ekonomi (pendidikan, pendapatan, lokasi tempat tinggal).

Pada Tabel 3.6 menunjukkan bahwa TPAK di Kabupaten Langkat dapat dibedakan menurut lokasi desa kota dan jenis kelamin. Kecenderungan pada umumnya bahwa TPAK di desa lebih tinggi dari pada di kota, di desa sebesar 73,6 persen dan di kota sebesar 59,3 persen. Demikian pula TPAK laki-laki sebesar 83,2 persen lebih tinggi daripada perempuan yang hanya sebesar 57,7 persen. Keadaan ini tidak jauh berbeda dengan keadaan secara umum di Propinsi Sumatera Utara. TPAK di desa sebesar 75,8 persen, sedangkan di

kota sebesar 60,2 persen. TPAK laki-laki sebesar 80,3 persen sedangkan TPAK perempuan sebesar 57,7 persen. TPAK laki-laki jauh lebih besar dari pada perempuan. Terjadinya perbedaan TPAK antara laki-laki dan perempuan adalah karena peluang kerja yang ada lebih banyak untuk laki-laki dari pada perempuan. Alasan lain laki-laki bertanggung jawab mencari nafkah jauh lebih besar dari pada perempuan.

Bagaimana angka beban tanggungan penduduk daerah penelitian? Angka beban tanggungan adalah rasio antara penduduk di bawah usia kerja (< 14 tahun) dan penduduk di atas usia kerja (lansia) dengan penduduk usia kerja (15 – 64 tahun). Penduduk usia kerja merupakan kelompok usia yang lebih produktif dibanding dengan kedua kelompok umur di bawah maupun di atas usia tersebut. Makin besar kelompok usia kerja berarti beban tanggungan makin berkurang. Dengan kata lain, pemenuhan kebutuhan penduduk sangat tergantung kepada hasil kegiatan penduduk usia produktif. Angka beban tanggungan di Kabupaten Langkat adalah sebesar 67,9 persen. Di sini menunjukkan bahwa angka beban tanggungan di Kabupaten Langkat relatif tinggi lebih dari 50 persen, artinya bahwa setiap seratus orang penduduk usia produktif di Kabupaten Langkat harus menanggung 67,9 orang penduduk usia tidak produktif. Ini kemungkinan disebabkan penduduk usia muda masih tinggi, sedangkan kelompok lansia telah meningkat.

Tabel 3.6 : Angkatan kerja Kabupaten Langkat menurut Daerah Tingkat II, Pedesaan/Perkotaan dan Jenis Kelamin, 2000

Kab/Kota	Angkatan Kerja			Bukan Angkatan Kerja (BAK)			Jumlah Usia Produktif	TPA K (%)	Tingkat Penggur Terbuka (%)
	Bekerja	Cari Kerja	Jumlah Angkatan Kerja	Sekolah	Lain Nya	Jumlah BAK			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Kab. Langkat									
1 Laki	45.844	1.322	47.166	2.475	4.182	53.547	168.501	76,3	8,0
2 Prp	22.314	2.984	25.298	7.975	10.489	35.787	114.317	60,2	14,8
Jumlah	67.858	4.306	72.164	10.450	14.671	89.334	282.818	68,3	11,0
Perkotaan									
1 Laki	37.785	1.278	39.063	1.223	1.475	40.538	127.272	81,2	5,4
2 Prp	14.499	2.630	17.129	2.352	3.014	20.143	59.139	62,5	2,3
Jumlah	52.284	3.908	56.192	3.575	4.489	60.681	186.411	73,8	6,9
Perdesaan									
1 Laki	8.059	64	8.123	1.252	2.707	10.830	31.229	65,2	6,0
2 Prp	7.815	14.650	12.465	5.623	7.474	19.939	59.177	57,7	8,5
Jumlah	15.874	14.714	30.588	6.875	10.181	30.769	90.406	70,8	7,3
Prop. Sumt. Utang									
Perkotaan									
1 Laki	1162.022	89.423	1.251.445	247.921	137.363	385.284	1.636.807	76,5	7,2
2 Prp	662.095	90.543	752.638	253.969	685.050	939.019	1.691.807	44,5	12,0
Jumlah	1824.117	179.966	2.004.083	501.890	822.413	1.324.303	3.328.614	60,2	8,9
Perdesaan									
1 Laki	1597.479	91.216	1.688.695	220.714	116.278	336.992	2.025.726	83,4	5,4
2 Prp	1352.077	72.934	1.425.011	215.547	439.583	655.130	2.080.234	68,5	5,1
Jumlah	2949.556	164.150	3.113.706	436.261	555.861	992.122	4.105.960	75,8	5,3
Jumlah K+D									
1 Laki	2759.501	180.639	2.940.140	468.635	253.641	722.276	3.662.533	80,3	6,1
2 Prp	2014.172	163.477	2.177.649	469.516	1124.633	1594.149	3.772.041	57,7	7,5
Jumlah	4773.673	344.116	5.117.789	938.151	1378.274	2316.425	7.434.574	68,8	6,7

Sumber : BPS, Bangka Belitung : Hasil Sensus Penduduk 2000.

Distribusi penduduk menurut lapangan kerja

Tabel 3.7 menunjukkan bahwa penduduk yang bekerja menurut lapangan pekerjaan, terlihat bahwa penduduk yang bekerja di sektor pertanian masih tetap mendominasi penyerapan tenaga kerja baik di tingkat propinsi maupun di Kabupaten Langkat, yaitu sebesar 52,3 persen (Sumatera Utara) dan 60,15 persen (Langkat). Kebanyakan penduduk yang bekerja di sektor pertanian tersebut ada di subsektor tanaman pangan dan perkebunan, yaitu sebesar 47,1 persen (Langkat) dan 44,6 persen (Sumatera Utara). Sedangkan sektor jasa menduduki urutan kedua, yaitu sebesar 11,5 persen (Langkat) dan 17,5 persen (Sumatera Utara). Kondisi tersebut menggambarkan bahwa sektor jasa (pemerintah dan swasta) menjadi pilihan kedua bagi penduduk setempat.

Walaupun begitu, sektor lainnya atau kemungkinan termasuk proporsinya cukup tinggi baik di Langkat (12,6 persen) maupun di Sumatera Utara (12 persen). Keadaan ini menunjukkan bahwa sektor informal masih menjadi tumpuan harapan bagi penduduk untuk mendapatkan penghasilan. Usaha di sektor informal biasanya melibatkan anggota rumah tangga. Ini disebabkan jenis usaha di sektor tersebut bersifat tradisional.

Tabel 3.7 : Lapangan Pekerjaan Penduduk Kab. Langkat dan Propinsi Sumatera Utara, 2000

Lapangan Usaha	Langkat		Sumatera Utara	
	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
- Pertanian	234.185	60,15	2.498.486	52,37
Pert. t. pangan	(134.899)	(35,16)	(1.664.026)	(34,88)
Perkebunan	(46.569)	(11,96)	(462.905)	(9,70)
Perikanan	(15.816)	(4,01)	(104.978)	(2,20)
Peternakan	(2.363)	(0,60)	(21.887)	(0,46)
Pertanian lainnya	(32.739)	(8,41)	(244.690)	(5,13)
- Industri Olahan	15.087	3,90	249.330	5,23
- Perdagangan	33.025	8,63	476.771	9,99
- Jasa	35.112	9,05	833.174	17,46
- Angkutan	10.115	2,61	137.950	2,89
- Lainnya	49.290	12,64	574.577	12,04
Jumlah	389.311	100,0	4.770.288	100,0

Sumber : BPS, Sumatera Utara : Hasil Sensus Penduduk 2000

Apabila dibedakan tenaga kerja yang bekerja menurut status pekerjaan (Tabel 3.8) persentase terbanyak adalah tenaga kerja yang berstatus buruh dan karyawan. Kemungkinan mereka para tenaga kerja yang bekerja di sektor formal di perkotaan dan subsektor perkebunan. Untuk tenaga kerja berstatus

pekerjaan tersebut, Langkat menunjukkan persentase sebesar 27,6 persen, sedangkan di Propinsi Sumatera Utara sebesar 33,7 persen. Tenaga kerja yang berstatus berusaha dibantu buruh tidak tetap banyak terdapat di Kabupaten Langkat sebesar 27,7 persen. Mereka kemungkinan banyak yang berusaha di pertanian. Status pekerjaan yang masih cukup menonjol adalah pekerja tidak dibayar atau pekerja keluarga, masing – masing daerah menunjukkan angka yang relatif cukup tinggi, di Langkat sebesar 18 persen dan di Propinsi Sumatera Utara menunjukkan angka yang jauh lebih tinggi sebesar 22,9 persen. Tenaga kerja yang berstatus pekerja keluarga tersebut dapat diklasifikasikan sebagai penganggur terselubung, karena waktu dan jam kerjanya tidak jelas serta tidak mendapatkan upah. Mereka kemungkinan para tenaga kerja muda yang berpendidikan SLTA ke atas, sambil mencari pekerjaan yang sesuai dengan tingkat pendidikannya, mereka membantu orang tuanya atau keluarganya bekerja di usaha rumah tangga tanpa menerima upah. Namun mereka masih makan, minum dan tinggal bersama keluarga atau orang tua.

Tabel 3.8 : Status Pekerjaan Utama Penduduk Kab. Langkat dan Prop. Sumatera Utara, 2000

Status Pekerjaan Utama	Langkat		Sumatera Utara	
	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Berusaha sendiri	98.690	25,35	1.006.531	21,10
Berusaha dibantu buruh tak tetap	107.800	27,69	985.018	20,67
Berusaha dengan buruh tetap	4.582	1,18	77.079	1,62
Buruh/Karyawan	107.560	27,63	1.608.060	33,71
Pekerja tak dibayar	70.679	18,16	1.093.600	22,95
Jumlah	389.311	100,0	4.770.288	100,0

Sumber : Sumatera Utara : Hasil Sensus Penduduk 2000.

3.5 Potensi Sumber Daya Ekonomi

Wilayah Kabupaten Langkat mempunyai letak yang cukup strategis dalam pengembangan wilayah Propinsi Sumatera Utara. Lokasi wilayah tersebut, dikenal sebagai jalur yang menghubungkan pusat-pusat perkembangan wilayah: Deli Serdang, Kota Medan, dan kota kabupaten di sekitarnya.

Demikian pula letak wilayah tersebut sebagai penghubung dua propinsi, yaitu Sumatera Utara dengan Propinsi Nangroe Aceh Darusalam. Tentu saja letak ini sangat menguntungkan bagi perencanaan kegiatan ekonomi terutama dalam hal distribusi hasil-hasil produksi serta pemasarannya. Komoditas yang menonjol untuk bisa dikembangkan adalah dari hasil perkebunan, antara lain hasil tanaman kelapa sawit dan karet. Tanaman tersebut, paling banyak diusahakan oleh rakyat dan juga diusahakan oleh perusahaan besar (PTPN) dan perusahaan swasta dalam nasional maupun asing. Setelah dua komoditas tersebut, kemudian jenis komoditas lain seperti kakao, kelapa dan kopi. Kelima jenis komoditas tersebut telah memberi kontribusi bagi devisa di daerah ini.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan di Kabupaten Langkat tahun 2002 telah mencapai sebesar Rp 1.991.363.190.000 (BPS. PDRB Prop. Sumatera Utara 2003). Kontribusi yang terbesar terhadap PDRB tersebut adalah sektor pertanian, dapat mencapai sekitar 61,2 persen, dengan kontribusi terbesar dari subsektor perkebunan sebesar 24,3 persen dan subsektor tanaman pangan sebesar 15,45 persen. Sedangkan sektor industri pengolahan hanya menduduki urutan ke dua, yaitu sebesar 10,9 persen. Kontribusi sektor industri pengolahan dan pertambangan cenderung menurun, sehubungan dengan makin menurunnya produk minyak dan gas serta kelesuan industri besar dan sedang pada tahun 1998 sampai sekarang. Sedangkan kecenderungan kontribusi masing-masing sektor tersebut, ternyata sektor pertanian cenderung mengalami kenaikan selama 5 tahun terakhir (1998-2002). Kontribusi sektor pertanian yang paling menonjol adalah subsektor perkebunan. Oleh karena itu, potensi perkebunan di kabupaten ini masih cukup besar dan masih bisa dipertahankan serta terus dikembangkan untuk meningkatkan PDRB kabupaten. Menurut Dinas Perkebunan Kabupaten Langkat, daerah ini masih terus mengharapkan adanya investor masuk. Masuknya investor dari luar di samping akan meningkatkan pendapatan daerah, juga sekaligus memberikan kesempatan kerja bagi penduduk Langkat.

Tabel 3.9 : Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Langkat,
(Atas Dasar Harga Konstan), 2002

Tahun	1998 (%)	2002 (%)
(1)	(2)	(3)
1. Pertanian	59,6	61,2
a. Bahan makanan	(13,7)	(15,5)
b. Perkebunan	(26,1)	(24,3)
c. Peternakan	(1,6)	(2,4)
d. Kehutanan	(7,2)	(7,4)
e. Perikanan	(10,9)	(12,0)
2. Pertambangan & Penggalian		
3. Industri pengolahan	7,8	6,0
4. Listrik, gas & air bersih	12,2	10,9
5. Bangunan	0,6	0,8
6. Perdag, hotel & restoran	1,5	1,6
7. Angkutan & komunikasi	8,1	9,1
8. Keu, persewaan & Jasa pers	2,7	2,6
9. Jasa (Pemerintahan&swasta)	2,6	2,9
	4,7	4,7
Jumlah (Absolut Dalam Jutaan RP)	100,0 (1.868.372,83)	100,0 (1.991.363,19)

Sumber : BPS, PDRB Propinsi Sumatera Utara Menurut Kabupaten/Kota 1997-2002

3.6. Sarana dan Prasarana

Kegiatan perkebunan memerlukan sarana dan prasarana perhubungan terutama berupa prasarana jalan yang baik serta kendaraan angkutan yang memadai mengangkut hasil perkebunan. Jarak antara ibukota Kabupaten Langkat dan ibukota Propinsi Sumatera Utara sepanjang 70 km. Sarana transportasi antara Kota Stabat (ibukota Kabupaten Langkat) dengan Kota Medan (ibukota propinsi) tersebut cukup memadai dan relatif lancar. Lain halnya sarana perhubungan dari perkotaan ke wilayah perkebunan walaupun masih dapat ditempuh dengan sarana transportasi kendaraan umum, akan tetapi jarak yang relatif jauh, serta sebagian kondisi jalan rusak, sehingga harus menggunakan kendaraan besar. Secara keseluruhan, panjang ruas jalan di Kabupaten Langkat adalah 1.325, 25 km, yang terdiri dari jalan beraspal

517,75 km; jalan kerikil 375,25 km; jalan berbatu 141,80 km; dan berupa jalan tanah 290,45 km. Sarana angkutan barang yang sering digunakan berupa kendaraan truk angkut. Kendaraan-kendaraan tersebut sering memuat barang maupun penumpang, kadang melebihi kapasitas. Kegiatan semacam itu yang cenderung merusak prasarana jalan. Keadaan tersebut yang sering dikeluhkan oleh para warga masyarakat desa.

Kabupaten Langkat merupakan wilayah penghubung antara Propinsi Sumatera Utara dengan Propinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD). Sedangkan Kecamatan Besitang yang menjadi fokus penelitian, merupakan salah satu kecamatan yang berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur. Dengan demikian sarana lalu lintas antara dua propinsi, Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Sumatera Utara dihubungkan dengan jalur darat berupa kendaraan umum dan jalur kereta api yang sudah dirintis sejak zaman Belanda. Kedua jalur transportasi tersebut hingga kini masih berfungsi dengan baik. Akan tetapi sarana transportasi kereta api, pada saat ini perlu mendapat perhatian untuk perbaikan baik jalur keretanya maupun gerbong angkutannya, sehingga dapat dipergunakan dengan nyaman. Secara umum sarana ekonomi di Kabupaten Langkat cukup memadai, seperti beberapa unit Bank, dan lembaga keuangan lainnya. Demikian juga beberapa sosial, seperti sarana ibadah cukup memadai, bahkan ada salah satu masjid yang dibangun sejak dua abad yang lalu, Bangunan masjid tersebut tetap berdiri kokoh hingga kini. Agar tetap lestari, masjid tersebut dijadikan cagar budaya negara.

Fasilitas desa PIR ADB Besitang yang tersedia cukup memadai. Fasilitas tersebut antara lain sarana kesehatan berupa Puskesmas Pembantu dan lapangan olah raga (voli, bulu tangkis, sepakbola). Sarana sosial lain berupa masjid dan gereja, untuk para jemaah petani plasma. Sarana pendidikan cukup memadai, berupa gedung sekolah bagi murid taman kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD) dan SMP. Fasilitas ekonomi berupa lembaga bank daerah, lembaga KUD pengelola PIR ADB, pertokoan dan Wartel. Sarana listrik sangat membantu bagi perekonomian di desa tersebut. Pasar desa yang dibuka setiap dua minggu sekali, yaitu pada bulan gajian para karyawan KUD/pekerja plasma dan pada saat pembagian hasil penjualan kelapa sawit bagi para petani peserta plasma.

Jarak Desa PIR-ADB ke ibukota kecamatan (Besitang) sekitar 17 km atau ditempuh dalam 1 jam perjalanan dengan kendaraan umum. Dari Desa PIR-ADB ke ibukota kabupaten (Stabat) sekitar 65 km atau ditempuh dalam 1 jam perjalanan dengan kendaraan umum dan ke ibukota propinsi (Medan) sekitar 165 km atau ditempuh selama 3 jam. Alternatif kendaraan umum cukup banyak dan cukup lancar, namun kondisi fisik jalan dari kota kecamatan sampai ke desa dalam kondisi rusak dan ada beberapa jembatan yang masih dalam perbaikan.

Dengan tersedianya sarana dan prasarana di Desa PIR ADB, sangat mendukung kehidupan ekonomi dan sosial bagi masyarakat setempat. Oleh karena itu, dengan adanya usaha PIR – ADB akan mempunyai dampak positif terhadap perkembangan perekonomian di desa bahkan desa-desa lokal di sekelilingnya. Kegiatan ekonomi di Desa PIR-ADB tersebut diharapkan mempunyai efek eksternalitas positif akibat dari multiplier effect yang timbul dari perkembangan kegiatan di daerah tersebut.

3.7. Penutup

Sejarah tentang kelapa sawit di Kabupaten Langkat dan Sumatera Utara pada umumnya sudah cukup lama, yaitu sejak zaman Belanda. Pemerintah kolonial Belanda memilih daerah Sumatera Utara sebagai lokasi perkebunan kelapa sawit karena daerah ini memang sangat cocok untuk usaha perkebunan kelapa sawit. Iklimnya, topografi wilayahnya, tata air, jenis tanah dan kesuburan tanahnya cocok untuk budidaya tanaman tersebut. Kondisi alam yang kondusif untuk perkebunan kelapa sawit tersebut telah memungkinkan berlangsungnya usaha perkebunan kelapa sawit sejak zaman kolonial Belanda sampai kemerdekaan, banyak perkebunan negara maupun swasta serta perkebunan rakyat yang mengusahakan perkebunan di daerah ini.

Berkembangnya usaha-usaha perkebunan kelapa sawit baik dari perkebunan negara, swasta dan rakyat tersebut memerlukan lahan-lahan yang potensial untuk perkebunan. Besarnya kebutuhan akan lahan untuk perkebunan kelapa sawit tersebut telah mengikatnya cadangan untuk lahan usaha perkebunan khususnya kelapa sawit semakin terbatas. Ada beberapa perusahaan besar (negara dan swasta) beberapa tahun terakhir telah merambah usahanya ke Indonesia Timur (Papua dan Sulawesi), karena sudah tidak mungkin mengembangkan lahan di wilayah Sumatera Utara, termasuk di Kabupaten Langkat.

Bagi perkebunan rakyat mengalami dilema untuk memperluas lahan perkebunan untuk masa depan keluarganya. Hal tersebut akan menjadi masalah di masa mendatang, apabila sistem waris diterapkan di lahan plasma dengan membagi-bagikan kepada beberapa anak petani peserta PIR. Apabila hal ini terjadi akan muncul adanya fragmentasi lahan plasma, pengelolaan lahan menjadi tidak efisien dan produktivitas akan menurun. Pemiskinan sebagai petani gurem (petani lahan sempit) seperti yang terjadi di Jawa akan menular ke daerah ini. Selama ini sebagian mereka ada yang telah mulai merambah daerah hutan lindung, seperti areal Taman Nasional Gunung Leuser. Sebagian yang ada yang menggeser lahan perkebunan karet, yaitu dengan mengganti tanaman karet yang sudah tidak produktif menjadi tanaman kelapa sawit. Di antara pekebun kelapa sawit rakyat tersebut ada

juga yang telah mulai merambah dengan membeli lahan ke propinsi lain, seperti Riau.

Usaha perkebunan kelapa sawit saat ini terutama bagi perkebunan besar tinggal mempertahankan lahan tanaman kelapa sawit yang ada, dengan replanting bagi tanaman yang sudah tidak produktif lagi dan meningkatkan produktivitas dengan cara pemeliharaan, pemupukan yang lebih baik dan penggunaan bibit baru yang lebih unggul.

Apabila dilihat dari persebaran penduduk, terjadi ketidakmeratanya penduduk pada masing-masing kecamatan di Kabupaten Langkat. Sebagian besar Kecamatan di Kabupaten Langkat mempunyai tingkat kepadatan di atas 200 orang per km², akan tetapi ada beberapa kecamatan yang mempunyai tingkat kepadatan penduduk yang relatif rendah di bawah rata-rata bahkan di bawah 100 orang per km². Kecamatan yang termasuk tingkat kepadatan penduduknya rendah adalah, Kecamatan Bahorok, Batang Serangan, Sawit Seberang. Demikian pula Kecamatan Besitang sendiri yang menjadi fokus penelitian, tingkat kepadatan penduduk sangat rendah yaitu hanya sebesar 69 orang per km². Tinggi rendahnya tingkat kepadatan penduduk pada masing - masing kecamatan tersebut disebabkan adanya perbedaan geografis pada wilayah kecamatan tersebut. Di samping itu juga kecenderungan yang terjadi adalah kecamatan yang dekat dengan ibukota kabupaten dan ibukota propinsi akan cenderung mempunyai tingkat kepadatan penduduk yang lebih tinggi, karena tersedia sarana dan prasarana yang lebih lengkap.

Khusus penduduk di Desa PIR-ADB rasio penduduk laki-laki dan perempuan adalah 96, artinya bahwa penduduk perempuan jauh lebih besar dari pada penduduk laki-laki. Kondisi tersebut secara demografis menunjukkan bahwa kemungkinan salah satu faktor adalah tingginya jumlah penduduk laki-laki untuk meninggalkan desanya. Dalam kenyataannya banyak penduduk laki-laki usia produktif (26-35) meninggalkan desanya untuk mendapat pengalaman baru, mencari kerja atau melakukan usaha perkebunan di daerah lain. Ada beberapa penduduk desa PIR-ADB meninggalkan desanya menuju Propinsi Riau, dengan membuka lahan kelapa sawit. Hal semacam ini juga banyak dilakukan oleh penduduk di Propinsi Sumatera Utara pada umumnya yang mempunyai latar belakang petani perkebunan kelapa sawit di Propinsi Riau.

Wilayah Kabupaten Langkat mempunyai posisi yang cukup strategis dalam pengembangan wilayah Propinsi Sumatera Utara, yang dikenal sebagai jalur yang menghubungkan pusat-pusat perkembangan wilayah : Deli Serdang, Kota Medan, dan kota kabupaten di sekitarnya. Demikian pula posisi wilayah tersebut sebagai penghubung dua propinsi, yaitu Sumatera Utara dengan Propinsi Nangroe Aceh Darussalam. Tentu saja posisi ini sangat menguntungkan bagi perencanaan kegiatan ekonomi terutama dalam hal

distribusi hasil-hasil produksi serta pemasarannya. Komoditas yang menonjol untuk bisa dikembangkan adalah dari hasil perkebunan, antara lain tanaman kelapa sawit dan karet adalah tanaman yang paling banyak diusahakan oleh rakyat dan juga diusahakan oleh perusahaan besar (PTPN) dan perusahaan swasta nasional maupun asing. Setelah dua komoditas, jenis komoditas lain adalah kakao, kelapa dan kopi. Kelima komoditas tersebut memberi kontribusi bagi devisa di wilayah tersebut.

Dengan tersedianya sarana dan prasarana di Desa PIR ADB, sangat mendukung kehidupan ekonomi dan sosial bagi masyarakat setempat. Adanya usaha PIR – ADB diharapkan mempunyai dampak positif terhadap perkembangan di desa tersebut serta desa sekelilingnya. Kegiatan ekonomi di Desa PIR-ADB tersebut diharapkan mempunyai multiplier effect terhadap munculnya kegiatan di daerah tersebut.

**DINAMIKA PERUSAHAAN INTI RAKYAT (PIR)-
PERKEBUNAN KELAPA SAWIT****4.1. Pengantar**

Pertumbuhan perkebunan kelapa sawit di Sumatera Utara sangat pesat, sesuai dengan kondisi alam setempat, dinamika sumber daya ekonomi dan sumber daya manusia yang sedang tumbuh di daerah tersebut. Oleh sebab itu, dalam memasuki abad 21 produksi CPO yang bersumber pada wilayah perkebunan plasma (PIR) diharapkan dapat mendominasi CPO di Indonesia. Harapan ini, sejalan dengan tujuan pola PIR pada pembangunan wilayah, yaitu :

1. Pembukaan Daerah Remote;
2. Pertumbuhan Ekonomi;
3. Kependudukan dan Penyerapan Tenaga Kerja;
4. Kelembagaan Ekonomi; dan
5. Pengembangan Media Teknologi.

Oleh sebab itu, analisis dalam tulisan ini mendasarkan pada perkembangan serta dinamika perkebunan kelapa sawit yang ada di Sumatera Utara, khususnya di Desa PIR – ADB Besitang, Langkat, Sumatera Utara. Dalam analisis tersebut, akan membahas sejarah perkembangan perkebunan PIR kelapa sawit serta aspek lain seperti kebijakan perkebunan kelapa sawit dan iklim investasi, pengelolaan perkebunan pola PIR, dan peranan lembaga sosial ekonomi masyarakat di lingkungan perkebunan tersebut.

4.2. Sejarah Perkembangan Perkebunan Kelapa Sawit

Perkembangan kelapa sawit di Indonesia dimulai sejak zaman penjajahan Belanda tahun 1848. Hasil kajian Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Medan menyebutkan bahwa, pada awal perkembangan kelapa sawit masih berupa benih, yang lebih dahulu dikembangkan di Kebun Raya Bogor. Menurut Guritno P., dkk (2003) sepuluh tahun kemudian, yaitu pada tahun 1858, 146 benih dari kebun Raya Bogor didistribusikan ke Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Nusa Tenggara. Pada tahun 1875 percobaan pengembangan didirikan di Deli - Sumatera Utara, tiga tahun kemudian tepatnya tahun 1878 pusat pengembangannya baru ditempatkan di Bogor. Perkebunan kelapa sawit komersial yang pertama kali dibuka di Pulau Raja (Asahan) dan Sungai Liput (Aceh) pada tahun 1911. Kemudian pada tahun 1916 didirikan lembaga penelitian tanaman perkebunan kelapa

sawit di Kota Medan oleh asosiasi perusahaan perkebunan di Sumatera Timur atau Asian Vegetable Oil and Oil Seeds (AVOS). Untuk pengolahan hasil perkebunan tersebut, pada tahun 1922 oleh asosiasi yang sama dibangun pabrik kelapa sawit pertama di Tanah Itam Ulu, Sumatera Utara. Hingga sekarang lembaga penelitian tanaman perkebunan kelapa sawit tersebut, masih berperan besar terhadap perkembangan perkebunan kelapa sawit di Sumatera Utara maupun di Indonesia pada umumnya, yang dikenal dengan nama Pusat Penelitian Kelapa Sawit dan tetap berpusat di Kota Medan. Berdasarkan sejarah perkembangan tersebut, telah menunjukkan bahwa Sumatera Utara merupakan embrio perkebunan kelapa sawit di Indonesia.

Sebelum tahun 1980 perkebunan kelapa sawit hanya diusahakan oleh perkebunan besar milik BUMN dan Swasta Nasional. Melalui konsep pembangunan perkebunan pola Perusahaan Inti Rakyat (PIR), pada tahun 1977 pola PIR pertama diintrodusir di Tebenan-Sumatera Selatan dan Alue Merah-Aceh melalui Nucleus Estate Smallholder (NES), proyek tersebut mendapat pinjaman dari Bank Dunia. Pembangunan kelapa sawit melalui pola PIR dari tahun 1980 terus berkembang dan meningkat. Pada awalnya pola PIR hanya ditangani oleh PTPN, maka sejak keluarnya Inpres No. 1 Tahun 1986, para pengusaha swasta sebagai inti telah turut berperan, sehingga porsi perkebunan rakyat semakin penting artinya bagi perkembangan kelapa sawit khususnya dan perkebunan pada umumnya (Sitorus, 1995). Propinsi Sumatera Utara merupakan salah satu wilayah pengembangan PIR kelapa sawit selama kurun waktu 1980 hingga sekarang. Pada awal tahun 1980 luas areal yang telah dikembangkan adalah 41,748 hektar, yang terdiri dari 27.141 hektar PIR-BUN dan 14.607 hektar PIR-Trans. Perkembangan areal perkebunan rakyat sangat pesat dibanding PTPN dan perkebunan swasta. Kondisi ini sangat menguntungkan bagi keberhasilan upaya PTPN dalam pengembangan kelapa sawit di berbagai daerah, sehingga mendorong pihak swasta untuk berpartisipasi dalam pembangunan PIR.

Wilayah pengembangan kelapa sawit semakin berkembang sejalan dengan semakin meningkatnya minat dari pengusaha dan petani. Kalau pada awalnya dimulai dengan PIR lokal di Sumatera Utara pada tahun 1980, kemudian telah berkembang meliputi paling sedikit di 14 propinsi di Indonesia. Penyebaran lokasi bertambah terus meliputi PIR – BUN dan PIR – Trans, terutama telah merambah di Indonesia Timur sejak tahun 1989-1994 atau Pelita VI (Sitorus, 1995). Pembangunan pola PIR telah mendorong peningkatan produksi kelapa sawit di Indonesia, sehingga diharapkan konsep PIR dapat dilaksanakan sebagai salah satu model pembangunan dapat mendorong pertumbuhan kelapa sawit dengan cepat.

Perkembangan perkebunan Kelapa Sawit

Perkembangan perkebunan di Sumatera Utara dapat diamati selama lima tahun terakhir (Tabel 4.1 dan 4.2). Selama kurun waktu tersebut telah terjadi dinamika komoditas kelapa sawit sangat pesat perkembangannya dibanding dengan jenis komoditas yang lain. Karet pernah menjadi komoditas unggulan pada tahun 1980 – 1990. Namun pada perkembangan selanjutnya karet telah tergeser oleh peran kelapa sawit sebagai produk unggulan yang diandalkan pada saat ini.

Perkembangan luas lahan perkebunan di Sumatera Utara dapat dilihat pada Tabel 4.1. Tabel tersebut menunjukkan bahwa subsektor perkebunan di Sumatera Utara utamanya kelapa sawit menjadi tumpuhan harapan bagi sebagian besar penduduk wilayah tersebut, sehingga mempunyai peranan dalam kehidupan sosial maupun ekonomi.

Tabel 4.1. Perkembangan Luas Lahan Perkebunan Sumatera Utara, 1998-2002

No	Uraian/ Komoditi	Luas Lahan Perkebunan (Ha)					Pertumb / Thn (%)
		1998	1999	2000	2001	2002	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I	Perkebunan Besar Swasta						
1	Karet	98.520	93.791	92.519,95	92.319	92.319	-1,59
2	K. Sawit	303.935	306.369	308.935,95	317.398	319.630	1,27
3	Lain-lain	14.612	13.546	14.695,58	13.602	13.602	3,38
	Jumlah I	417.037	413.751	416.151,48	423.319	425.551	0,51
II	Perkebunan Negara						
1	Karet	61.249	62.894	62.829	62.164	62.164	0,38
2	K. Sawit	257.39	268.711	269.743	270.685	277.514	1,88
3	Lain-lain	49.936	50.890	48.649	48.798	48.856	-1,46
	Jumlah II	368.924	382.495	381.221	381.647	388.534	0,32
III	Perkebunan Rakyat						
1	Karet	340.436	341.480	340.889,00	335.594	338.008	-0,18
2	K. Sawit	153.951	157.061	164.519,00	171.279	180.673	4,09
3	Lain-lain	302.453	302.393	29.949,05	299.251	296.390	83,09
	Jumlah III	796.840	800.924	804.898,50	806.124	815.071	0,57
	Jumlah (I+II+III)	1.582.801	1.597.170	1.602.270	1.611.090	1.629.156	0,72

Sumber : Dinas Perkebunan Propinsi Sumatera Utara, 2004

Keterangan : Lainnya = kakao, kopi, teh, kelapa, tebu, tembakau, aren, kemiri, pinang.

Selama 5 tahun terakhir, luas areal perkebunan di Sumatera Utara mengalami perkembangan dari 1.582.801 hektar (1998) menjadi 1.629.156 hektar (2002), atau terdapat laju pertumbuhan sebesar 0,7 persen per tahun. Luas areal perkebunan pada tahun 2002, sebagian besar milik rakyat yaitu sebesar 50 persen, perkebunan swasta 26,1 persen dan perkebunan besar negara 23,8 persen. Akan tetapi berdasarkan hasil produksi perkebunan menunjukkan

bahwa hasil produksi perkebunan rakyat jauh lebih kecil yaitu hanya 23,4 persen, masih jauh di bawah hasil produksi perkebunan besar swasta sebesar 40,3 persen dan perkebunan besar negara sebesar 36,5 persen (Dinas Perkebunan Prop. Sumatera Utara, 2004). Upaya peningkatan luas lahan dan peningkatan produksi untuk perkebunan rakyat saat masa orde baru, telah dilakukan dengan pengembangan pola Unit Pelaksana Proyek (UPP), Perusahaan Inti Rakyat (PIR) dan Perkebunan Besar.

Tabel 4.2 : Perkembangan Produksi Perkebunan Sumatera Utara, 1998 - 2002

No	Uraian/ Komoditi	Produksi Perkebunan (Ton)					Perb /Thn (%)
		1998	1999	2000	2001	2002	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I	Perkebunan Besar Swasta						
1	Karet	141.106	120.520	118.944	112.767	123.767	-2,83
2	K. Sawit (TBS)	4.315.459	4.686.630	4.811.568	4.784.231	4.794.286	2,73
3	Lain-lain	19.525	17.021	15.857	14.859	16.503	2,06
	Jumlah I	4.476.090	4.824.171	4.946.369	4.911.857	4.934.556	2,52
II	Perkebunan Negara						
1	Karet	51.451	46.547	51.466	50.012	52.511	0,80
2	K. Sawit (TBS)	4.198.037	4.058.069	4.092.768	4.102.777	4.279.797	0,52
3	Lain-lain	129.283	120.216	130.535	127.104	129.090	12,15
	Jumlah II	4.378.771	4.224.832	4.274.769	4.279.893	4.461.398	0,51
III	Perkebunan Rakyat						
1	Karet	193.151	218.209	233.194	263.831	267.465	8,59
2	K. Sawit (TBS)	1.710.755	1.845.819	2.026.630	2.323.977	2.347.216	8,34
3	Lain-lain	212.613	214.514	205.964	215.721	214.599	2,08
	Jumlah III	2.116.519	2.278.542	2.465.788	2.803.565	2.829.280	7,62
	Jumlah (I+II+III)	10.971.380	11.327.545	11.686.926	11.995.315	12.225.234	2,74

Sumber : Dinas Perkebunan Propinsi Sumatera Utara, 2004

Berdasarkan Tabel 4.1 menunjukkan bahwa arah perkembangan luas perkebunan kelapa sawit di Sumatera Utara lebih banyak dikuasai oleh perkebunan besar swasta dari pada perkebunan negara dan perkebunan rakyat. Pada tahun 2002 luas perkebunan swasta sebesar 319.630 hektar atau 41 persen, perkebunan negara hanya 277.514 hektar atau 35,7 persen dan yang dikelola rakyat sebesar 180.673 hektar atau 23,2 persen. Data tersebut juga menunjukkan bahwa penguasaan lahan kelapa sawit lebih banyak pada perusahaan besar, sebaliknya perkebunan karet dan lainnya lebih banyak dikuasai perkebunan rakyat. Akan tetapi pertumbuhan produksi kelapa sawit selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup mencolok dibandingkan dengan perkebunan negara dan perkebunan besar swasta. (Tabel 4.2). Perkembangan produksi perkebunan rakyat mengalami kenaikan sebesar 8,3 persen, sedangkan perkebunan negara hanya sebesar 0,5 persen dan perkebunan besar swasta sebesar 2,7 persen. Keadaan ini menunjukkan

bahwa perkebunan kelapa sawit yang dikelola rakyat ternyata tidak kalah dengan perkebunan yang dikelola oleh perusahaan swasta dan perusahaan negara.

Berdasarkan data yang ditampilkan Tabel 4.2 menunjukkan bahwa dari sisi komoditas, maka tampak bahwa kelapa sawit sangat mendominasi sebagian besar luas lahan perkebunan di Sumatera Utara. Kemungkinan ini merupakan respon positif dari masyarakat perkebunan terhadap perkembangan pasar CPO pada selama lima tahun terakhir ini. Setelah Malaysia, Indonesia merupakan pemasok CPO terbesar dipasar dunia. Untuk perkembangan selanjutnya, bagi perusahaan perkebunan ada peluang untuk memperluas areal lahan perkebunan kelapa sawit terutama di Indonesia bagian timur. Hal ini disebabkan perluasan lahan tersebut tidak mungkin lagi dapat dilakukan di Sumatera Utara. Beberapa kasus menunjukkan bahwa karena keterbatasan lahan di Sumatera Utara, maka sebagian lahan perkebunan karet yang sudah tua dan tidak produktif lagi telah diganti menjadi perkebunan kelapa sawit. Kasus tersebut telah diperkuat dengan data pada Tabel 4.2 yang menunjukkan adanya suatu kecenderungan. Perubahan jenis tanaman tersebut nampaknya banyak dilakukan oleh perkebunan milik rakyat dan perkebunan swasta. Sehingga dapat dikatakan bahwa perkebunan rakyat maupun swasta mempunyai fleksibilitas yang tinggi dalam menghadapi situasi pasar komoditas pertanian.

Perkembangan PIR - ADB Besitang

Lahan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara sebagai daerah penelitian juga mengalami perkembangan. Di antara jenis tanaman komoditas (karet, kakao, kelapa sawit dan kopi), perkebunan kelapa sawit dan karet cukup dominan, baik dari sisi luas lahan maupun volume produksinya. Luas lahan keseluruhan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Langkat adalah 64.799 hektar atau 55 persen dari seluruh luas perkebunan yang ada. Lahan perkebunan kelapa sawit tersebut terdiri dari perkebunan rakyat 19.825 hektar, perkebunan negara 44.974 hektar, perkebunan swasta 19.945 hektar, dan perkebunan asing 9.820 hektar. (Langkat Dalam Angka, 2002; BKPM, 2000). Dengan demikian paling luas perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Langkat dikuasai oleh perkebunan negara, yaitu sebesar sekitar 48 persen. Pengelolaan perkebunan negara khusus di Kabupaten Langkat dilakukan PTPN II yang berpusat di Medan.

Perkebunan PIR - ADB (Asian Development Bank) Besitang Kabupaten Langkat, Sumatera Utara dirintis sejak tahun 1981/ 1982. Perkebunan PIR-ADB tersebut merupakan salah satu perkebunan plasma yang dibina oleh PTPN II Medan sebagai inti. Sumber dana perkebunan PIR tersebut didapat dari Asian Development Bank, dan pengelolaan usaha semula dilakukan

oleh inti. Kemudian perjalanan selanjutnya setelah tahun 1991 dipercayakan pada Koperasi Unit Desa (KUD) Rahmat Tani atau lebih dikenal dengan KUD RATA. Perkembangan perkebunan plasma kelapa sawit selama 20 tahun lebih, menunjukkan tingkat keberhasilan yang tinggi, di mana produksi selama dua puluh tahun relatif stabil.

Nama Desa PIR - ADB diberikan untuk tetap mengingat atau mengenang bahwa daerah tersebut sebagai salah satu desa yang tetap mempertahankan plasma kelapa sawit dan mendapatkan bantuan pinjaman kredit dari ADB (Asian Development Bank). Desa tersebut secara definitif dibentuk sejak tahun 1995 dan desa tersebut telah mandiri menjadi sebuah desa yang khusus menghasilkan kelapa sawit. Penduduk desa tersebut, pada tahun 1985 sebesar 500 KK, sesuai dengan jumlah peserta PIR. Kemudian telah mengalami pertambahan penduduk dan meningkat, yaitu menjadi lebih dari 800 KK pada tahun 2004. Pada tahun 2001 telah masuk pengungsi dari Aceh sebagai pendatang baru sebanyak 290 KK. Pengungsi tersebut, adalah penduduk trans asal Jawa, yang sudah menetap di Aceh sejak tahun 1983/84, dengan pola tanaman karet. Sebagian besar pengungsi tinggal di wilayah daerah yang dilindungi sebagai Cagar Alam yaitu di wilayah Taman Nasional Gunung Lauser.

Pada awal kedatangan para pengungsi sangat meresahkan penduduk di Kecamatan Besitang termasuk Desa PIR – ADB. Kedatangan mereka telah menciptakan kecemburuan sosial bagi penduduk setempat, karena para pengungsi mendapat bantuan uang dari pemerintah sebesar Rp. 8 juta, untuk kebutuhan sandang, pangan dan papan, padahal masih banyak penduduk sekitar yang masih kekurangan (Kompas 6-4-2001). Akan tetapi setelah beberapa tahun kemudian dan para pengungsi sudah beradaptasi dengan penduduk setempat, justru petani plasma banyak diuntungkan. Para pengungsi yang masih tinggal di wilayah PIR - ADB, disamping menebang kayu Damar, mereka dapat melakukan kerja “mocok” (buruh lepas) dan melakukan pekerjaan lainnya di perkebunan kelapa sawit (Ilustrasi 1). Dengan demikian dapat meringankan beban pekerjaan bagi para pekerja kelapa sawit. Pekerjaan yang semula dilakukan selama 30 hari kerja setelah dibantu tenaga para pengungsi bisa menjadi lebih pendek yaitu 20 hari kerja. Sebagai lokasi perkebunan kelapa sawit yang sudah “mapan”, selain pekerjaan perkebunan dilakukan oleh para pengungsi, juga ada pekerja yang direkrut sebagai buruh lepas di perkebunan PIR – ADB, yaitu pendatang dari luar kecamatan di kabupaten yang sama dan dari kabupaten lain di Propinsi Sumatera Utara. Jumlah pendatang tersebut mencapai 50 orang pekerja merupakan tenaga buruh tidak tetap, di bawah pengawasan mandor (Karyawan KUD). Dengan kata lain keberadaan PIR–ADB Besitang memberi kesempatan kerja bagi penduduk di sekitarnya.

Ilustrasi 1

Pengalaman Pengungsi Asal Aceh Pak AS

Pak AS saat ini berusia sekitar 45 tahun. Mereka berasal dari pengungsi asal Kabupaten Langsa, Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Mereka menyeberang perbatasan Propinsi NAD – Propinsi Sumatera Utara sekitar 4 tahun yang lalu bersama satu orang isteri dan 5 orang anaknya serta keluarga-keluarga yang lain. Mengapa mereka harus meninggalkan wilayah Aceh? Menurut penuturannya mereka telah diusir oleh para pembontak GAM (Gerakan Aceh Merdeka), kalau tidak mau pergi dia dan seluruh keluarganya akan dibunuh. Menurut Pak AS keamanan mereka mulai terusik setelah masuknya para anggota TNI ke daerah Langsa untuk memburu para pembontak GAM. Sebagai warga pendatang Pak AS sekeluarganya beserta kawan atau tetangganya selalu menjadi sasaran GAM.

Pak AS sekeluarga sebetulnya berasal dari daerah Pangkalan Brandan, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Orang tua Pak AS menurut pengakuannya berasal dari Bandung, Jawa Barat. Mereka datang ke Langkat, Sumatera Utara pada awal tahun 40-an. Orang tua waktu itu ikut sebagai kuli kontrak dalam perkebunan di daerah Langkat pada perusahaan perkebunan Kolonial Belanda. Orang tua memang berasal dari keluarga miskin, sebagai petani lahan sempit yang hidupnya serba kekurangan. Orang tua mencoba mengadu nasib sebagai buruh di perkebunan Langkat, Sumatera Utara. Ceritanya orang tua tidak sendirian dari daerah asal Bandung, namun bersama rekan-rekan sekampungnya. Orang tua Pak AS dari zaman penjajahan Belanda sampai zaman kemerdekaan tidak pernah kembali ke daerah asal. Meskipun kehidupan sebagai buruh di perkebunan tidak begitu sejahtera, namun orang tua tidak berkeinginan pulang kembali ke daerah asal. Hal itu disebabkan di daerah asal sudah tidak memiliki lahan pertanian lagi. Orang tua waktu datang ke Sumatera Utara pada tahun 40-an masih bujangan, kemudian kawin dengan gadis anak seorang kuli kontrak juga. Dalam hasil perkawinannya lahir 5 orang anak, di mana Pak AS sebagai anak pertamanya.

Orang tua Pak AS setelah tidak menjadi kuli kontrak menjadi petani pemilik dari hasil mengumpulkan uang upah,

meskipun tidak begitu luas (sekitar 1 hektar). Lahan tersebut ditanami kelapa sawit. Dari hasil lahan tersebut dapat untuk menghidupi orang tua Pak AS, isteri dan 5 orang anaknya. Dengan lahan yang sempit untuk menghidupi seluruh keluarga, makin lama dirasa kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Pak AS mulai berfikir akan masa depannya, apalagi mereka nanti harus berkeluarga punya isteri dan anak. Pada awal tahun 90-an mereka mencoba merantau ke wilayah Aceh Tenggara, tepatnya di daerah Langsa. Di sana ikut sebagai transmigran spontan dengan membuka hutan untuk perkebunan. Dengan bekal pengalaman, pengetahuan dan ketrampilan berkebun kelapa sawit ketika ikut orang tuanya di Langkat, mereka menanam tanaman kelapa sawit. Luas lahan yang mereka buka dan tanami pada akhir tahun 90-an mencapai 5 hektar. Dari tanaman seluas 5 hektar tersebut, hampir semuanya telah beberapa kali panen tandan buah segar (TBS). Dari kebun kelapa sawit seluas 5 hektar tersebut merasa kehidupan mereka bersama keluarganya di daerah Langsa sudah cukup enak. Hasil jerih payah membuka lahan, menanam dan memelihara tanaman kelapa sawit tinggal memetik hasilnya.

Kondisi yang menggembirakan tersebut ternyata tidak berlangsung lama, sejak adanya kerusuhan, adanya konflik antara TNI dan para pembrontak GAM. Kehidupan para pendatang mulai terusik. Mereka selalu menjadi sasaran pihak GAM, apalagi nampak bahwa banyak pendatang yang berhasil dalam kehidupannya. Karena mendapat ancaman terus akhirnya Pak AS sekeluarga dan rekan-rekannya/tetangganya yang sama-sama pendatang harus meninggalkan rumah, harta benda dan perkebunan kelapa sawitnya yang sudah bisa dipanen. Mereka menyeberang ke daerah Langkat dengan membawa perbekalan seadanya atau semampunya. Mereka hanya berjalan kaki melewati hutan-hutan, bukan melalui jalan besar untuk menghindari serangan GAM.

Pak AS dan rekan-rekannya tidak kembali ke daerah asal di Pangkalan Brandan, namun mereka lebih senang tinggal di hutan-hutan bersama rekan-rekannya senasib. Daerah tersebut sebetulnya merupakan wilayah hutan lindung TNGL (Taman Nasional Gunung Leuser). Namun daerah yang mereka tempati merupakan daerah yang pernah dibuka oleh

penebang liar, kayunya diambil dan lahannya dibiarkan menjadi hutan alang-alang. Di daerah tersebut tinggal sekitar 250 keluarga, mereka membuat rumah-rumah bedeng dan berkebun. Mereka menanam tanaman-tanaman pangan untuk di makan sendiri, seperti tanaman singkong, jagung dan sayur-sayuran. Mereka selama ini memang mendapatkan bantuan/ santunan pangan dan uang dari Pemerintah Daerah. Untuk mendapatkan uang tunai dan memenuhi kebutuhan hidup para pengungsi tersebut ada juga yang ikut bekerja sebagai buruh di plasma Desa PIR-ADB Besitang dan ada juga bekerja sebagai buruh di lahan food crop milik para petani peserta plasma. Jadi kedatangan para pengungsi juga cukup membantu bagi usaha pertanian para petani peserta plasma.

Menurut pengakuan Pak AS, pada tahun 2001 para pengungsi tersebut pernah mendapatkan bantuan uang dari Pemerintah Daerah sebesar Rp 8 juta per kepala keluarga. Bagi para pengungsi dengan adanya bantuan uang tersebut sangat menggembirakan. Namun sayang penggunaannya tidak seragam dan hanya sesuai dengan keinginan masing-masing. Kebanyakan uang tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, tapi tidak sedikit yang hanya digunakan untuk membeli barang-barang yang tidak produktif. Ada yang digunakan untuk membeli barang-barang elektronik, ada yang digunakan untuk membeli motor dsb. Berbeda dengan Pak AS, dia lebih berfikir untuk masa depan anak-anaknya. Dari uang sebanyak Rp 8 juta tersebut, sebanyak Rp 7,7 juta digunakan untuk membeli lahan pertanian. Pada waktu itu kebetulan ada petani peserta plasma yang akan menjual lahan food crop-nya seluas 0,25 hektar, oleh Pak AS segera lahan tersebut dibelinya seharga Rp 7,7 juta. Dari lahan yang dibelinya tersebut dibangun sedehana. Rumahnya berukuran 6 x 8 meter, dinding papan, atapnya dari rumbia dan lantainya masih lantai tanah. Akhirnya Pak AS menjadi satu-satunya pengungsi yang memiliki lahan secara resmi dan rumah sendiri. Dengan pemilikan lahan dan rumah tersebut, kehidupan Pak AS sudah mulai merasa tenang, meskipun kadang masih mengingat pilu dengan kebun kelapa sawitnya (5 hektar, siap panen) yang ditinggalkan begitu saja di Langsa, Aceh Tenggara. Lahan di sekitar rumahnya tersebut telah ditanami kelapa sawit sebanyak 40 batang pohon dan saat ini sudah mulai panen tandan buah segar.

Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari Pak AS dan isterinya dapat bekerja sebagai buruh di perkebunan plasma kelapa sawit PIR-ADB Besitang. Kegiatan yang mereka lakukan adalah apa saja sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja dan perintah mandor. Bagi Pak AS dan isteri sudah sangat biasa melakukan pekerjaan-pekerjaan di perkebunan kelapa sawit. Hanya waktu di Langsa perannya sebagai pemilik, sekarang di Desa PIR-ADB harus mau hanya sebagai buruh, yang upahnya digabung dengan upah isteri hanya sekitar Rp 15.000,- per hari.

Bagaimana harapan dan masa depan bagi Pak AS. Dia hanya ingin mencoba untuk hidup seadanya di Desa PIR-ADB Besitang. Untuk kembali menengok atau kembali ke perkebunan yang ditinggalkan di daerah Langsa menurut pengakuan Pak AS merasa takut. Mereka trauma kasus waktu diusir dulu dan khawatir malah menjadi sasaran para pembrontak GAM.

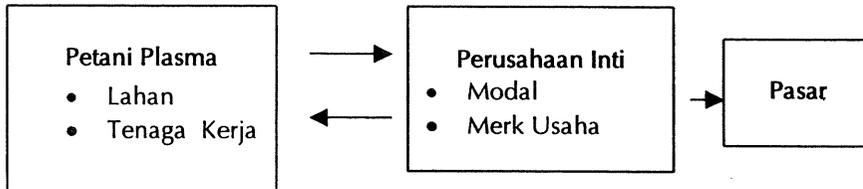
(Wawancara Mendalam, 2004)

4.3. Hubungan Perusahaan Inti - Plasma

Perkebunan swasta nasional memegang peranan penting dalam ekspansi lahan perkebunan. Perubahan awal yang terjadi adalah dimulainya program promosi perkebunan kecil. Program tersebut diberi nama dengan Perkebunan Inti atau dikenal dengan Perkebunan Inti Rakyat (PIR) dan ini diperkenalkan pada tahun 1977. Pada awalnya hanya perkebunan milik negara yang menjalankan program PIR, akan tetapi pada tahun 1986 program tersebut berupa perintah bagi pengembang baru agar berpartisipasi dalam program PIR. Rasio alokasi areal perkebunan kelapa sawit, yaitu di antara perkebunan inti dan perkebunan rakyat, telah dirubah dari 20 : 80 menjadi 40 : 60 persen. Perubahan tersebut mendorong masuknya modal swasta nasional baru dalam jumlah besar.

Hubungan antara para petani pemilik lahan sebagai pemilik plasma dengan perusahaan inti merupakan gambaran usaha perkebunan pola PIR. Tujuannya adalah usaha kemitraan yang seimbang serta untuk menumbuhkan kemandirian petani pemilik lahan. Hubungan keduanya dapat digambarkan dalam diagram (Diagram 4.1) sebagai berikut :

Diagram 4. 1.



Sumber : Akatiga, 1997

Hubungan inti plasma (Diagram 4.1) merupakan hubungan produksi antara dua lembaga, yaitu kelompok tani plasma yang memiliki faktor produksi lahan dan tenaga kerja, sedangkan perusahaan inti yang dapat berupa perusahaan negara atau swasta baik asing maupun nasional yang memiliki modal, merk usaha dalam pengelolaan, agar dapat dikenal di pasaran komoditas tersebut. Dengan demikian hubungan antara keduanya merupakan mitra usaha yang saling menguntungkan, terutama dalam hal produksi maupun pemasaran yang sudah diprediksi ke depan. Penentuan dalam aspek produksi menyangkut jenis komoditas, kuantitas dan kualitas komoditas, teknologi, serta penggunaan input produksi. Sedangkan pemasaran menyangkut harga dan jaminan pihak inti dalam pembelian output produksi yang dihasilkan petani. Pihak inti biasanya menyediakan fasilitas supervisi, kredit, input produksi, peminjaman alat produksi (penyewaan mesin), dan bantuan bimbingan teknis lainnya.

Pihak inti juga memiliki dan mengelola kebun sendiri yang disebut kebun inti. Khusus dalam PIR, perbandingan resmi antara luas kebun yang dikuasai pihak inti dan luas kebun plasma adalah 20 persen dan 80 persen. Akan tetapi dalam perkembangannya agar pihak inti lebih merasa aman, maka ada beberapa PIR yang mempunyai perbandingan kebun 40 persen dan 60 persen. Kebun inti dikelola oleh perusahaan inti dengan manajemen komersial. Kebun inti dimaksudkan sebagai lahan percontohan untuk kebutuhan produksi. Namun demikian, lahan inti juga dipakai sebagai cadangan strategi jika terjadi degradasi produksi dari kebun plasma.

Sistem pengelolaan PIR – ADB Besitang

Di PIR-ADB Besitang hubungan antara inti dan plasma telah terjalin sejak dibukanya proyek PIR-ADB Besitang pada tahun 1981/1982. Pihak inti adalah PTPN II dan pihak plasmanya adalah para petani peserta Plasma Desa PIR-ADB Besitang. Hubungan antara keduanya merupakan mitra usaha yang saling menguntungkan. Pihak inti mengusahakan modal dari pinjaman ADB (Asian Development Bank), menyediakan bimbingan teknis dan peminjaman alat produksi, menyediakan input produksi, fasilitas supervisi, menentukan kuantitas dan kualitas produksi serta membeli atau menjualkan hasil produksi TBS setelah panen. Sedangkan pihak petani plasma menyediakan lahan

plasma dan tenaga kerja. Hubungan antara inti dan plasma tersebut berjalan cukup baik dan saling menguntungkan. Pihak petani plasma merasa diuntungkan karena mendapatkan fasilitas kredit, bimbingan teknis pengelolaan sawit bagaimana untuk mendapatkan kuantitas dan kualitas produk yang baik. Pihak inti mendapatkan keuntungan dari mengolah atau menjualkan hasil TBS milik plasma.

Kemitraan antara inti dan plasma tersebut tidak berlangsung lama. Kemitraan hanya berlangsung sampai awal tahun 90-an. Sebab kredit para petani plasma yang dikelola melalui inti sudah selesai atau lunas. Pada tahun 1991 telah terbentuk Koperasi Unit Desa (KUD) di Desa PIR-ADB Besitang. Semenjak itu, pengelolaan usaha plasma mulai dikelola oleh KUD. Pengelolaan yang dilakukan KUD meliputi pemeliharaan, pemanenan sampai pemasaran. Menurut keterangan dari berbagai informan menyebutkan bahwa pemasaran TBS (tandan buah segar) kelapa sawit setelah dikelola oleh KUD lebih terbuka. Tiap 4 bulan sekali penjualan TBS dilakukan melalui tender yang diikuti oleh beberapa perusahaan pengolahan. Dengan cara tender dapat dipilih peserta tender yang berani membeli dengan harga TBS yang tertinggi. Dalam pemasaran ini para anggota juga dapat mengetahui atau mengawasi tentang jumlah produksi, harga jual dan penerimaan hasil penjualan. Uraian tentang KUD dan perannya dalam pengelolaan plasma akan disajikan pada subbab berikutnya di Bab IV ini. Sedangkan tentang gambaran penyerapan tenaga kerja dan kesejahteraan petani plasma PIR ADB, akan dikupas secara mendalam pada Bab V.

4.4. Lembaga KUD dan Kemandirian Petani Plasma

Lembaga kemasyarakatan atau pranata sosial adalah suatu sistem tata laku dan hubungan yang terpusat kepada aktivitas untuk memenuhi kebutuhan yang demikian kompleks (Rofiq Ahmad, 1998). Sedikitnya ada lima pranata sosial, yaitu kekeluargaan, pendidikan, keagamaan, ekonomi dan pemerintahan. Karakteristik lembaga kemasyarakatan memiliki tujuan, mengandung nilai pokok, teratur dan direncanakan, interaksi individu dalam lembaga, memiliki fungsi spesifik dan saling berhubungan dengan lembaga lain. Oleh sebab itu, dapat terjadi persaingan atau kerjasama antar lembaga, terdapat keragaman atau perbedaan namun memiliki karakteristik umum yang terjadi di masyarakat. Proses pembentukan lembaga adalah penyerahan, pengakuan dan penghayatan.

Berkembangnya lembaga kemasyarakatan di Desa PIR-ADB seiring dengan proses yang terjadi di desa tersebut. Selama lebih dari 20 tahun telah terbentuk beberapa lembaga yang mandiri. Kelembagaan yang ada di desa ini terdiri dari organisasi pemerintahan, antara lain Rukun tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Dusun, dan Unit Kapling. Organisasi ekonomi meliputi

KUD, Kelompok Tani, Bank Daerah. Organisasi sosial meliputi perkumpulan arisan dan perkumpulan yasinan. Lembaga kemasyarakatan atau pranata sosial yang berkembang di PIR – ADB mempunyai peranan penting, baik yang berupa membantu petani untuk mengelola usahanya (plasma) maupun masalah kemasyarakatan lainnya. Para petani plasma saling membantu dalam memecahkan masalah yang dihadapi secara bersama-sama. Terutama petani plasma masih bercirikan petani tanaman monokultur, berasal dari daerah yang berbeda, seperti dari penduduk lokal (setempat), keturunan Jawa, Batak dan Melayu. Untuk menciptakan masyarakat yang harmoni baik secara ekonomi dan sosial, dibutuhkan penyatuan pendapat dan integrasi sesama warga serta dibutuhkan suatu wadah untuk saling berintegrasi dan bermusyawarah. Secara kongkrit lembaga kemasyarakatan tersebut mempunyai fungsi, yaitu : (a) memberikan pedoman pada anggotanya, (b) menjaga keutuhan masyarakat, (c) sebagai sistem pengendalian sosial (Rofiq Ahmad, 1998). Kemudian berikut akan dikemukakan uraian beberapa lembaga yang cukup penting.

Di antara lembaga-lembaga kemasyarakatan tersebut yang sangat menonjol perannya, terutama dalam kehidupan perekonomian petani plasma adalah KUD. Oleh karena itu, dalam pembahasan berikut akan memfokuskan pada lembaga KUD yang ada di Desa PIR – ADB Besitang. Peran KUD dalam pengelolaan plasma sebagai indikasi telah adanya kemandirian petani peserta dan mengelola lahan plasmanya sendiri.

Peran Koperasi Unit Desa dalam kemandirian

KUD di Desa PIR-ADB Besitang bernama KUD Rata (Rahmat Tani). KUD ini didirikan pada tahun 1991. Jumlah anggota KUD ini sejak awal berdiri sampai sekarang tetap sebanyak 500 orang petani. Mereka semua adalah para petani peserta plasma di Desa PIR-ADB Besitang.

Tujuan pendirian KUD ini utamanya adalah membantu para petani plasma secara bersama-sama dalam pengelolaan kebun plasmanya sendiri, agar pengelolaan plasma dilakukan dengan benar menurut aturan teknis perkebunan besar, produktivitas tetap terjaga dan dapat dinikmati hasilnya secara merata bagi seluruh petani peserta plasma. Oleh karena itu, kegiatan utama atau yang paling menonjol dari KUD ini adalah unit usaha mengelola perkebunan kelapa sawit di lahan plasma milik anggota. Kegiatan ini merupakan mandat seluruh anggota KUD/ petani plasma. Di samping itu, KUD juga memiliki unit usaha kegiatan lainnya, yaitu usaha Waserda, jasa angkutan, jasa pembayaran listrik PLN dan simpan pinjam. Usaha Waserda menyediakan kebutuhan saprodi (sarana produksi – seperti pupuk, alat-alat pertanian, obat pembrantas hama tanaman), penyediaan bahan bakar minyak dan kebutuhan pokok rumah tangga serta alat tulis untuk anak sekolah.

Bahan saprodi disediakan baik untuk memenuhi kebutuhan di kebun plasma maupun kebutuhan para petani di luar lahan plasma.

Unit usaha pengelolaan plasma kelapa sawit, sebagai kegiatan yang paling utama memiliki struktur dan personalia yang paling lengkap dan banyak. Semua personalia diangkat dari para anggota KUD atau petani peserta plasma yang dianggap mampu. Kegiatan KUD ini dipimpin oleh seorang manajer yang juga merangkap manajer di unit usaha pengelolaan plasma kelapa sawit. Dalam pengelolaan plasma manajer dibantu beberapa staf administrasi, seperti kasir, juru buku, juru tik dan agenda. Kemudian manajer juga dibantu oleh para kerani, yaitu kerani afdeling, kerani upah, kerani produksi dan kerani gudang. Dalam kegiatan di plasma manajer dibantu oleh para mandor. Jumlah dan jenis mandor disesuaikan dengan jenis-jenis kegiatan yang ada di plasma. Mandor-mandor yang diangkat meliputi mandor pemeliharaan tanaman, mandor panen, mandor brondolan (mengumpulkan hasil TBS yang tercecer) dan mandor pasar. Kemudian untuk mengerahkan dan mengkoordinir tenaga kerja di plasma diangkat ketua-ketua kelompok kerja. Di plasma Desa PIR-ADB Besitang ini ada 20 kelompok kerja yang juga disebut kelompok tani. Tenaga kerja dari manajerm kerani, mandor, ketua kelompok sampai pekerja hampir seluruhnya diangkat dari para anggota KUD atau petani peserta. Dalam istilah ekonomi para petani peserta tersebut di samping sebagai pelaku kegiatan di plasma juga sebagai pemegang saham, sebab modal utama kegiatan pengelolaan perkebunan kelapa sawit di Desa PIR-ADB Besitang ini adalah lahan plasma. Lahan plasma dalam hal ini milik seluruh petani peserta, di mana masing-masing petani memiliki lahan sekitar 2 hektar dan luas seluruhnya 1.247,5 hektar. Oleh karena itu, masing-masing petani peserta tersebut berhak menerima hasil TBS kelapa sawit yang dihasilkan plasma tersebut. Dengan adanya model pengelolaan plasma bersama melalui KUD ini para petani peserta mendapatkan dua keuntungan yang langsung dapat dirasakan, yaitu : (1). Penerimaan uang hasil penjualan TBS atau sebagai uang bagi hasil yang diterima tiap bulan; dan (2). Penerimaan yang berupa upah atau gaji sebagai balas jasa karena bekerja di kegiatan kebun plasma.

Ada beberapa peran penting KUD Rahmat Tani tiap bulan dalam kaitannya dengan para petani peserta plasma (anggota KUD), yaitu :

- a. Mengatur pembagian bagi hasil penjualan TBS dan membagikan langsung kepada para petani peserta plasma. Pembagian uang bagi hasil tersebut dilakukan tiap tanggal 1(satu) tiap bulan berdasar luas lahan plasma yang dimiliki.
- b. Mengatur sistem pembagian kerja dan pengupahan/ penggajian bagi para pekerja tetap maupun pekerja borongan (lepas), di mana sebagian besar pekerjanya juga para petani peserta plasma beserta keluarganya.

Pengupahan/ penggajian para tenaga kerja ini dilakukan tiap tanggal 15 tiap bulan.

- c. Mengatur cicilan kredit para petani plasma yang dilakukan tiap bulan sekali yang dipotong dari uang bagi hasil.
- d. Memberikan pelayanan simpan pinjam dan barang kebutuhan rumah tangga para petani peserta yang dapat dibayar tunai atau pinjaman. Pinjaman tersebut dapat dikembalikan/ diangsur dengan cara potongan langsung dari uang bagi hasil tiap bulan.

Oleh karena semua pengelolaan usaha perkebunan sampai pekerja di lapangan dilakukan oleh para peserta plasma sendiri, maka semenjak plasma dikelola KUD kemandirian petani plasma mulai dirasakan. Meskipun petani plasma Desa PIR-ADB Besitang telah mandiri, namun komunikasi dengan pihak inti masih terjalin. Komunikasi dilakukan terutama untuk konsultasi masalah teknis penanaman dan pemeliharaan tanaman kelapa sawit. Manfaat kemandirian yang dirasakan adalah ternyata produktivitas kelapa sawit di plasma (TBS) ternyata tetap tinggi sampai tahun 2000-an. Kemudian pemasaran TBS dilakukan sendiri oleh KUD melalui sistem tender yang dilakukan tiap 4 bulan sekali menyebabkan harga jualnya cukup baik dan tidak mudah dipermainkan oleh pembeli. Dengan kata lain kemampuan tawar (bargaining power) para petani peserta plasma meningkat. Dampak yang sangat dirasakan pendapatan para petani peserta plasma per bulan cukup baik. Uraian tentang pendapatan petani peserta plasma secara rinci akan dibahas dalam Bab V.

Bentuk lembaga lainnya

Di samping lembaga KUD yang terkait langsung dengan para petani peserta plasma, ada beberapa lembaga yang tidak terkait langsung namun penting dalam perkembangan kelapa sawit antara lain :

1. Masyarakat perkelapasawitan Indonesia (MAKSI) adalah suatu lembaga yang melakukan kajian penting dalam perkembangan kelapa sawit, anggotanya terdiri dari para profesional atau para ahli baik secara mikro organisme maupun makro sosial ekonomi.
2. Lembaga yang melakukan penelitian secara langsung terhadap perkembangan pembibitan dan usaha pengembangan adalah Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) yang berdomisili di Medan - Sumatera Utara. Lembaga tersebut melakukan usaha pembibitan dan pengelolaan limbah kelapa sawit, sehingga limbah tersebut dapat dimanfaatkan secara baik antara lain untuk pupuk atau bahan baku bangunan.

Sedangkan lembaga baik di tingkat nasional maupun internasional yang tidak langsung berhubungan dengan pengelolaan perkebunan kelapa sawit,

akan tetapi membantu dalam kelangsungan usaha adalah FAMNI (Federasi Asosiasi Minyak Nabati Indonesia) dan AVOS (Asian Vegetable Oil and Oil Seeds). Di samping itu, juga terdapat lembaga yang diprakarsai oleh Perkebunan Negara yaitu Kantor Pemasaran Bersama (KPB). Tujuannya adalah melakukan kegiatan pemasaran bagi produk-produk yang dihasilkan oleh perkebunan antara lain : teh, karet, coklat, lada, kopi dan kelapa sawit. Akan tetapi konsekuensinya perusahaan swasta tidak melakukan hubungan dengan lembaga tersebut.

4.5. Kebijakan dan Iklim Investasi

Kebijakan pemerintah

Di samping peran kelembagaan dalam pengembangan perkebunan kelapa sawit rakyat, berbagai program dan kebijakan pemerintah juga penting. Program dan kebijakan makro agroindustri minyak kelapa sawit telah dikeluarkan oleh beberapa departemen, seperti Departemen Pertanian, Departemen Perindustrian, Departemen Perdagangan dan Departemen Keuangan pada tahun 1991. Selama ini Indonesia telah berhasil meningkatkan lahan perkebunan kelapa sawit yang cukup besar. Kemudian diikuti dengan tumbuhnya pabrik penyulingan minyak kelapa sawit berupa CPO. Paket Juni 1991 telah dikeluarkan 3 Juni 1991, dengan tujuan menetapkan substitusi impor dan melakukan kontrol terhadap ekspor CPO. Dengan demikian mendorong perdagangan CPO (Karseno, AR, 2001).

Dalam usaha mendorong perkebunan kecil/ perkebunan rakyat, pemerintah telah mengeluarkan regulasi yang mewajibkan perkebunan/ perusahaan besar membeli CPO dari perkebunan kecil. Dengan regulasi tersebut, pemerintah dapat membantu petani kelapa sawit untuk mendapatkan harga yang wajar. Sebelumnya harga ditentukan oleh pembeli atau para tengkulak dengan harga yang rendah di bawah standar. Di lain pihak para produsen minyak goreng dapat memperoleh suplai yang stabil dan bahan mentah yang lebih murah, pada gilirannya mempunyai daya saing dalam menghadapi produsen luar negeri. Kebijakan tersebut juga membantu produsen minyak goreng dalam menyediakan minyak dengan harga yang lebih murah bagi konsumen dalam negeri. Selama ini telah terjadi peningkatan suplai minyak goreng dalam negeri semenjak tahun 1993/1994. Hal ini didorong oleh kebijakan pemerintah untuk melindungi industri minyak goreng dan industri hilir CPO terhadap kelangkaan bahan mentah.

Pada bulan Mei 1995 pemerintah mengeluarkan regulasi baru dengan tujuan mempertahankan serta menstabilkan harga CPO domestik selama terdapat suplai CPO yang berlebihan. Agar dapat mempertahankan dan menjaga bagian terbesar dari nilai tambah industri minyak sawit. Melalui kontrol

areal perkebunan kelapa sawit yang sangat luas dan mendorong industri minyak goreng untuk tumbuh dan memperoleh keuntungan dari penjualan CPO, maka Indonesia menjadi sebuah negara dengan produsen minyak goreng yang terintegrasi dan terbesar di kawasan dunia.

Kebijakan pemerintah di bidang perkebunan dititikberatkan pada usaha pengembangan dan pembinaan perkebunan rakyat. Menurut Djafar dkk., (1982), usaha pengembangan perkebunan rakyat di Sumatera Utara sudah dimulai sejak Pelita II (1974 – 1979) yaitu melalui Proyek Pengembangan Perkebunan Rakyat Sumatera Utara (P3RSU). Proyek ini merupakan proyek terpadu pertama di lingkungan Dir. Jen. Perkebunan dan merupakan proyek perintis. Komoditas yang dikembangkan adalah karet dan kelapa sawit. Pada tahun 1970-an pemerintah mulai mengembangkan tanaman ekspor perkebunan diantaranya kelapa sawit. Untuk mencapai efisiensi dan efektifitas usaha, pola pengembangan dilakukan melalui pola Perkebunan Inti Rakyat (PIR) dan melibatkan Perkebunan Besar Swasta Nasional (PBSN).

Pada awalnya hanya perkebunan milik negara saja yang menjalankan program PIR. Namun semenjak tahun 1986 program ini bersifat perintah bagi seluruh pengembang baru perkebunan kelapa sawit untuk berpartisipasi dalam program PIR (Karseno, AR, 2001). Program pinjaman khusus bagi perkebunan – perkebunan baru, dengan syarat 90 persen dari investasi total dapat dibiayai melalui pinjaman dengan bunga 9 persen per tahun, kemudian meningkat menjadi 12 persen per tahun. Dampak dari kebijakan tersebut, diharapkan akan menumbuhkan perkebunan besar milik swasta yang akan menghasilkan pangsa terbesar dari produksi CPO dan perkebunan rakyat juga akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap produksi CPO di Indonesia. Program perkebunan rakyat melalui sistem Perkebunan Inti yang dilaksanakan oleh Departemen Pertanian telah memberikan kontribusi cukup besar terhadap perbaikan kesejahteraan petani dan memberikan motivasi bagi petani Jawa untuk bermigrasi ke lahan perkebunan di luar Jawa.

Iklm investasi

Di samping faktor kebijakan pemerintah, iklim investasi yang baik secara tak langsung juga memiliki peran penting. Iklim investasi akan sangat dipengaruhi oleh peluang usaha yang terdapat di daerah tersebut, dan dapat dilihat dari volume ekspor dan nilai ekspor di wilayah tersebut. Pada Tabel 4.3 menunjukkan bahwa selama 4 tahun hasil perkebunan di Sumatera Utara, terutama hasil perkebunan kelapa sawit telah mengalami peningkatan secara proporsional baik volume maupun nilai ekspornya. Berbeda dengan karet selama empat tahun tersebut sempat terjadi penurunan volume dan nilai ekspornya. Hal ini tentu saja sangat dipengaruhi oleh kondisi pasar luar negeri. Kemungkinan dipengaruhi oleh pesaing di pasaran luar negeri atau

barangkali karena kualitas produksi karet yang masih rendah. Demikian pula dengan komoditas lainnya (kakao, kopi, teh, kelapa, tebu, tembakau, aren, kemiri, pinang), memasuki tahun 2000 nampak menghadapi persaingan yang semakin ketat, dan keberhasilan usaha sangat tergantung pada keberhasilan menciptakan efisiensi. Ini yang menjadi kelemahan pengelolaan komoditas hasil perkebunan di Propinsi Sumatera Utara tersebut, sehingga tidak memiliki kemampuan bersaing pada pasar yang semakin terbuka dan bebas.

Tabel 4.3 : Volume dan Nilai Ekspor Primer Perkebunan Sumatera Utara, 1999 – 2002

Komoditas	1999		2000		2001		2002	
	Volume	Nilai (000US\$)	Volume	Nilai (000US\$)	Volume	Nilai (000US\$)	Volume	Nilai (000US\$)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
K. Sawit	2089202,29	698907,32	2126524,40	620058,04	3048794	577969	3343231	1125734
Karet	589221,30	341346,58	417422,74	309315,26	583504	328894	638706	385287
Lain-lain	110759,03	17834,85	77992,24	118399,72	97332	140017	100612	159449
Jumlah	2789182,63	1058088,76	2620439,37	11047773,03	3729630	1046880	3982549	1670470

Sumber : Dinas Perkebunan Propinsi Sumatera Utara, 2004

Menurut SK Menteri Pertanian No. 357/Kpts/HK.350/5/2002, pabrik pengelola hasil perkebunan wajib dilakukan secara terpadu dengan jaminan pasokan bahan baku dari kebun sendiri (Guritno P., dkk. 2003). Apabila pasokan bahan baku dari kebun sendiri tidak mencukupi dapat dipenuhi dari sumber lain. Pada kenyataannya di Sumatera Utara terdapat banyak pabrik kelapa sawit milik swasta yang menampung bahan baku buah sawit baik dari hasil sendiri maupun yang dihasilkan oleh perkebunan rakyat. Karena banyak pabrik pengolahan sawit baik milik swasta maupun milik negara di daerah tersebut, akan menciptakan kompetitif tersendiri untuk mendapatkan hasil perkebunan milik rakyat. Sehingga dengan kata lain pekebunan rakyat mempunyai kompetitif yang tinggi dalam pengolahan hasil produksi.

Pemerintah melalui kebijakannya mempunyai pengaruh yang sangat kuat terhadap perkembangan investasi di industri kelapa sawit. Berbagai program dan kebijakan yang dikeluarkan oleh koordinasi Departemen Pertanian, Departemen Perindustrian dan Perdagangan serta Departemen Keuangan pada tahun 1991 telah berdampak berupa meningkatnya lahan perkebunan kelapa sawit selama lima tahun terakhir ini (Karseno, 2001), yaitu berupa tumbuhnya perusahaan pengolahan minyak sawit (CPO). Peningkatan investasi di perusahaan tersebut, dengan masuknya sektor swasta untuk mendirikan perusahaan tersebut, telah meningkatnya suplai minyak sawit mentah (CPO), sehingga hasil panen kelapa sawit dari perkebunan yang

baru tumbuh dapat diserap. Peraturan tersebut dimaksudkan menggantikan peraturan lama mengenai substitusi impor. Dengan demikian seluruh ekspor CPO dapat dikontrol oleh Departemen Perindustrian, Perdagangan dan Departemen Keuangan. Peraturan tersebut ditujukan untuk meliberalisasi perdagangan CPO.

Hasil kajian BKPM Propinsi Sumatera Utara menunjukkan bahwa berdasarkan potensi pertanian di Kabupaten Langkat bila dikaitkan dengan sektor industri, maka kegiatan ekonomi yang dapat menyerap investor adalah : (1). Pengelolaan minyak goreng dan oleokimia; (2). Industri pengolahan buah-buahan; (3). Pengusahaan ikan kerapu; (4). Pengusahaan tambak udang windu; dan (5). Industri pariwisata (Profil Proyek Investasi, Kab. Langkat, 2000). Pengolahan minyak goreng dan oleokimia dipilih sebagai bidang usaha yang layak dikembangkan, karena di wilayah Kabupaten Langkat terdapat banyak kebun dan pabrik pengolahan sawit. Hasil CPO dari pabrik selain untuk konsumsi dalam negeri juga diekspor ke luar negeri, sehingga akan memberikan nilai tambah dari produk tersebut, terhadap pendapatan daerah. Dalam hal pengelolaan hasil produksi kelapa sawit menjadi minyak goreng dan olein, merupakan andalan industri kelapa sawit baik di Langkat pada khususnya maupun Indonesia pada umumnya. Hal ini telah menjadi sorotan bagi para analis ekonomi pertanian.

Bustanul Arifin (2004) berpendapat bahwa Indonesia selama ini baru mampu mengembangkan industri sederhana saja, belum melakukan terobosan industri berteknologi tinggi, seperti kosmetik, biokimia, dan lainnya. Di samping itu, industri olein dan minyak goreng hanya dikuasai oleh satu atau dua perusahaan / konglomerat besar dengan penguasaan pangsa pasar yang sangat besar pula. Pemerintah juga melakukan intervensi berupa pengendalian ekspor dan menekankan pada pasar domestik dengan harga yang rendah, sehingga merugikan petani dan pekebun yang jumlahnya besar, terutama produsen CPO baik petani kecil maupun peserta plasma dalam pola PIR. Dalam kasus di PIR – ADB Besitang, Kabupaten Langkat yang dikelola KUD menunjukkan hal yang sangat positif. Di sini terdapat kemandirian dalam pemasaran hasil produksi TBS kelapa sawit. Melalui sistem tender yang mereka lakukan setiap empat bulan sekali dengan beberapa pabrik pengolahan kelapa sawit setempat, mereka mendapatkan harga yang relatif baik di atas harga yang berlaku umum.

4.6. Produksi dan Pemasaran

Peluang penjualan kelapa sawit dari hasil produksi perkebunan di Kabupaten Langkat cukup menggembirakan. Terutama peluang untuk memasok bahan dasar industri CPO, untuk memenuhi kebutuhan industri di Sumatera yang mencapai 80 pabrik pengolahan bahan baku minyak sawit. Tentu saja ini

mempunyai prospek yang sangat penting bagi pengembangan usaha kelapa sawit di Kabupaten Langkat, termasuk pengembangan perkebunan rakyat, seperti PIR-BUN kelapa sawit. Dalam lima tahun terakhir produksi minyak goreng di Indonesia mengalami peningkatan rata-rata sebesar 15 persen per tahun.

Perkembangan produksi selama lima tahun (1998 – 2002), dapat dilihat pada Tabel 4.4 yang menggambarkan perkembangan produktivitas (kg/ha/th) perkebunan kelapa sawit pada tingkat Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Langkat dan PIR – ADB Besitang. Pada tingkat Propinsi Sumatera Utara terlihat bahwa selama lima tahun tingkat produktivitas perkebunan besar swasta (tahun 2002) sebesar 19.527 kg/ hektar lebih tinggi dari pada perkebunan besar negara (18.680 kg/ hektar) dan perkebunan rakyat (15.756 kg/ hektar). Akan tetapi masing-masing selama lima tahun menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Kondisi tersebut juga berlaku bagi perkembangan perkebunan di Kabupaten Langkat bahwa posisi perkebunan swasta lebih tinggi dari pada perkebunan negara dan rakyat. Di antara ketiganya, perkebunan rakyat tingkat produktivitasnya paling rendah.

Tabel 4.4. Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit Menurut Jenis Usaha Di Prop. Sumatera Utara, Kab. Langkat dan PIR - ADB Besitang, 1998-2002

No	Uraian/ Komoditi	Produktivitas Perkebunan . (Kg/Ha/Tahun)				
		1998	1999	2000	2001	2002
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Perkebunan Besar Swasta	19.470	19.047	19.038	19.002	19.527
2	Perkebunan Negara	18.600	17.852	17.540	17.593	18.680
3	Perkebunan Rakyat	15.245	15.653	14.437	14.756	15.756
4	PIR - ADB/ Plasma	16.998	22.848	24.021	22.577	24.881
5	Perkebunan Rakyat / Kab. Langkat	11.623*	-	-	-	10.363**
6	Perkebunan Negara /Kab Langkat	14.132*	-	-	-	17.153**
7	Perkebunan Swasta/Kab. Langkat	15.340*	-	-	-	18.500**

Sumber : 1. Dinas Perkebunan Propinsi Sumatera Utara, 2004

2. KUD RATA PIR ADB, 2004

3. BKPM-D-SUMUT; Profil Investasi Kab. Langkat, 2000 (*)

4. BPS. Kab. Langkat; Langkat Dalam Angka 2000 (**)

Akan tetapi, pada Tabel 4.4 tersebut menunjukkan bahwa ternyata tingkat produktivitas di PIR-ADB Besitang jauh lebih tinggi dari pada tingkat produktivitas di perkebunan negara maupun perkebunan swasta baik di tingkat propinsi maupun kabupaten. Menurut penuturan para pengurus KUD PIR – ADB dan para petani plasma, tingginya produktivitas tersebut disebabkan tingkat kesuburan tanah di daerah tersebut, sehingga sangat cocok untuk tanaman kelapa sawit. Kemudian yang lebih utama pengelolaan yang lebih baik yang dilakukan oleh KUD. Pemeliharaan tanaman yang cukup baik ikut meningkatkan produktivitas per hektar. Menurut informasi bahwa kadar minyak/ rendemen dapat mencapai angka “23” yang tidak dapat disamai oleh perkebunan yang lain. Hanya yang sangat disayangkan adalah keterbatasan ketersediaan lahan cadangan di wilayah tersebut yang menyebabkan lahan kelapa sawit di daerah ini tidak dapat diperluas lagi.

Produktivitas kelapa sawit yang masih tinggi dan pemasaran yang terbuka, maka peluang pasar hasil produksi PIR-ADB Besitang masih menggembirakan. Penjualan paska panen produksi kelapa sawit sudah ada yang menampung, yang semula harus melalui PTPN II sebagai perkebunan inti. Kemudian setelah melalui KUD bisa menjual secara bebas hasil produksi tersebut kepada beberapa perusahaan pengolahan TBS dengan sistem tender. Perusahaan yang bisa memberi penawaran harga TBS tertinggi baik milik PTP, perkebunan swasta dan perkebunan rakyat (PIR), sehingga dapat menerima pasokan hasil produksi dari KUD tersebut selama empat bulan.

Perkembangan harga TBS hasil produksi PIR – ADB menunjukkan angka yang fantastik, Pada tahun 2002 sebesar Rp. 652,61 per kg TBS. Dua tahun kemudian tahun 2004 tepatnya pada bulan Mei telah meningkat secara berarti sebesar Rp. 923,- per kg TBS. Harga tersebut sangat tinggi bila dibandingkan dengan harga pasaran umum di Sumatera Utara, harga pada tahun 2002 adalah sebesar Rp. 600,- per kg TBS, kemudian pada tahun 2003 meningkat menjadi Rp. 700,- per kg TBS, dan tahun 2004 meningkat menjadi Rp. 860 per kg TBS (Wawancara Mendalam dengan Pengurus KUD; Kompas, 10 April 2003). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perkebunan kelapa sawit PIR – ADB yang dikelola KUD Rakhmat Tani menunjukkan tingkat keberhasilan yang tinggi. Meskipun pasar dunia juga menjadi penyebab membaiknya harga CPO di bursa minyak nabati dunia di Rotterdam, Belanda.

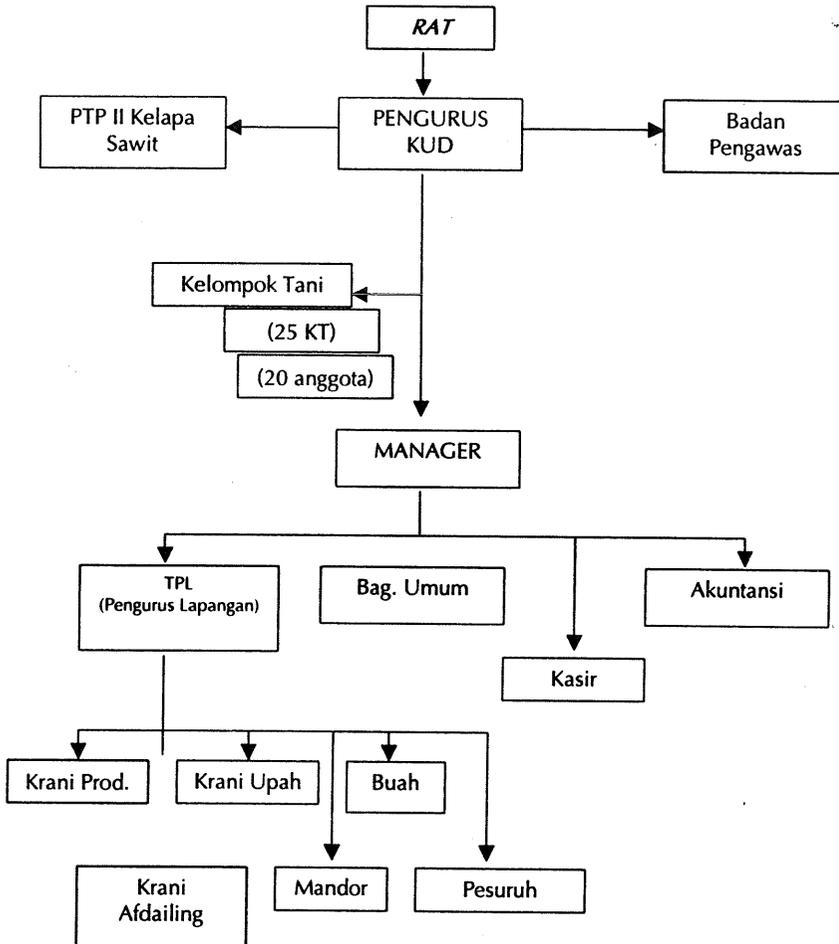
4.7. Penutup

Sejarah perkebunan kelapa sawit telah berlangsung sangat lama, bahkan semenjak zaman penjajahan Belanda yang merupakan perkebunan-perkebunan besar. Setelah kemerdekaan dilanjutkan dengan adanya perkebunan milik negara dan perkebunan besar swasta. Di samping itu, ada perkebunan-perkebunan milik rakyat yang sudah lama berkembang. Pada

akhir tahun 70-an dan awal 80-an muncul adanya program perkebunan kelapa sawit pola PIR yang merupakan kemitraan yang saling menguntungkan antara perkebunan negara atau perkebunan besar swasta dan perkebunan rakyat. Hal dimaksudkan agar perkebunan rakyat bisa terus berkembang dengan produktivitas yang lebih tinggi, membuka kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan petani.

Di daerah Besitang, Kabupaten Langkat pada awal 80-an telah dibuka perkebunan kelapa sawit dengan pola PIR yang disebut PIR-ADB Besitang. Sebagai plasma adalah para petani kelapa sawit dan sebagai inti adalah PTPN. Hubungan antara inti dan plasma sejak awal terjalin cukup baik. Pihak inti dengan modal pinjaman ADB membuka lahan dan menanam bibit serta membina dalam pemeliharaan tanaman. Pinjaman ADB tersebut sebagai pinjaman para petani plasma yang harus dikembalikan dengan diansur setiap menjual hasil TBS. Pemasaran TBS dipasarkan lewat inti, sebab pihak petani plasma belum berpengalaman dalam pemasaran. Setelah sekitar 10 tahun, petani mulai berpengalaman dalam liku-liku pemasaran, pemasaran yang dilakukan inti dianggap agak tertutup dan lebih menguntungkan inti. Pada awal tahun 90-an pengelolaan plasma sampai pemasaran dikelola oleh KUD yang anggotanya para petani plasma. Semenjak dikelola KUD dan lepas dari inti ini kemandirian petani plasma mulai nampak dan sangat dirasakan. Sebab mulai dari pemeliharaan, pemanenan dan pemasaran dilakukan oleh KUD yang para pelakunya adalah anggota dan pengurus koperasi. Pemasaran TBS dilakukan secara terbuka dan melalui tender, sehingga penentuan harga tidak dilakukan sepihak dari pembeli. Oleh karena itu, para petani plasma mendapatkan hasil penjualan yang lebih baik. Petani plasma mendapatkan dua manfaat dari pengelolaan melalui KUD, yaitu menerima bagi hasil yang lebih baik dan menerima upah/ gaji sebagai pekerja di pengelolaan plasma. Namun meskipun para petani peserta plasma telah mandiri masih ada komunikasi dengan pihak inti, antara lain dalam hal teknis penanaman dan pemeliharaan kebun.

KUD RAHMAD TANI PIR-ADB, BESITANG
No./BH. 66/PAD/KWK.2/XII/95/21-12-95



5.1. Pengantar

Sebagai tujuan utama dari penelitian ini adalah mengkaji kondisi dan isu penyerapan tenaga kerja di perkebunan kelapa sawit, yakni di perusahaan inti rakyat. Dalam kajian tersebut juga melihat faktor-faktor yang berkaitan dengan penyerapan tersebut. Antara lain terkait dengan perkembangan usaha, kondisi sosio demografi, kondisi kegiatan di perkebunan kelapa sawit dan kesejahteraan petani. Pada bagian ini menganalisis tentang kondisi penyerapan tenaga kerja di perkebunan kelapa sawit khususnya di daerah penelitian. Data yang digunakan utamanya dari hasil wawancara kuesioner, wawancara mendalam dari para informan dan data sekunder yang tersedia di tingkat desa dan instansi terkait. Fokus kajian meliputi variasi kegiatan di PIR-ADB Besitang, dinamika penyerapan tenaga kerja, karakteristik sosio demografi pekerja perkebunan, kesejahteraan rumah tangga petani pekebun dan strategi kelangsungan hidupnya.

5.2. Kegiatan di Perkebunan Kelapa Sawit

Kegiatan di perkebunan plasma kelapa sawit di Desa PIR-ADB Besitang dapat dipilah menjadi 3 tahapan. Masing-masing tahap tersebut memiliki jenis kegiatan yang berbeda-beda dan penyerapan jumlah tenaga kerja yang berbeda-beda. Tahap pertama adalah kegiatan yang terjadi pada awal penyiapan plasma kelapa sawit pada tahun 1981/1982, yaitu dari pembibitan sampai penanaman bibit. Tahap kedua merupakan kegiatan tahun I, II dan III (tahun 1982, 1983 dan 1984) yang lebih berfokus pada pemeliharaan, pemupukan dan pembrantasan hama. Ketika itu di plasma belum ada kegiatan memanen. Tahap ketiga (tahun 1985 sampai sekarang) merupakan tahun-tahun mulai ada kegiatan memanen TBS (Tandan Buah Segar) di plasma. Dalam tahapan ini jenis kegiatannya lebih banyak dan variatif. Dalam tulisan berikut secara sekilas akan diuraikan kegiatan pada tahap pertama dan kedua, selanjutnya akan lebih banyak diuraikan kegiatan pada tahap III, sebab fokus studi ini lebih melihat pada kegiatan pekerja atau petani peserta PIR pada tahapan setelah plasma ada kegiatan memanen TBS.

Dalam kegiatan pada tahap III akan diuraikan jenis-jenis kegiatan yang biasa dilakukan di lahan plasma. Kemudian juga diuraikan kegiatan pada seminggu terakhir dilahan plasma. Informasi kegiatan yang biasa dilakukan

di lahan plasma diperoleh melalui wawancara mendalam dengan manajer kebun, para mandor dan para pekerja. Sedangkan informasi kegiatan pada seminggu terakhir diperoleh dari wawancara yang menggunakan kuesioner dan wawancara mendalam dengan para pekerja.

Tahap pertama (tahun 1981/1982)

Kegiatan tahap I merupakan jenis kegiatan di plasma kelapa sawit pada tahun awal (tahun 1981/1982). Kegiatan-kegiatan tersebut meliputi antara lain :

1. Pembibitan,
2. Penebangan hutan (land clearing),
3. Pengolahan tanah termasuk menyemprot alang-alang,
4. Pembangunan kacang penutup tanah,
5. Pembuatan jalan kebun utama,
6. Pembuatan saluran air utama/ drainage,
7. Pemancangan dan melubang untuk benih dan penanaman bibit kelapa sawit.

Semua kegiatan ini dikelola oleh perusahaan inti (PTPN II), sedangkan tenaga kerjanya sebagian besar masih berasal atau didatangkan dari luar lokasi dan sebagian lain adalah calon peserta plasma PIR-ADB Besitang. Mereka mendapatkan upah sebagai pekerja lapangan. Besarnya upah dan sistem pengupahannya bervariasi menurut jenis pekerjaan yang dilakukan.

Tahap kedua (tahun 1982-1984)

Kegiatan pada tahap II merupakan tahun pertama, kedua dan ketiga (tahun 1982, 1983, 1984) setelah penanaman bibit. Pada tahun-tahun tersebut tanaman kelapa sawit belum menghasilkan TBS. Jenis kegiatan yang dilakukan di kebun plasma antara lain adalah :

1. Pengendalian alang-alang sebagai tanaman pengganggu.
2. Pemeliharaan meliputi mengerjakan piringan dan membuat teras, membuat kacang, membuat parit, jalan kebun dan saluran.
3. Pemupukan
4. Pembrantasan hama
5. Penunasan

Semua kegiatan di plasma masih dikelola dan dikendalikan oleh perusahaan inti. Namun tenaga kerja yang diikutkan sudah mulai banyak menggunakan para peserta plasma. Mereka dipekerjakan dan diupah seperti pekerja yang sifatnya harian atau borongan dan dibayar 2 minggu sekali. Besarnya upah bervariasi tergantung jenis pekerjaan yang dilakukan dan lama jam kerjanya.

Tahap ketiga (1985 – sekarang)

Kegiatan tahap III merupakan kegiatan mulai tahun ke empat dan seterusnya atau tahun-tahun mulai dapat memanen TBS. Semua kegiatan di plasma ini masih dikelola oleh perusahaan inti sampai tahun 1991. Kemudian pada tahun 1992 sampai sekarang dikelola oleh KUD Rahmat Tani. Pelaksanaan di plasma dipimpin oleh seorang manajer (disebut manajer kebun) dan dibantu oleh ketua kelompok dan mandor lapangan. Adapun kegiatan yang selama dilakukan di plasma cukup banyak antara lain :

1. Miringi – kegiatan menyingi di piringan pohon kelapa sawit. Kegiatan tersebut dilakukan oleh 20 kelompok tani yang masing-masing antara 20 - 25 orang. Kegiatan dikoordinir dan diawasi oleh seorang mandor yang disebut mandor penyiangan. Tenaga kerjanya campuran laki-laki dan perempuan tergantung siapa yang kebetulan bersedia. Alat yang digunakan biasanya parang babat, untuk membersihkan rumput atau tanaman di sekitar pangkal pohon kelapa sawit. Jam kerjanya hanya dilakukan pada pagi hari antara pukul 7.00 – 10.00. Upah mereka adalah Rp 5 000,- per hari/ orang. Dalam satu tahun dilakukan sekali selama 45 hari.
2. Memupuk – kegiatan pemupukan pada sekitar pokok tanaman kelapa sawit, pupuk yang digunakan biasanya pupuk buatan pabrik. Kegiatan ini dilakukan oleh 20 kelompok tani, terdiri dari tenaga kerja laki-laki dan perempuan. Kegiatan dikoordinir dan diawasi oleh seorang mandor pemupukan. Jam kerjanya dari pukul 7.00 – 10.00 pagi. Upahnya sebesar Rp 5 500 per hari/ orang. Satu tahun dilakukan 8 kali, masing-masing perlu 7 hari.
3. Pembrantasan hama – kegiatan melakukan penyemprotan racun ke tanaman kelapa sawit yang terkena hama. Kegiatan tersebut dilakukan pada pukul 22.00 – 2.00 dini hari. Kegiatan harus dilakukan pada malam hari agar pembasmian lebih efektif karena biasanya para hama termasuk ulat keluar pada malam hari. Upah dihitung harian, yaitu Rp 15.000,-/3 HK.
4. Nunas – kegiatan melepas anak kayu dan pelepah pada pohon kelapa sawit. Kegiatan ini dilakukan oleh 20 kelompok tani, biasanya hanya dilakukan oleh tenaga kerja laki-laki sebab pekerjaannya cukup berat. Kegiatan dikoordinir dan diawasi oleh seorang mandor penyiangan. Alat yang digunakan adalah parang dodos. Kegiatan tersebut dilakukan mulai dari pukul 14.00 – 17.00. Upahnya sebesar 6,5 HK (hari kerja) atau sekitar Rp 33 000,- per hari/ orang. Kegiatan tersebut dilakukan selama 8 bulan dan jumlah harinya tidak tentu tergantung kondisi lapangan.

5. Mbabat – kegiatan membersihkan di sekitar piringan pohon kelapa sawit. Kegiatan dilakukan oleh 20 kelompok tani. Pekerjaan ini cukup berat, oleh karena itu tenaga yang melakukan laki-laki. Kegiatan dikoordinir oleh seorang mandor penyiangan. Jam kerjanya dilakukan dari pukul 7.00 – 10.00. Alat yang digunakan adalah parang babat. Upah per harinya sebesar Rp 5 000,- per orang. Satu tahun dilakukan 8 kali, masing-masing perlu 20 hari.
6. Memanen – kegiatan menanggalkan tandan kelapa sawit dari tangkainya di pohon. Pekerjaan ini cukup berat sebab makin tua usia pohon makin tinggi buah yang harus dipetik. Mereka harus memotong tangkai buah dengan menggunakan galah bambu yang ujungnya dipasang arit egrek. Tinggi tangkai buah bisa mencapai di atas 10 m dari tanah, di samping cukup berat mengangkat dan menggerakkan galah juga cukup berbahaya karena bisa tertimpa tandan kelapa sawit apabila tidak trampil dan hati-hati. Kemudian dari sekitar pohon TBS diangkat dengan alat angkong (gerobak satu roda) ke pinggir jalan untuk mendekati ke truk angkutan barang. Oleh karena itu, kegiatan ini hanya dilakukan oleh laki-laki yang masih muda dan tenaganya kuat. Pemanen dilakukan oleh 20 kelompok tani. Kegiatan dikoordinir oleh seorang mandor panen. Jam kerjanya cukup panjang, yaitu dari pukul 7.00 – 13.00. Upahnya sebesar Rp 485,-/ tandan atau 40 – 100 tandan per hari per pasang (2 orang). Biasanya pemanenan dilakukan berpasangan (2 orang) saling bergantian mengangkat alat dan apabila menarik tandannya cukup berat dilakukan berdua. Di PIR – ADB ini meskipun usia pohon sudah 22 tahun masih cukup tinggi produktivitasnya. Panen dilakukan terus-menerus dalam satu tahun, dalam satu minggu hanya 5 hari kerja memanen. Kegiatan tersebut dilakukan secara rotasi yang berpindah-pindah dari kawasan pohon (afdeling) satu ke kawasan lainnya. Di lokasi ini ada 4 kawasan (afdeling), yaitu afdeling I, II, III dan IV.
7. Brondol – kegiatan mengumpulkan biji-biji kelapa sawit yang lepas (rontok) dari tandannya sebagai akibat dari jatuhnya tandan tersebut dari tangkainya waktu dipetik. Kegiatan ini tidak begitu berat dan biasanya dilakukan oleh tenaga kerja perempuan. Sedangkan jam kerja menyesuaikan dengan kegiatan memanen, sebab kegiatan ini harus mengikuti pekerjaan memanen. Upahnya sebesar Rp 70,-/kg, per orang rata-rata bisa mencapai 100 kg per hari. Kegiatan ini juga dilakukan terus menerus selama 12 bulan dan tiap minggu 5 hari kerja.

8. Ngubu – kegiatan para pekerja mengangkut TBS dari plasma sampai ke pabrik, yaitu menaikan dan menurunkan TBS dari mobil truk pengangkut. Jumlah tenaganya tidak tentu antara 2 – 4 orang. Upah yang diterima harian Rp 7 500/ hari kerja.
9. Lalang – kegiatan membersihkan rumput alang-alang di plasma. Kegiatan dilakukan oleh 20 kelompok tani yang tenaga kerjanya laki-laki dan perempuan. Kegiatan dikoordinir dan diawasi oleh seorang mandor lalang. Alat yang digunakan adalah parang babat yang dapat digunakan untuk menebas rumput alang-alang. Jam kerja mereka adalah dari pukul 7.00 – 10.00, upahnya sebesar Rp 5 000,- per hari/ orang. Setahun kegiatan ini dilakukan 8 kali.
10. Membersihkan parit – kegiatan ini juga dilakukan oleh 20 kelompok tani, tenaga kerja biasanya laki-laki. Kegiatan dikoordinir dan diawasi oleh seorang mandor pasar (pasar artinya jalan-jalan yang ada di plasma). Jam kerja adalah dari pukul 7.00 – 10.00. Alat yang biasa digunakan adalah cangkul dan parang. Upahnya sebesar Rp 5 000,- per hari/ orang. Kegiatan dilakukan setahun 2 kali.
11. Pasar – kegiatan membersihkan jalan di plasma. Kegiatan dilakukan oleh 20 kelompok tani dan kebanyakan dilakukan laki-laki. Kegiatan dikoordinir dan diawasi oleh mandor pasar. Jam kerjanya adalah dari pukul 7.00 – 10.00. Alat yang digunakan adalah cangkul. Upahnya sebesar Rp 5 000,- per hari/ orang. Tiap bulan dilakukan dalam 6 hari kerja.

Di samping itu, ada kegiatan lain lagi antara lain mokat, ndongkel, nguler dan ngupu. Mokat adalah kegiatan pembuatan lubang tanah di sekitar tanaman kelapa sawit untuk menebar pupuk. Upah per harinya sebesar Rp 5 000,-. Ndongkel adalah kegiatan membersihkan tunggul/ bonggol tanaman lama, upahnya per hari Rp 5 000,-. Nguler adalah kegiatan membersihkan kepompong/ ulat pengganggu tanaman kelapa sawit yang biasanya sembunyi di bawah akar, upahnya per hari Rp 5.000,-. Ngupu adalah kegiatan mencari dan menangkap kupu dengan menggunakan alat lampu petromaks. Biasanya dilakukan pada malam hari antara pukul 19.00 – 21.00, upahnya per hari Rp 7.500,-.

Dalam bagian tulisan ini, di samping menyajikan kegiatan di plasma dalam satu tahun, juga dikemukakan tentang kegiatan di plasma selama satu minggu terakhir. Dengan menggunakan daftar pertanyaan penelitian ini menanyakan kepada para petani peserta PIR-ADB untuk mengungkap potret kegiatan pada seminggu terakhir di plasma.

Kegiatan seminggu terakhir yang paling banyak dilakukan di plasma adalah pekerjaan memanen. Ini terbukti sekitar 90 persen responden mengatakan bahwa kegiatan seminggu terakhir di plasma sedang memanen kelapa sawit. Kegiatan memanen kelapa sawit di daerah penelitian memang dilakukan sepanjang tahun, setiap bulan, meskipun tidak dilakukan setiap hari. Dalam seminggu hanya ada 5 hari kerja untuk melakukan kegiatan memanen. Kebijakan 5 hari kerja memanen ini dilakukan untuk menjaga kualitas hasil panen agar buah yang dipetik betul-betul sudah matang. Meskipun pohon kelapa sawit di daerah penelitian telah berusia 22 tahun, namun sampai saat ini produksinya masih tinggi dan hasil panen masih dalam kondisi puncak. Hasil produksi pada tahun 2003 mencapai sekitar 25 ton/hektar, sedangkan randemen sebesar 23. Hal ini disebabkan karena pemeliharaan yang cukup baik. Walaupun sebagian besar responden mengatakan kegiatan di plasma adalah memanen bukan berarti satu-satunya kegiatan hanya memanen. Ada kegiatan-kegiatan lain di plasma antara lain pemeliharaan yang meliputi miringi, nunas, babat dan sebagainya. Ada sebagian kecil responden yang menyebutkan sedang menanam. Ini bukan kegiatan menanam di lahan plasma, tetapi kegiatan menanam bibit tanaman kelapa sawit di lahan foodcrop atau ladang mereka.

Dari kegiatan-kegiatan tersebut menunjukkan bahwa usaha perkebunan kelapa sawit di Desa PIR-ADB telah dilakukan dengan benar dan mengikuti teknologi perkebunan pada perusahaan besar (PTPN), sehingga telah menciptakan kegiatan yang cukup banyak. Kegiatan yang cukup banyak di plasma tersebut membutuhkan tenaga kerja yang tidak sedikit dan terus-menerus sepanjang tahun, sebab setiap bulan dan minggu selalu ada kegiatan di plasma. Hanya tenaga kerja yang digunakan tidak semuanya petani peserta plasma, sebab tidak semua petani peserta siap dan mau bekerja di plasma PIR-ADB. Namun dapat menggunakan tenaga kerja dari luar petani peserta, antara lain anggota rumah tangga petani peserta dan juga tenaga buruh di luar petani peserta. Fenomena ini menunjukkan bahwa dengan adanya kegiatan di plasma kelapa sawit, tidak hanya memberikan kesempatan kerja bagi sebagian besar petani peserta, tapi juga memberikan kesempatan kerja bagi anggota rumah tangganya dan bahkan kepada penduduk atau tenaga kerja di luar petani peserta PIR. Tenaga kerja dari luar petani peserta ini adalah para pendatang baru, yang masuk ke Desa PIR-ADB karena terbuka kesempatan kerja.

5.3. Dinamika Penyerapan Tenaga Kerja di Perkebunan Kelapa Sawit

Dalam subbab sebelumnya kegiatan di plasma perkebunan kelapa sawit dari awal persiapan sampai sekarang dibedakan menurut 3 tahapan, yaitu tahap persiapan, tahap sebelum panen dan tahap setelah mulai memanen. Namun pada subbab dinamika penyerapan tenaga kerja di

perkebunan kelapa sawit dikelompokkan dalam dua tahapan, yaitu tahap pertama : selama dikelola perkebunan inti (1982-1991) atau sebelum dikelola KUD; dan tahap kedua : selama plasma dikelola KUD Rahmat Tani hingga sekarang. Dua tahapan tersebut dipilih mengingat peran KUD cukup penting dalam pengelolaan plasma dan keberhasilan usaha PIR perkebunan kelapa sawit serta mampu memanfaatkan dan menyerap tenaga kerja yang cukup banyak. Munculnya kesempatan-kesempatan kerja baru juga setelah plasma dikelola oleh KUD Rahmat Tani. Secara rinci tahapan penyerapan tenaga kerja tersebut dapat dijelaskan dalam uraian berikut.

Tahap pertama (tahun 1982-1991)

Perkebunan kelapa sawit PIR-ADB Besitang sebagaimana disebutkan dalam subbab sebelumnya mulai dibuka pada tahun 1981/1982. Kemudian pada tahun berikutnya ada kegiatan penanaman bibit, pemeliharaan sampai panen diikuti oleh 500 orang peserta yang masing-masing sebagai kepala keluarga. Sehingga luas areal yang khusus untuk plasma perkebunan kelapa sawit adalah sebesar 1000 ha. Berdasarkan informasi dari kepala desa PIR-ADB dan pengurus KUD Rahmat Tani menunjukkan bahwa 500 orang petani plasma tersebut terdiri dari 125 orang pensiunan PTPN II, 125 orang dari penduduk setempat yang semula para penggarap lahan perladangan di daerah tersebut, dan 250 orang para pemohon yang pada umumnya para pendatang. Para pemohon tersebut langsung mengajukan permohonan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat. Salah satu syarat untuk menjadi petani peserta adalah para calon tersebut harus mau menjadi tenaga kerja di plasma. Oleh karena itu, jumlah tenaga kerja pada awal PIR kelapa sawit di PIR-ADB Besitang tersebut adalah sebanyak 500 orang.

Pada tahun 1982-1991 seluruh kegiatan di plasma perkebunan kelapa sawit tersebut dikelola oleh PTPN II sebagai perusahaan inti. Sedangkan tenaga kerja utamanya diambil dari para petani peserta. Pendapatan petani sejak tahun 1982 berasal dari imbal jasa atau upah tenaga yang mereka berikan dalam kegiatan di plasma kelapa sawit. Untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, di samping mendapatkan upah petani peserta juga mendapatkan jatah jadup (jaminan hidup) dan fasilitas perumahan dari proyek PIR. Mulai tahun 1985 plasma perkebunan kelapa sawit sudah mulai memproduksi, sehingga petani peserta mulai menerima uang dari hasil panen plasma kelapa sawit atau hasil penjualan TBS. Sejak tanaman kelapa sawit di plasma sudah mulai memproduksi, petani peserta berkewajiban untuk mengangsur kredit pembelian lahan sawit yang mereka miliki. Untuk mempermudah sekaligus menjamin terpenuhinya angsuran, maka hasil plasma harus dijual kepada perusahaan inti dengan harga yang telah ditentukan. Setiap bulan petani peserta menerima rekap hasil penjualan sawit berikut menerima hasil bersih sawit setelah dikurangi uang angsuran

kredit. Cara pembayaran angsuran ini berlangsung terus sampai semua kredit lunas dan selama kredit belum lunas, sementara sertifikat tanah ditahan di bank sebagai agunan.

Tahap kedua (1992-sekarang)

Mulai tahun 1992 sampai sekarang pengelolaan perkebunan kelapa sawit di Desa PIR-ADB, Kecamatan Besitang tidak ditangani lagi oleh perusahaan inti, namun dilakukan secara communal melalui KUD. Sistem communal adalah pengelolaan lahan dalam suatu hamparan dalam satu manajemen, di mana lahan plasma dijadikan sebagai saham dan dikelola oleh KUD secara profesional. Bagi hasil yang diterima para petani peserta berasal dari keseluruhan lahan. Sedangkan uang bagi hasil yang diterima masing-masing petani peserta didasarkan pada satuan luas lahan yang dimiliki tanpa memperhitungkan tingkat produktivitasnya. Pengelolaan lahan diserahkan sepenuhnya kepada KUD Rahmat Tani yang dalam hal ini dapat disebut sebagai farm manager (manajer kebun) perkebunan kelapa sawit PIR-ADB. Seluruh kegiatan usaha di plasma kelapa sawit seperti pemupukan, penyiangan, pemberantasan hama/ penyakit tanaman, pemanenan, rekrutmen tenaga kerja sampai pemasaran dikelola oleh KUD. Untuk membahas tentang gambaran tenaga kerja di perkebunan kelapa sawit pola PIR-ADB setelah dikelola KUD, dalam pembahasan tentang penyerapan tenaga kerja berikut akan dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu : (1). tenaga kerja yang terserap di KUD (pengurus dan karyawan KUD); (2) tenaga kerja di plasma sebagai buruh harian lepas; dan (3) para petani peserta plasma.

Tenaga Kerja sebagai Pengurus KUD

Jumlah tenaga kerja yang terserap sebagai pengurus KUD Rahmat Tani di Desa PIR-ADB Besitang sebanyak 5 orang dan 3 orang anggota badan pengawas. Pengurus KUD tersebut sebenarnya merupakan 'farm manager' yang bertugas untuk mengelola plasma perkebunan kelapa sawit. Kelima pengurus KUD tersebut terdiri dari Ketua I, Ketua II, Sekretaris I, Sekretaris II, dan Bendahara. Pengangkatan pengurus tersebut dilakukan melalui pemilihan langsung oleh anggota sesuai dengan AD/ART koperasi pada pasal 9 ayat 1, yang menyebutkan bahwa pengurus koperasi dipilih dari dan oleh anggota dalam rapat anggota. Anggota KUD adalah seluruh petani peserta PIR sebanyak 500 orang. Salah satu syarat untuk dapat menjadi pengurus adalah berpendidikan minimal SLTA. Sedangkan masa tugas pengurus koperasi adalah selama 5 tahun dan selebihnya dapat dipilih kembali.

Dalam prakteknya persyaratan tingkat pendidikan untuk pengurus tersebut sebagaimana disebutkan dalam AD/ART ternyata belum sepenuhnya ditaati (Tabel 5.1). Hal ini dapat tercermin dari sebagian pengurus KUD saat ini masih ada yang berpendidikan SLTP, yaitu ketua I, ketua II dan bendahara. Hanya sekretaris I dan II memiliki latar belakang pendidikan SMA. Menurut informan dan anggota KUD sebetulnya persyaratan menjadi pengurus utamanya adalah kejujuran dalam bekerja. Selain itu, keberhasilan pengurus selama periode kepengurusan sebelumnya membuat tingkat kepercayaan anggota menjadi tinggi. Oleh sebab itu, ketentuan yang termuat dalam AD/ART tersebut untuk sementara ini tidak diberlakukan secara mutlak dan masih dapat disesuaikan dengan keadaan di lapangan.

Tabel 5.1 : Pengurus KUD Rahmat Tani Menurut Tingkat Pendidikan, Desa PIR-ADB Besitang, 2004

No	Jabatan	Pendidikan
(1)	(2)	(3)
1	Ketua – I	SGB
2	Ketua – II	SMP
3	Sekretaris – I	SMA
4	Sekretaris – II	SMA
5	Bendahara	SMP

Sumber : Kantor KUD Rahmat Tani, 2004

Pengurus KUD ini tidak menerima gaji, akan tetapi menerima uang jasa yang besarnya sesuai dengan keputusan rapat anggota sebagaimana tercantum dalam pasal 13 AD/ART koperasi. Akan tetapi karena saat ini KUD Rahmat Tani berada dalam kondisi yang stabil dan mendapatkan hasil yang cukup tinggi, maka uang jasa yang diberikan kepada pengurus juga cukup besar, dan dapat diberikan setiap bulan. Dalam menjalankan tugasnya pengurus KUD diawasi oleh badan pengawas yang berjumlah 3 orang yang terdiri dari ketua pengawas, sekretaris dan anggota. Para pengawas KUD tersebut semuanya adalah laki-laki. Latar belakang pendidikannya ketua dan anggota pengawas tersebut semuanya SMP. Adapun pendidikan sekretaris pengawas adalah STM.

Meskipun setiap lima tahun sekali dilakukan pemilihan kepengurusan KUD yang baru, namun sampai beberapa periode ini pengurus KUD Rahmat Tani masih dijabat oleh orang yang sama. Hal ini disebabkan karena kinerja pengurus saat ini masih dianggap cukup bagus dan dapat memuaskan sebagian besar anggota. Kepercayaan masyarakat dapat dilihat dari penuturan salah seorang warga sebagai berikut :

“.... Pengurus saat ini lebih jujur dan terpercaya terbukti pendapatan yang kami peroleh dari sawit cukup memuaskan. Jika dibanding dengan calon-calon lain yang selama ini mencalonkan perilaku pengurus saat ini memang juga lebih terpercaya. Misalnya calon lain ada yang suka berjudi (main kartu), tetapi pengurus yang saat ini tidak pernah melakukannya. Tetapi hal yang paling penting adalah pada saat pengurus ini menjabat, tidak pernah terjadi masalah keuangan dan laporan selalu beres...”

Pengurus KUD merupakan farm manager sehingga mereka merupakan penanggung jawab tertinggi dalam mengelola KUD. Dalam AD/ART disebutkan bahwa pengurus KUD diantaranya bertugas untuk :

- a. Memimpin organisasi dan perusahaan koperasi.
- b. Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama koperasi.
- c. Mewakili koperasi di hadapan dan di luar pengadilan.
- d. Mengelola koperasi dan usahanya.
- e. Mengajukan rencana kerja serta rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi.

Tenaga kerja sebagai karyawan KUD

Jumlah tenaga kerja yang terserap sebagai karyawan di KUD Rahmat Tani sebanyak 77 orang. Pada pasal 21 AD/ART koperasi tersebut menyebutkan bahwa pengurus dapat mengangkat pengelola (manajer) apabila memang dibutuhkan sejalan dengan perkembangan koperasi. Dalam realisasinya pengurus telah mengangkat 1 orang manajer koperasi dan 76 orang karyawan di bawah manajer untuk menjalankan pekerjaan sehari-hari KUD. Jumlah karyawan yang diangkat ini memang cukup besar, tetapi cukup efektif mengingat KUD Rahmat Tani telah memiliki beberapa unit usaha. yaitu : unit waserda, unit angkutan, unit saprodi, unit usipa, unit gallon, unit PLN, dan unit pembelian TBS non PIR.

Karyawan KUD Rahmat Tani ditempatkan dalam beberapa unit usaha dengan tugas dan tanggung jawab tertentu. Menurut jenis jabatannya karyawan KUD dapat dibedakan menjadi manajer, kepala unit, krani, mandor, ketua kelompok, mantri hama, penerima buah, keamanan dan karyawan lain yang bersifat mendukung unit-unit tersebut. Manajer adalah orang yang diangkat oleh pengurus untuk mengurus seluruh kegiatan operasional harian KUD dan bertanggung jawab secara langsung dengan pengurus. Kepala unit adalah karyawan yang berada di bawah manajer dan menjadi penanggung jawab operasional unit-unit usaha KUD. Terdapat 6 kepala unit di KUD yaitu kepala Unit BBM, Unit Simpan Pinjam (Usipa), Unit Warung Serba Ada (Waserda), Unit Angkutan, Unit TBS non PIR, dan Unit Sarana Produksi (Saprodi). Krani

merupakan karyawan di bawah manajer yang bertanggung jawab dalam urusan tertentu. Di KUD Rahmat Tani terdapat 7 orang krani, yaitu 2 orang krani afdeling, 2 orang krani upah, 2 orang krani produksi dan 1 orang krani gudang.

Selanjutnya di KUD terdapat 20 orang ketua kelompok, yaitu karyawan yang bertugas untuk mengerahkan dan mengkoordinir anggota kelompok dalam pertemuan-pertemuan tertentu yang terkait dengan kegiatan di plasma. Karyawan KUD lainnya yang sangat berperan dalam pengelolaan kegiatan di plasma adalah mandor. Karyawan ini bertugas untuk mengontrol dan mengkoordinir pelaksanaan pekerjaan di lapangan sesuai dengan bagiannya masing-masing. Di KUD Rahmat Tani terdapat 21 mandor yang terdiri dari 10 orang mandor pemeliharaan tanaman, 3 orang mandor brondolan, 4 orang mandor panen dan 4 orang mandor pasar/jalan. Mantri hama bertugas khusus untuk menanggulangi atau pemberantasan hama menyerang tanaman kelapa sawit. Petugas keamanan bertugas untuk menjaga keamanan sesuai dengan kewenangannya. Kemudian masih ada karyawan lain yang cukup penting perannya adalah tenaga pembantu yang berada di bawah kepala unit usaha maupun mandor. Karyawan-karyawan KUD tersebut merupakan pegawai tetap dan mendapat upah bulanan.

Latar belakang pendidikan para karyawan tersebut cukup bervariasi sesuai dengan tanggung jawab pekerjaannya. Persentase terbanyak (44,1 persen) karyawan berpendidikan SD ke bawah. Mereka adalah para mandor ke bawah. Sedangkan mereka yang berpendidikan SLTA (22,1 persen) umumnya menduduki jabatan kepala unit dan krani, mereka yang berpendidikan SLTP (33,8 persen) kebanyakan hanya menjabat sebagai ketua kelompok kerja. Meskipun tingkat pendidikan tertinggi karyawan KUD hanya SLTA, akan tetapi kinerja para karyawan sudah cukup memuaskan. Selama ini sudah ada jabatan-jabatan yang telah sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Mantri hama dijabat karyawan yang pendidikannya SPMA, mereka telah mendapatkan pengetahuan dan ketrampilan dalam pembrantasan hama ketika di bangku sekolah. Karyawan administrasi pembukuan diserahkan kepada tenaga kerja perempuan yang latar belakang pendidikannya SMEA. Kinerja para karyawan yang cukup baik tersebut dapat juga tercermin dengan tingginya produksi TBS yang dihasilkan.

Dilihat dari segi usia, yang menjadi karyawan di KUD saat ini masih didominasi oleh angkatan kerja yang sudah cukup tua. Hal ini terjadi karena rata-rata penduduk usia muda yang sudah berpendidikan tinggi enggan untuk kembali ke desanya, mereka lebih senang merantau ke tempat lain. Selain itu, para karyawan koperasi tersebut rata-rata masih mampu dan dapat mengerjakan tugas yang dibebankan kepada mereka. Ketika ditanya apakah tidak ada usaha untuk regenerasi mengingat sudah ada sebagian anak muda

yang meneruskan studi ke pendidikan tinggi, salah satu anggota pengawas mengatakan :

“... sebenarnya kami juga sudah pernah mencoba untuk memasukkan anak muda lulusan perguruan tinggi atau SMEA yang mengenal komputer, bahkan rencananya dalam waktu dekat akan dibelikan komputer untuk memperlancar operasional kantor KUD. Tetapi setelah melalui tahap masa percobaan ternyata anak tersebut kurang jujur. Sehingga terpaksa kami keluarkan dari pekerjaannya dan rencana pembelian komputer ditunda lagi...”

Tabel 5.2. Komposisi Karyawan KUD Rahmat Tani Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Jabatan, Desa PIR – ADB Besitang, 2004

No	Keterangan	Jumlah	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)
Tingkat pendidikan			
1	SD ke bawah	34	44,16
2	SLTP sederajat	26	33,77
3	SLTA sederajat	17	22,08
Jenis jabatan			
1	Manajer	1	1,30
2	Kepala unit	6	7,79
3	Krani	7	9,09
4	Ketua kelompok	20	25,97
5	Mandor	21	27,27
6	Mantri hama	2	2,60
7	Keamanan	4	5,19
8	Lainnya	16	20,78
Jumlah		77	100,00

Sumber : Laporan tahunan pengurus KUD Rahmat Tani, 2003

Tenaga kerja harian lepas

Jumlah tenaga kerja yang terserap sebagai tenaga harian lepas di plasma cukup banyak. Tenaga kerja harian lepas merupakan tenaga lapangan yang bekerja di plasma. Mereka adalah tenaga harian tidak tetap yang mendapatkan upah berdasarkan jenis pekerjaannya. Kegiatan yang dilakukan di plasma cukup banyak ada sekitar 15 jenis pekerjaan, meskipun pekerjaan-pekerjaan tersebut tidak perlu dilakukan setiap hari. Jenis pekerjaan tersebut antara lain miringi/ menyiangi, mbabat, nunas, penyemprotan hama,

pemupukan, memanen, mbrondol, ndongkel, moket, nguler, ngupu, bersihkan parit, lalang, masar dsb. Pekerjaan-pekerjaan tersebut yang harus rutin dilakukan dalam satu tahun untuk mendapatkan produktivitas kelapa sawit yang bagus dan sesuai dengan aturan perkebunan modern. Jenis-jenis pekerjaan tersebut umumnya dikerjakan oleh kelompok-kelompok petani/pekerja. Di Desa PIR-ADB telah dibentuk 20 kelompok petani/pekerja dengan jumlah anggota masing-masing antara 20 - 25 orang petani. Masing-masing kelompok dikoordinir oleh 1 orang ketua kelompok yang juga merangkap sebagai anggota. Secara kasar jumlah tenaga kerja yang terserap di plasma perkebunan kelapa sawit di desa ini bisa mencapai 500 orang. Ini menunjukkan bahwa dengan adanya perkebunan tersebut telah memberikan lapangan kerja bagi penduduk di desa tersebut dan sebagian penduduk pendatang. Sebab banyak juga penduduk yang bukan keluarga peserta PIR yang dapat dimanfaatkan.

Ada dinamika atau perubahan penyerapan tenaga kerja di plasma sejak awal sampai sekarang. Pada awal kegiatan di plasma kelapa sawit seluruh pekerjaan dikerjakan oleh petani peserta. Saat ini kegiatan-kegiatan di plasma tersebut tidak hanya dilakukan oleh para petani peserta, tetapi juga telah dilakukan oleh generasi muda/anggota keluarga petani peserta dan para pendatang dari luar. Hal itu terjadi karena petani plasma saat ini rata-rata sudah berusia lanjut sehingga tidak memungkinkan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan di perkebunan yang relatif berat. Para pekerja di perkebunan tersebut sebagian sudah ada yang dilakukan oleh anak-anak muda, sebab orang tua mereka banyak yang sudah tua dan ada juga yang sudah meninggal. Mereka yang mau bekerja di perkebunan tersebut umumnya yang berpendidikan SLTP ke bawah. Namun ada juga sebagian anak muda yang tidak mau bekerja di perkebunan sebagaimana yang dilakukan oleh orang tuanya. Bagi generasi muda yang berpendidikan tinggi mereka lebih senang mencari pekerjaan ke kota, bahkan ada yang sampai ke Malaysia. Ada juga anak-anak muda yang berpendidikan yang masih bertahan tidak bekerja menunggu lowongan kerja yang sesuai dengan tingkat dan bidang pendidikannya. Sebagaimana diungkapkan oleh kepala desa setempat sebagai berikut :

“... saat ini generasi muda rata-rata enggan mengerjakan pekerjaan di sawit, terutama bagi mereka yang sudah berpendidikan SLTA atau perguruan tinggi. Setelah lulus dari sekolah ada diantara mereka yang memutuskan untuk bekerja ke Malaysia atau bekerja di kota-kota di Indonesia. Kebanyakan dari mereka yang setelah lulus kuliah tidak kembali ke desa untuk membangun desanya...”.

Ketidakmauan generasi muda bekerja di perkebunan kelapa sawit tersebut nampaknya berimplikasi pada situasi ketenagakerjaan di Desa PIR-ADB.

Implikasi tersebut adalah adanya penduduk dari luar yang datang ke desa ini untuk bekerja di perkebunan kelapa sawit. Namun di sisi lain masih terdapat pengangguran anak muda di desa ini. Data desa menunjukkan bahwa pada saat ini (2004) jumlah penduduk dalam usia kerja di desa ini sebanyak 1.346 orang dan jumlah pencari kerja masih sebanyak 135 orang atau sekitar 10 persen. Persentase ini cukup tinggi jika dibandingkan dengan tingkat pengangguran nasional tahun 2003 yang mencapai 9,8 persen. Namun harus diingat bahwa jumlah 135 orang tersebut tidak sepenuhnya betul-betul menganggur, sebagian dari mereka ada yang sambil mencari kerja tapi juga ikut melakukan pekerjaan di kebun atau membantu orang tuanya melakukan kegiatan di luar perkebunan. Kurangnya partisipasi sebagian generasi muda dalam kegiatan di perkebunan telah menarik para pendatang yang senang bekerja di pertanian dan perkebunan masuk ke desa ini. Para pendatang dari luar desa tersebut diperlakukan cukup baik oleh masyarakat setempat. Ada pendatang yang dapat membeli lahan foodcrop atau pekarangan para petani peserta, bahkan ada pendatang yang diberikan lahan pekarangan untuk bertempat tinggal. Ada juga pendatang yang disuruh menempati bekas rumah petani peserta yang telah meninggalkan Desa PIR - ADB.

Kemudian mengenai pengupahan, upah yang diberikan kepada para tenaga harian lepas tersebut menggunakan sistem harian, namun dibayarkan setiap tanggal 15 setiap bulan. Besarnya upah untuk masing-masing jenis pekerjaan di plasma tersebut agak berbeda-beda menurut lama dan beban pekerjaannya (Tabel 5.3). Namun besarnya upah per hari berkisar antara Rp 5.000,- sampai Rp 7.500,- dan lama bekerja hanya sekitar 4 – 5 jam per hari.

Tabel 5.3 : Jenis Pekerjaan Yang Dilakukan Oleh Tenaga Kerja Harian Lepas Dan Besar Upah Yang Diberikan, Desa PIR – ADB Besitang, 2004

No	Jenis pekerjaan	Upah (Rp)
(1)	(2)	(3)
1	Miringi/ menyang	5.000,-/HK
2	Moket	5.000,-/HK
3	Ndongkel	5.000,-/HK
4	Mbabat	5000,-/HK
5	Nunas	5.000,-/HK
6	Nguler	5000,-/HK
7	Mbrondol	70,-/kg
8	Memanen	485,-/TBS
9	Ngupu	7.500,-/HK
10	Penyemprotan hama	5.000,-/HK
11	Pemupukan	5.500,-/HK
12	Bersihkan parit	5.000,-/HK
13	Ngubu sawit	7.500,-/HK
14	Lalang	5.000,-/HK
15	Masar/ bersihkan jalan	7.500,-/HK

Sumber : KUD Rahmat Tani Besitang, 2004

Tenaga kerja di plasma

Jumlah petani peserta di Desa PIR-ADB dari awal sampai saat ini memang tetap jumlahnya, yakni hanya 500 orang. Latar belakang status kegiatan ekonomi para petani peserta sebelum menjadi peserta memang berbeda-beda. Sekitar 80 persen para petani peserta tersebut ternyata sudah bekerja (Tabel 5.4). Mereka ada yang bekerja sebagai petani ladang, petani kebun, karyawan PTPN dan pekerjaan lainnya. Mengapa mereka harus pindah pekerjaan sebagai petani peserta PIR. Pada umumnya karena alasan ekonomi, mereka ingin meningkatkan pendapatan atau menginginkan kehidupan yang baik. Pada waktu itu mereka menganggap bahwa kehidupan di plasma perkebunan kelapa sawit cukup menjanjikan, karena akan mendapatkan lahan perkebunan yang siap menghasilkan. Sekitar 20 persen lainnya adalah mereka yang belum/ tidak bekerja. Mereka adalah kaum muda yang pada waktu itu masih sekolah dan mereka belum menikah serta sedang mencari pekerjaan. Di samping itu, ada juga yang sebelum menjadi petani peserta hanya sebagai anggota rumah tangga. Sebelumnya orang tuanya yang menjadi petani peserta, karena orang tuanya telah lanjut usia atau telah meninggal dunia anak-anak muda yang belum pernah bekerja tersebut yang menggantikannya.

Mengenai ada tidaknya pekerjaan tambahan, di luar pekerjaan pokok sebagai petani peserta ternyata sebagian besar (91 persen) dari mereka mengaku tidak memiliki pekerjaan tambahan (Tabel 5.4). Hanya sekitar 9 persen petani peserta yang memiliki pekerjaan tambahan. Di antara mereka yang memiliki pekerjaan tambahan tersebut, kebanyakan jenis pekerjaannya juga sebagai petani, yaitu sebagai petani tanaman pangan dan kebun di lahan foodcrop dan pekarangan. Meskipun sebagian besar dari para peserta tersebut mengaku tidak memiliki pekerjaan tambahan, namun dalam rumah tangga mereka ada yang memiliki usaha atau pekerjaan lain.

Tabel 5. 4 : Status Kegiatan Ekonomi Sebelum Menjadi Petani Peserta dan Jenis Pekerjaan Tambahan, Desa PIR-ADB Besitang, 2004

No	Keterangan	Jumlah	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)
<i>Status bekerja sebelum menjadi plasma</i>			
1	Bekerja	120	80,00
2	Tidak bekerja	30	20,00
<i>Pekerjaan tambahan saat ini</i>			
1	Profesional	1	0,67
2	Petani kelapa sawit di luar plasma	6	4,00
3	Petani tanaman pangan	5	3,33
4	Operator	1	0,67
5	Tidak ada pekerjaan tambahan	137	91,33
Jumlah		150	100,00

Sumber : Data Primer Penelitian Tenaga Kerja Sumatera Utara, PPK-LIPI, 2004.

Pengaruh ganda PIR-ADB

Keberadaan plasma perkebunan kelapa sawit Desa PIR-ADB Besitang ternyata juga mempunyai pengaruh ganda (multiplier effect) terhadap muncul dan tumbuhnya kesempatan kerja yang lain, baik usaha-usaha di sektor pertanian maupun di luar pertanian. Menurut Iskandar A.N (2003) efek ganda pada pengembangan PIR-BUN terjadi pada output, pendapatan dan kesempatan kerja bagi penduduk. Pengembangan PIR-BUN juga mendorong pertumbuhan seluruh sektor ekonomi. Sektor-sektor yang tumbuh dan muncul di Desa PIR-ADB Besitang antara lain perdagangan, transportasi, komunikasi, pendidikan, kesehatan dan jasa kemasyarakatan. Munculnya sektor-sektor tersebut sebagai dampak dari keberadaan dan berkembangnya perkebunan PIR-ADB Besitang. Sektor-sektor tersebut memang dibutuhkan oleh masyarakat Desa PIR-ADB dan sektor-sektor yang mendukung pengembangan usaha perkebunan.

Dari data monografi desa menunjukkan bahwa petani peserta PIR kelapa sawit sebanyak 500 orang (60 persen). Jumlah petani peserta PIR ini memang sejak awal program PIR tidak mengalami perubahan. Kemudian mereka yang statusnya sebagai petani non-PIR dan kebanyakan juga bekerja di plasma sebanyak 249 orang (30 persen). Di desa ini ada lebih dari 100 orang (10 persen) memiliki usaha/ pekerjaan di luar perkebunan dan pertanian pangan. Di Desa PIR-ADB tersebut selama ini sudah terdapat usaha perdagangan, seperti pasar desa, toko-toko dan kedai. Usaha jasa meliputi bengkel kendaraan bermotor, jasa pendidikan Sekolah Dasar Negeri dan SMP swasta, jasa kesehatan dengan adanya Puskesmas Pembantu dan usaha-usaha lainnya. Oleh sebab itu, dengan munculnya usaha-usaha di luar perkebunan tersebut telah memberikan kesempatan kerja bagi penduduk sebagai pedagang (lebih 30 orang), tenaga guru (sekitar 20 orang), tenaga bengkel (8 orang), tenaga medis (2 orang), tenaga angkutan (30 orang), jasa komunikasi 3 orang, jasa pemerintahan (5 orang) dan lain-lain. Di daerah PIR ini ada pasar desa yang hari pasarannya disesuaikan dengan hari pembayaran upah pekerja (tanggal 15 tiap bulan) dan pembayaran uang bagi hasil petani peserta plasma/ gaji karyawan KUD (tanggal 1 tiap bulan). Roda perekonomian di desa ini memang sudah berjalan dengan didukung oleh keberadaan lembaga ekonomi yang ada di desa, antara lain berupa koperasi, warung dan pasar. Pendukung perekonomian lain yang ada di desa ini adalah adanya prasarana dan sarana transportasi, yaitu jalan desa sirtu (pasir dan batu) sepanjang 10 km, jembatan sebanyak 8 buah, sedangkan kendaraan berupa bus umum (termasuk minibus) 32 buah, dan sepeda motor (fungsi sebagai ojek dan untuk sendiri) sebanyak 251 buah. Dalam bidang pendidikan, saat ini terdapat 3 sekolah dasar dan 2 SMP Tsanawiyah.

5.4. Kondisi Sosio Demografi Petani di Perkebunan Kelapa Sawit

Kondisi sosio demografi petani peserta PIR memberikan gambaran tentang latar belakang demografi para petani peserta. Kondisi tersebut meliputi umur, jenis kelamin, jumlah anggota rumah tangga, status dalam rumah tangga, daerah asalnya, daerah tempat lahir dan suku bangsa. Kemudian latar belakang pendidikan disajikan sebagai salah satu gambaran indikator kualitas tenaga kerja perkebunan kelapa sawit.

Secara sosio demografis petani peserta PIR di Desa PIR-ADB merupakan penduduk yang cukup heterogen. Tabel 5.5 menunjukkan bahwa dari berbagai variabel yang digambarkan adanya variasi kondisi sosio demografi. Ditinjau dari tingkat pendidikan merefleksikan bahwa sebagian besar petani plasma mempunyai pendidikan SD ke bawah (80 persen). Kemudian mereka yang berpendidikan SLTP sederajat ternyata mencapai sebesar 12,7 persen dan berpendidikan SLTA sederajat sebesar 7,3 persen. Meskipun rata-rata petani berpendidikan rendah, namun tidak menjadi hambatan untuk mengelola perkebunan kelapa sawit dengan teknologi modern, karena pengelolaan perkebunan telah diserahkan kepada KUD selaku farm manager. Dalam hal ketrampilan berkebun kelapa sawit, rata-rata informan mengatakan bahwa ketrampilan berkebun kelapa sawit diperoleh dari perusahaan inti, yaitu pada waktu perkebunan tersebut masih menjadi plasma dari PTPN II. Para petani plasma tidak terlalu sulit untuk belajar mengelola perkebunan karena sebagian dari mereka memang berlatar belakang sebagai petani kebun, bahkan ada sebagian (25 persen) dari para peserta dan pengurus KUD berasal dari pensiunan karyawan PTPN II. Sehingga di antara para petani peserta sudah terjadi adanya transfer of technology dari petani peserta bekas para karyawan PTPN ke petani peserta yang lain. Rendahnya kualitas SDM di lingkungan petani sawit, memberikan inspirasi positif tersendiri bagi para pengelola usaha perkebunan kelapa sawit di Desa PIR-ADB (KUD Rahmat Tani) untuk berusaha agar kualitas dan produksi kelapa sawit tetap terjaga. Hal yang dilakukan untuk menjaga kualitas dan produksi tersebut adalah selama ini tetap menjaga hubungan baik dengan PTPN II melalui kegiatan konsultasi maupun pembelian bibit sawit yang bermutu/ kualitas unggul.

Tabel 5.5 : Komposisi Petani Peserta PIR Menurut Latar Belakang Sosial Demografi, Desa PIR-ADB Besitang, 2004

No	Keterangan	Jumlah	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)
Pendidikan			
1	Belum/tidak sekolah	31	20,7
2	Tidak tamat SD	41	27,3
3	Tamat SD	48	32,0
4	Tamat SLTP	19	12,7
5	Tamat SLTA	11	7,3
Daerah tempat lahir			
1	NAD	3	2,0
2	Sumatra Utara	120	80,0
3	Riau	2	1,3
4	Jawa Tengah	16	10,7
5	DIY	3	2,0
6	Jawa Timur	5	3,3
7	Kalimantan Selatan	1	0,7
Jumlah ART			
1	1-4	77	51,3
2	5-6	56	37,3
3	7 +	17	11,3
Jenis kelamin Petani Peserta			
1	Laki-laki	128	85,3
2	Perempuan	22	14,7
Umur Petani Peserta			
1	< 30	1	0,7
2	30-39	8	5,5
2	40-49	48	32,0
4	50-59	46	30,7
6	60 +	47	31,4
Jumlah		150	100,0

Sumber : Data Primer Penelitian Tenaga Kerja Sumatera Utara, PPK-LIPI, 2004

Berdasarkan daerah asal dan tempat kelahirannya sebagian besar (80 persen) petani peserta plasma ternyata berasal dari Sumatera Utara (Tabel 4.5). Namun apabila ditelusuri tentang suku bangsanya ternyata sebagian besar dari mereka adalah keturunan orang Jawa, namun dilahirkan di Sumatera Utara. Mereka menamakan dirinya orang Pujakesuma (Putra Jawa Kelahiran Sumatera). Kemudian sebagian petani peserta lainnya mengaku berasal dari luar Propinsi Sumatera Utara. Mereka berasal dari Propinsi Jawa Tengah 10,7 persen, Jawa Timur 3,3 persen, Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) 2 persen, Daerah Istimewa Yogyakarta 2 persen, Riau 1,3 persen dan Kalimantan Selatan sebesar 0,7 persen. Meskipun juga banyak petani peserta yang mengaku lahir di Jawa, tetapi sebelum menjadi petani plasma di Desa PIR-ADB Besitang sebagian besar dari mereka telah tinggal lama di daerah Sumatera Utara. Sebagian besar responden mengatakan bahwa sebelum menjadi petani plasma mereka telah tinggal di wilayah Sumatera Utara. Kebanyakan mereka adalah para pensiunan PTPN II. Di Sumatera Utara

mereka tersebar di berbagai kabupaten, antara lain Tapanuli Selatan, Asahan, Simalungun, Karo, Deli Serdang, Langkat dan Binjai. Alasan ekonomi merupakan alasan utama yang menjadi sebab mengapa mereka mau menjadi petani peserta plasma. Mereka melihat bahwa pendapatan dari usaha perkebunan kelapa sawit cukup menjanjikan. Hal ini dapat dilihat dari alasan ketika mereka ditanya mengapa mau pindah menjadi petani plasma yaitu untuk meningkatkan penghasilan yang lebih baik.

Jumlah anggota rumah tangga juga menentukan masa depan rumah tangga para petani peserta, makin besar jumlah anggota rumah tangga beban masa depan rumah tangga semakin besar. Hasil penelitian menunjukkan ternyata ada variasi jumlah anggota rumah tangga petani plasma. Jumlah rumah tangga yang hanya memiliki jumlah anggota rumah tangga sebesar 1-4 orang sebesar 51,3 persen. Sehingga dimungkinkan rumah tangga ini sebagian hanya memiliki anak maksimal 2 orang anak. Kemungkinan mereka telah menerapkan program keluarga kecil, namun kemungkinan lain mereka merupakan pasangan baru yang anaknya baru satu atau dua orang anak. Kemudian rumah tangga yang mempunyai jumlah anggota rumah tangga sebesar 5-6 orang ternyata cukup banyak sebesar 37,3 persen dan anehnya rumah tangga yang memiliki jumlah anggota rumah tangga lebih dari 7 orang masih sebesar 11,3 persen. Rumah tangga yang terakhir ini kemungkinan kurang mempraktekan program keluarga kecil dan yang akan memiliki beban ekonomi yang berat. Mengingat luas lahan yang dimiliki masing-masing petani peserta relatif tetap dan kemungkinan perluasan lahan sangat terbatas.

Sebagaimana masyarakat Indonesia pada umumnya laki-laki masih dianggap memiliki tanggung jawab yang tinggi dan harus mampu melindungi dan menghidupi keluarganya. Sehingga kepala rumah tangga pada umumnya masih dipegang oleh laki-laki. Petani peserta PIR-ADB juga semuanya dipilih laki-laki. Dari hasil penelitian di Desa PIR-ADB ini juga menunjukkan bahwa sebagian besar (85 persen) kepala rumah tangga ternyata juga laki-laki. Hal ini dapat dimengerti karena mereka merupakan masyarakat petani dengan pekerjaan utama sebagai pekerja di perkebunan kelapa sawit. Sebagian besar kegiatan di perkebunan dilakukan oleh laki-laki. Oleh sebab itu, kaum laki-laki mempunyai peran yang lebih dominan dari pada perempuan. Laki-laki masih diharuskan menjadi kepala rumah tangga. Sedangkan jumlah kepala keluarga perempuan hanya sebesar 14,7 persen. Peran perempuan sebagai kepala rumah tangga disebabkan lebih karena keterpaksaan dan tanggung jawab terhadap keluarga. Hal tersebut terjadi karena umumnya suami mereka telah meninggal dunia dan belum kawin lagi. Mereka terpaksa menggantikan peran suami menjadi kepala rumah tangga.

Komposisi petani plasma berdasar kelompok umur menunjukkan bahwa sebagian besar (62 persen) petani plasma sudah berusia di atas 50 tahun. Hal ini disebabkan banyak di antara para petani peserta tersebut adalah para pensiunan PTPN II. Hanya sebagian kecil petani plasma yang masih berusia di bawah 40 tahun yaitu sebesar 6,2 persen. Mereka kebanyakan adalah petani peserta pengganti, orang tuanya yang sudah meninggal atau sudah tua sekali. Petani yang sudah berusia tua pada dasarnya merupakan petani plasma asli yang menjadi plasma sejak pertama kali dibukanya lahan. Hal ini dapat dimengerti karena pembukaan perkebunan sawit telah dilakukan sejak 22 tahun yang lalu. Pada waktu itu seluruh calon petani plasma dipilih yang sudah berumah tangga, sehingga usia mereka sekarang sudah cukup tua. Oleh sebab itu, pada saat ini rata-rata usia petani plasma sudah relatif tua. Sebagian petani plasma yang berusia muda tersebut antara lain juga merupakan pendatang baru yang mendapatkan kesempatan membeli lahan dari petani peserta plasma asli.

5.5. Kesejahteraan dan Strategi Kelangsungan Hidup

Untuk mengukur tingkat kesejahteraan rumah tangga petani peserta PIR – BUN dalam penelitian ini telah dipilih 3 indikator. Indikator-indikator tersebut adalah pendapatan yang diterima dan perubahan ekonomi, pemilikan lahan dan barang-barang berharga serta kondisi fisik rumah tinggal di rumah tangga tersebut. Data yang digunakan untuk menganalisis memanfaatkan data primer hasil wawancara dengan petani peserta plasma yang terpilih (responden).

Sejak awal menjadi petani peserta hingga sekarang rumah tangga petani tersebut memperoleh sumber pendapatan yang berubah-ubah. Pada tahun-tahun awal sebelum memperoleh pendapatan dari hasil panen di plasma untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari diperoleh dari upah sebagai pekerja di plasma dan jaminan hidup (jadup) dari proyek. Pada waktu itu memang kehidupan mereka cukup memprihatinkan, ada sebagian kecil dari mereka yang terpaksa meninggalkan lokasi untuk mendapatkan penghasilan yang lebih baik. Namun pada umumnya status pemilikan lahan plasma mereka tetap dimiliki. Karena status pemilikan masih atas nama mereka, maka sampai sekarang mereka tetap mempunyai hak untuk menerima pendapatan dari hasil plasma. Kehidupan para petani peserta dari tahun ke tahun menjadi semakin baik setelah produksi plasma semakin baik dan semakin meningkat terutama setelah pengelolaan plasma berpindah dari perusahaan inti ke KUD. Bahkan seperti telah diungkap di atas perkembangan perkebunan tersebut telah menghasilkan efek ganda terhadap kesempatan kerja yang lain, baik di sektor pertanian maupun di luar pertanian.

Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa sumber pendapatan rumah tangga peserta PIR-BUN, ternyata diperoleh dari berbagai sumber. Variasi sumber tersebut dapat digunakan sebagai petunjuk bahwa pendapatan yang diperoleh dari plasma ada sebagian rumah tangga yang merasa belum cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga yang semakin meningkat. Oleh karena itu, banyak rumah tangga petani yang mencari sumber pendapatan lain, baik yang terkait dengan perkebunan maupun di luar perkebunan.

Dengan adanya variasi pemilikan lahan dan variasi lapangan kerja akan memunculkan adanya variasi pendapatan. Di samping itu, perbedaan jumlah anggota rumah tangga usia kerja yang bekerja juga akan memperlihatkan adanya perbedaan besarnya pendapatan rumah tangga. Dalam pembahasan berikut pendapatan rumah tangga akan disajikan tentang pendapatan sebulan terakhir. Pendapatan ditanyakan hanya dalam sebulan terakhir digunakan untuk menghindari adanya memorylap. Di samping itu, meskipun daerah penelitian merupakan daerah pertanian/ perkebunan namun pendapatan per bulan kurang lebih sama atau tetap. Mengingat sumber pendapatan utama rumah tangga pada umumnya dari penerimaan hasil plasma kelapa sawit yang diterima sebulan sekali tiap tanggal satu. Sedangkan harga TBS kelapa sawit dalam beberapa bulan terakhir cukup bagus dan tidak begitu fluktuatif. Banyak para petani peserta PIR dan anggota rumah tangganya yang bekerja sebagai pekerja/ buruh di plasma. Jumlah jam kerja, hari kerja dan upahnya jelas dan mudah diingat, sebab tiap jenis pekerjaan di kebun plasma jumlah jam kerja dan upah yang diberikan sudah standar dari manajer perkebunan.

Pemilikan barang yang akan digunakan untuk mengukur kesejahteraan di sini meliputi pemilikan kendaraan, alat-alat elektronik, ternak, perhiasan dan lain-lainnya. Pemilikan kendaraan digunakan sebagai indikator kesejahteraan sebab barang ini dapat memudahkan anggota rumah tangga bermobilitas, baik untuk keperluan ke tempat kerja, berbelanja dan lain-lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan alat-alat elektronik, seperti televisi dan radio dapat digunakan untuk mendapatkan akses informasi dan hiburan bagi rumah tangga. Pemilikan ternak dapat digunakan untuk jaminan atau tabungan apabila ingin membutuhkan uang kontan segera dapat dijual ke pasar. Sedangkan kondisi rumah tinggal dapat dilihat dari jenis atap, dinding dan lantai, sebagai indikator keberhasilan dalam ekonomi rumah tangganya. Di samping itu, rumah tinggal yang baik juga memberikan rasa aman dan nyaman bagi penghuninya.

Sumber pendapatan

Sebagaimana dikemukakan di atas bahwa sumber pendapatan rumah tangga peserta PIR-BUN bervariasi. Ada yang hanya menggantungkan pada hasil plasma. Ada yang hanya dari hasil plasma, lahan food crop dan pekarangan.

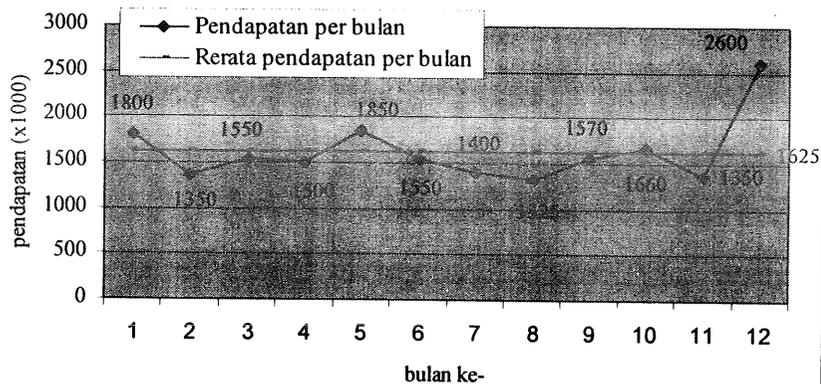
Namun ada juga yang dari hasil plasma dan usaha pertanian di luar plasma dan lahan foodcrop. Bagi rumah tangga yang mempunyai anggota rumah tangga pada usia produktif (isteri atau anak), biasanya pendapatan rumah tangga juga dibantu anggota rumah tangganya. Oleh karena itu, pendapatan seluruhnya menjadi lebih besar. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata pendapatan rumah tangga petani peserta PIR dari berbagai sumber dapat mencapai di atas Rp 2 juta atau sekitar Rp 2.250.000,-.

1. Hasil dari plasma

Tingkat kecukupan pemenuhan kebutuhan petani peserta PIR dari penerimaan hasil plasma kelapa sawit sangat tergantung pada pola pengeluaran serta jumlah anggota keluarga. Petani peserta yang merasa bahwa penerimaan dari plasma perkebunan sawit belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya akan berusaha untuk mendapatkan pendapatan selain dari bagi hasil kelapa sawit. Tetapi bagi mereka yang sudah merasa cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, petani peserta tidak perlu lagi bekerja untuk menambah pendapatan.

Pada saat ini pendapatan petani peserta dari plasma kelapa sawit ditentukan oleh kondisi harga jual TBS di pasar dan jumlah TBS yang diproduksi. Produksi TBS sendiri sangat ditentukan oleh kondisi musim dan pemeliharaan (termasuk pemupukan). Sedangkan harga jual TBS dipengaruhi oleh permintaan pasar minyak sawit dunia. Pendapatan petani peserta PIR per bulan dari hasil plasma dapat digambarkan pada Grafik 1. Grafik tersebut menunjukkan bahwa rerata pendapatan petani peserta dari bulan Januari-Desember 2003 mencapai Rp 1.625.000,- per bulan. Pada bulan Pebruari, Maret, Mei, Juni, Juli dan Agustus pendapatan petani memperlihatkan angka lebih rendah dari pendapatan rata-rata. Kemudian pada bulan Desember, Januari, dan Mei pendapatan petani adalah lebih besar dari pendapatan rata-rata. Pendapatan tertinggi terjadi pada bulan Desember sebesar Rp 2.600.000,-, sedangkan pendapatan terendah terjadi pada bulan Agustus sebesar Rp 1.325.000,-. Tidak ada keterangan spesifik yang menjelaskan tidak stabilnya pendapatan petani kecuali dihubungkan dengan kondisi musim dan harga pasar minyak kelapa sawit yang tidak stabil.

Grafik 1. Pendapatan Petani Plasma dari Hasil Penjualan Sawit pada bulan Januari-Desember 2003



Sumber : Diolah laporan tahunan pengurus KUD RATA Tahun 2003

Bagaimana pendapatan petani peserta PIR tersebut pada tahun 2004? Berikut ini akan diuraikan tentang pendapatan pada bulan Maret 2004 atau sebulan terakhir sebelum penelitian. Sebagaimana telah disinggung di atas bahwa seluruh lahan plasma di lokasi PIR – ADB Kelapa Sawit Besitang dikelola oleh KUD Rahmat Tani. Semua para petani peserta plasma tiap bulan menerima uang hasil penjualan TBS yang dikelola oleh KUD tersebut. Hasil penjualan dari seluruh hamparan plasma tiap bulan dibagi rata untuk 500 KK peserta PIR. Hasil rata-rata per peserta (2 hektar lahan plasma) pada bulan terakhir (Maret 2004) sebanyak 3.943,46 kg TBS. Harga pasar TBS pada bulan tersebut Rp 829,92 per kg. Hasil penjualan rata-rata per peserta adalah $3.943,46 \text{ kg} \times \text{Rp } 829,92 = \text{Rp } 3.272.795,46$. Kemudian ada potongan umum yang berupa :

1. Pengembalian kredit	Rp 127.000,00
2. Biaya pemeliharaan	Rp 76.820,00
3. Dana tunas	Rp 33.440,60
4. Biaya panen	Rp 164.600,80
5. Biaya angkut TBS	Rp 155.589,34
6. Honor pengurus KUD dll	Rp 15.558,40
7. Biaya administrasi	Rp 33.164,90
8. Simpanan wajib	Rp 2.000,00
9. Biaya APPKD	Rp 4.732,20
10. STM C.I.84 – 109/C.II.81	Rp 9.000,00
11. Dana replanting	Rp 78.869,20

12. Dana pupuk	Rp 483.177,72
13. Dana pengerasan jalan	Rp 59.151,90
14. Dana prest/probntn pemanen	Rp 8.399,60
15. Dana THR pegawai	Rp 2.957,60
16. PBB	Rp 6.467,30
17. Dana HUT RI & Kop	Rp 7.965,90
18. Biaya audit	Rp 4.000,00
Jumlah potongan umum	Rp 1.272.795,46.

Jumlah potongan umum diberlakukan sama untuk semua petani peserta. Sisa yang dibayarkan kepada masing-masing petani peserta PIR-ADB Besitang pada bulan Maret 2004 sebesar Rp 2.000.000,-. Kemudian apabila para petani tersebut ada urusan pribadi (pinjaman/ potongan pribadi) dengan KUD uang tersebut masih ada potongan lagi, sehingga yang akan diterima petani peserta kurang dari Rp 2.000.000,-. Mereka yang tidak ada urusan pribadi akan menerima utuh Rp 2.000. 000,- per bulan. Potongan pribadi tersebut adalah berupa pinjaman pribadi (usipa), membayar rekening PLN, SPP Madrasah/ BP3, kas/ bantuan mesjid, Kas GPIB, kas Pujakesuma, ongkos bus sekolah, pinjaman saprodi dsb. Potongan tersebut tiap rumah tangga peserta lain-lain besarnya, semakin banyak jenis pengeluaran yang dibayarkan lewat KUD jumlah potongannya makin besar. Tiap bulan masing-masing petani peserta mendapatkan selebar daftar pembayaran hasil penjualan TBS, potongannya dan jumlah yang harus diterima. Dari hasil penelitian ini rata-rata penerimaan rumah tangga petani peserta PIR-BUN dari hasil plasma sebesar Rp 1.832.770,- per bulan. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata per bulan tahun 2003 yang berarti ada peningkatan pendapatan dari tahun sebelumnya. Suatu angka yang masih cukup bagus, sebab produktivitas tanaman kelapa sawit mereka masih cukup tinggi. Produktivitas per hektar pada bulan-bulan tersebut mencapai produksi puncak sekitar 25 ton per hektar/ tahun, lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Meskipun umur tanaman mereka sudah mencapai 22 tahun, sedangkan di daerah lain pada tanaman seusia tersebut kebanyakan sudah menurun produksinya.

2. Hasil usaha pertanian di luar plasma

Semua petani peserta PIR – ADB di Besitang di samping mendapatkan lahan plasma 2 hektar, juga mendapatkan lahan foodcrop 0,5 hektar dan lahan pekarangan seluas 0,5 hektar. Bagi petani peserta yang rajin dan mau bekerja keras, biasanya kecuali menerima hasil dari plasma juga masih mendapatkan penghasilan dari lahan foodcrop dan lahan pekarangan. Lahan foodcrop ada yang ditanami tanaman pangan seperti jagung, singkong, pisang, kelapa dsb, tapi ada juga yang ditanami pohon kelapa sawit. Bahkan hasil pohon kelapa sawit dari lahan foodcrop tersebut ada yang sudah berbuah. Penjualan

hasil biasanya diikutkan ke KUD bersama penjualan hasil plasma. Dari seluruh peserta hanya sebagian peserta yang betul-betul memanfaatkan dan mengolah lahan foodcrop dan lahan pekarangan untuk tanaman pangan atau tanaman perkebunan. Ada sebagian petani peserta yang membiarkan lahan foodcropnya tidak ditanami tanaman pangan maupun pohon kelapa sawit. Mereka adalah para peserta yang betul-betul malas, sakit-sakitan atau sudah tua, sehingga tidak mampu secara fisik mengolah lahan. Ada juga petani peserta yang punya kegiatan di luar perkebunan/ pertanian, seperti berdagang, menjadi karyawan dan pekerjaan lainnya telah menyita waktu dan tenaga. Ada juga lahan yang dimiliki oleh petani peserta yang sudah tidak tinggal lagi di lokasi. Mereka hanya datang ke KUD sekali ketika menerima hasil penjualan TBS dari KUD. Namun memang ada sebagian lahan-lahan foodcrop tersebut yang diolah oleh orang lain yang tidak punya lahan. Orang lain tersebut biasanya merupakan pendatang baru ke lokasi dan belum memiliki lahan garapan sendiri. Bagi petani peserta PIR dari lahan foodcrop dan lahan pekarangan tersebut dapat menerima penghasilan tambahan.

3. Hasil usaha di luar pertanian/ perkebunan

Telah disinggung di atas bahwa ada petani peserta PIR yang memiliki usaha di luar pertanian/ perkebunan. Usaha tersebut antara lain perdagangan, usaha angkutan, usaha komunikasi, usaha jasa perbengkelan dan sebagainya. Usaha perdagangan meliputi toko/ kedai kelontong, kedai minuman, toko pakaian, kedai sembilan bahan pangan, warung obat-obatan dsb. Usaha angkutan di lokasi ini ada lebih dari 30 kk, baik berupa angkutan truk pengangkut TBS, angkutan penumpang, ojek dan bus pengantar anak sekolah. Usaha bidang komunikasi adalah berupa warung telekomunikasi (wartel) di lokasi ini ada 2 pengusaha wartel. Usaha jasa perbengkelan, di lokasi ini ada 4 pengusaha bengkel yang rata-rata ada 2 orang tenaga kerja. Mereka melayani servis sepeda motor dan kendaraan roda empat.

Ada sekitar 61 persen kepala rumah tangga petani peserta PIR-BUN yang memiliki usaha/pekerjaan tambahan. Rata-rata pendapatan dari usaha/ pekerjaan tambahan di luar plasma (di pertanian dan di luar pertanian) yang dilakukan kepala rumah tangga sebesar Rp 344.000,- per bulan. Pendapatan kepala rumah tangga dari luar plasma tersebut telah memberikan kontribusi terhadap seluruh pendapatan rumah tangga sebesar 15 persen.

4. Pendapatan dari anggota rumah tangga

Bagi petani peserta PIR yang memiliki anggota rumah tangga usia kerja, dapat tertolong karena mereka umumnya bekerja untuk menambah penghasilan rumah tangga. sedangkan jenis pekerjaannya cukup bervariasi

mulai dari sebagai pekerja kebun plasma, ikut berdagang, buruh di bengkel, karyawan/karyawati (seperti guru SD) (Ilustrasi 2) dsb. Ada sekitar 48 persen rumah tangga petani peserta PIR-BUN yang mendapatkan kontribusi pendapatan dari anggota rumah tangganya. Rata-rata pendapatan dari anggota rumah tangga tersebut sekitar Rp 427.500,- per bulan. Pendapatan tersebut telah memberikan kontribusi pendapatan rumah tangga sekitar 20 persen.

Jumlah pendapatan rumah tangga

Kondisi pendapatan rumah tangga petani kelapa sawit di PIR – ADB Besitang ini sebetulnya cukup baik. Rata-rata pendapatan rumah tangga petani peserta PIR-BUN yang mencapai di atas Rp 2 juta tersebut, apabila diangkat ke tingkat makro desa dapat diperkirakan bahwa jumlah uang yang beredar di Desa PIR-ADB Besitang rata-rata dapat mencapai di atas Rp 1 milyar per bulan atau di atas Rp 12 milyar per tahun. Suatu jumlah yang cukup besar untuk suatu desa yang hanya terdiri dari sekitar 800 KK. Keadaan ini telah berimbas positif pada perkembangan perekonomian Desa PIR-ADB Besitang dan sekitarnya, sebab makin besar uang yang beredar roda perekonomian semakin berkembang.

Kenyataan menunjukkan bahwa jumlah pendapatan rumah tangga para peserta PIR-BUN secara umum cukup bervariasi, yaitu berkisar antara Rp 660.000,- sampai Rp 5 juta. Ada sekitar 16 persen rumah tangga petani peserta yang pendapatan seluruhnya per bulan di bawah Rp 2 juta. Sebagian besar dari mereka atau sekitar 77 persen menerima pendapatan per bulan antara Rp 2 juta s/d < Rp 3 juta dan hanya 7 persen rumah tangga yang pendapatannya Rp 3 juta ke atas. Perbedaan pendapatan tersebut karena dipengaruhi oleh : Pertama, adanya perbedaan pemilikan luas lahan. Ada beberapa rumah tangga yang memiliki lahan plasma lebih dari 2 hektar atau memiliki dua sampai 3 kapling. Kedua, perbedaan tersebut juga disebabkan karena perbedaan besarnya pinjaman pribadi di KUD Rahmat Tani. Makin banyak pinjaman-pinjaman pribadi makin kecil penerimaan tiap bulan dari KUD sebagai pengelola plasma. Alasan ketiga, banyak di antara rumah tangga peserta PIR yang kepala rumah tangga atau anggota rumah tangganya memiliki usaha sampingan, seperti usaha perdagangan atau jasa (membuka kedai, jualan di pasar, usaha angkutan, usaha bengkel motor dsb) dan juga yang bekerja sebagai karyawan atau sebagai buruh/pekerja, baik di plasma maupun di luar plasma. Juga ada rumah tangga yang memiliki lahan lain di luar plasma dan lahan foodcrop, sehingga pendapatannya lebih besar dibandingkan mereka yang hanya memiliki lahan plasma saja. Menurut pendapat beberapa responden pendapatan rumah tangga peserta tersebut cukup baik semenjak plasma dilola oleh pihak KUD Rahmat Tani, yaitu pada awal tahun 90-an. Sebab proses pemasaran TBS

dilakukan secara terbuka melalui tender dan mengikuti harga pasar serta dapat dikontrol oleh para peserta sebagai anggota KUD.

Dengan adanya kondisi produktivitas tanaman kelapa sawit yang masih tinggi dalam usia tanaman 22 tahun dan harga jual TBS yang cukup baik telah memberikan optimisme hidup bagi sebagian besar para petani peserta di PIR-ADB Besitang. Oleh karena itu, ketika ditanyakan tentang bagaimana kondisi perekonomian di PIR ini sekarang dibandingkan 5 tahun yang lalu, ternyata sebagian besar (80,1 persen) para petani peserta mengatakan lebih baik sekarang. Hanya sekitar 16 persen yang mengatakan sama saja dan yang kurang gembira dengan mengatakan lebih buruk sekarang hanya sekitar 4 persen. Mereka yang mengatakan lebih buruk tersebut nampaknya karena adanya musibah atau masalah-masalah yang sifatnya individual.

Pemilikan lahan dan aset rumah tangga

1. Pemilikan lahan

Bagi para petani peserta PIR di Desa PIR – ADB Besitang ini masing-masing mendapatkan jatah lahan plasma 2 hektar, ditambah lahan foodcrop 0,5 hektar dan pekarangan 0,5 hektar. Oleh karena itu, rata-rata para petani peserta memiliki lahan 3 hektar. Lahan tersebut diberikan pada awal ikut dalam proyek PIR-BUN tahun 1982/1983. Semua lahan tersebut sudah ada sertifikatnya dan sementara diagunankan ke bank, sebagai jaminan pinjaman para peserta. Namun umumnya sekarang semua pinjaman tersebut hampir lunas.

Kemudian ada perkembangan usaha petani yang mengakibatkan adanya variasi luas pemilikan lahan. Selanjutnya ada petani yang menambah lahan dengan cara membeli, mendapatkan warisan, hibah dan ada juga merambah hutan yang dianggap sebagai miliknya. Lahan – lahan tersebut ada yang berada di lokasi Desa PIR – ADB, di sekitar lokasi dan bahkan ada yang berada di luar kecamatan, lain kabupaten maupun lain propinsi, seperti di Propinsi Riau. Sekitar seperempat dari seluruh jumlah petani peserta PIR telah memiliki lahan di atas 3 hektar. Sekitar 6 persen bahkan ada yang memiliki di atas 4 hektar (Tabel 5.6).

Tabel 5.6 : Jumlah Rumah Tangga Petani Plasma Menurut Luas Lahan Yang Dimiliki, PIR – ADB Besitang, 2004

Luas Lahan	Persen Jumlah Rumah Tangga
(1)	(2)
Kurang 3 hektar	71,2
3 hektar - < 4 hektar	22,8
4 hektar ke atas	5,9
Jumlah (N)	100 (156)

Sumber : Diolah dari Data Primer Penelitian Tenaga Kerja Sumatera Utara, PPK – LIPI, 2004.

2. Pemilikan kendaraan

Kendaraan merupakan salah satu simbol kekayaan dan kemampuan rumah tangga untuk memilikinya. Di samping itu, kendaraan juga sebagai alat komunikasi yang cepat dan meningkatkan arus mobilitas penduduk, baik mereka yang akan bermobilitas ke luar, ke kota dan daerah lain maupun mobilitas ke dalam. Adanya mobilitas penduduk merefleksikan adanya dinamika penduduk. Mobilitas penduduk juga mendorong perkembangan perekonomian wilayah. Mobilitas penduduk akan memperlancar arus informasi dan berkembangnya inovasi baru, baik dalam tingkat produksi maupun konsumsi (Iskandar Andi Nuhung, 2003).

Kendaraan yang dimiliki rumah tangga di desa penelitian mulai dari sepeda ontel, sepeda motor, minibus dan truk. Kendaraan bermotor yang banyak dimiliki rumah tangga di desa penelitian adalah sepeda motor. Sekitar 13 persen rumah tangga petani mengaku telah memiliki sepeda motor. Mudah-mudahan mereka memiliki sepeda motor, sebab para petani ini tiap bulan menerima uang tunai relatif tetap. Kondisi ini yang dimanfaatkan oleh para dealer sepeda motor di Kabupaten Langkat untuk menawarkan dagangannya. Mereka bisa mendapatkan sepeda motor secara tunai maupun secara kredit. Pemilikan tersebut nampaknya banyak dilakukan secara kredit. Secara kredit

yang banyak dilakukan karena petani mempunyai penghasilan agak tetap yang diterima tiap bulan.

Sepeda motor sebagai alat transportasi yang paling umum dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari anggota rumah tangga. Mereka menggunakannya untuk pergi ke tempat kerja. Hampir semua pengurus KUD, aparat desa, guru SD memiliki sepeda motor dan transportasi ke kantor menggunakan sepeda motor sendiri. Ada juga para petani yang pulang pergi ke ladang menggunakan sepeda motor. Ada yang digunakan untuk membawa dagangan ke pasar. Ada juga yang memanfaatkannya sebagai tukang ojek. Mereka melayani penumpang dari jalan raya ke lokasi pemukiman dan sebaliknya. Ada yang memanfaatkan untuk pergi berbelanja ke warung, toko, kedai, pasar dsb. Oleh karena itu, dengan pemilikan sepeda motor tersebut telah memberikan kemudahan untuk semua aktivitas kehidupan di daerah penelitian.

Minibus dimiliki oleh penduduk desa ini ada yang digunakan untuk angkutan penumpang, ada yang digunakan untuk jemputan anak sekolah, namun ada yang hanya digunakan untuk pajangan. Mereka menggunakan hanya sewaktu-waktu untuk bepergian ke kota. Kendaraannya lebih banyak berdiam di garasi rumahnya (Ilustrasi 2). Ada penduduk yang memiliki truk (10 orang), kendaraan tersebut mereka sewakan untuk mengangkut TBS kelapa sawit. Mengingat KUD hanya memiliki 3 truk dan tidak mampu melayani pengangkutan hasil panen secara cepat. KUD perlu menyewa 10 truk untuk mengangkut hasil panen tiap hari, sebab apabila terlambat pengangkutannya TBS akan rusak dan randemennya akan turun. Menurut pengakuan salah seorang pengurus KUD memang lebih ekonomis menyewa truk untuk mengangkut TBS dibandingkan harus punya truk sendiri. Sebab punya truk sendiri memerlukan ongkos pemeliharaan yang tidak sedikit. Sedangkan dengan menyewa dapat diperhitungkan sebagai biaya produksi dan hanya keluar biaya apabila membutuhkan saja, tanpa harus menanggung biaya pemeliharaan yang harus dilakukan terus-menerus. Ada beberapa penduduk yang memiliki minibus untuk angkutan umum. Angkutan umum tersebut biasanya mengangkut penumpang dari pedesaan ke kota dan sebaliknya.

3. Alat-alat elektronik

Barang-barang elektronik seperti televisi, VCD, radio, kipas angin merupakan barang yang banyak dimiliki oleh rumah tangga. Hampir separoh dari rumah tangga memiliki barang-barang elektronik tersebut. Barang-barang tersebut dimanfaatkan sebagai sumber informasi dan sebagai sarana hiburan, mengingat desa penelitian jauh dari keramaian perkotaan.

4. Ternak

Ternak juga banyak dimiliki oleh rumah tangga peserta PIR. Pemilikan ternak mereka memiliki sebagai simpanan sewaktu-waktu membutuhkan uang tunai. Ternak yang banyak dimiliki adalah ayam, angsa dan kambing. Ada sekitar 15 persen dari rumah tangga peserta yang memiliki ternak, namun jumlah yang dimiliki masing-masing rumah tangga tidak banyak. Ternak di sini belum dianggap sebagai usaha ekonomi rumah tangga, meskipun kadang-kadang dirasa cukup menolong apabila ada kebutuhan uang tunai secara mendadak.

5. Perhiasan

Barang-barang perhiasan, seperti cincin, gelang, kalung, giwang, di samping dipakai sebagai perhiasan sehari-hari atau diwaktu ada pesta juga dimanfaatkan oleh rumah tangga untuk persediaan apabila memerlukan uang tunai mendadak. Barang perhiasan tersebut paling mudah dijual. Perhiasan masih dianggap sebagai symbol status bagi masyarakat, makin banyak atau besar perhiasan yang dipakai menunjukkan bahwa ekonomi rumah tangganya cukup baik.

Pemilikan rumah dan kualitasnya

Kondisi rumah dapat digunakan sebagai indikator kesejahteraan rumah tangga. Dengan kondisi rumah tinggal yang baik menunjukkan bahwa penghasilan rumah tangga tersebut telah mampu untuk membiayai pembangunan rumahnya secara layak. Dengan rumah tinggal yang baik akan memberikan kenyamanan dan keamanan bagi penghuninya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rumah tinggal asli yang diberikan oleh proyek PIR – ADB semula dindingnya dibuat dari papan. Ada sekitar 70 persen yang masih mempertahankan jenis dinding papan tersebut. Sebagian mereka telah mengganti dengan jenis yang sama, yaitu papan. Namun ada sekitar 30 persen yang sudah menggantikannya dengan dinding tembok dan sebagian lagi ada yang melapisinya dengan keramik. Tembok lapisan keramik ini nampaknya sebagai simbol keberhasilan ekonomi mereka, meskipun hanya dipasang di teras ruang tamu. Sedangkan mengenai atapnya nampaknya hampir semua rumah tangga masih mempertahankan dengan menggunakan seng. Penggunaan seng disamping relatif awet, mudah didapat dan harganya relatif masih murah. Hanya penggunaan seng cukup panas bagi penghuninya. Nampaknya atap dari genting masih sulit didapat di daerah ini, di samping tanah di daerah penelitian nampaknya sulit untuk dibuat genting. Mengenai lantai ternyata sebagian besar rumah tangga telah

menggunakan semen plester (82,1 persen) dan sekitar 17 persen telah menggunakan keramik.

Ilustrasi 2.

Mas Pr contoh petani peserta berhasil

Sebelum tahun 30-an kakek Mas Pr adalah termasuk salah seorang kuli kontrak pada perkebunan di Sumatera Utara. Pada waktu itu masih zaman penjajahan Belanda dan pengeloan perkebunan dilakukan oleh Perusahaan Kolonial Belanda. Mereka ditempatkan di perkebunan kelapa sawit di wilayah Langkat. Kakek Mas Pr ceritanya berasal dari daerah Blora, Jawa Tengah. Daerah asal yang mereka tinggali merupakan daerah yang kurang subur dan tiap tahun sering mengalami bencana kelaparan. Karena kemiskinan daerahnya dan juga kemiskinan orang tuanya hanya sebagai petani gurem (petani lahan sempit) yang mendorong kakek Mas Pr harus meninggalkan desanya. Mereka mengikuti teman-temannya yang juga berangkat ke Sumatera. Di daerah perkebunan mereka dijanjikan mendapatkan upah yang cukup baik untuk hidup. Di Sumatera kakek kawin dengan gadis yang sama-sama orang perantauan dari Jawa. Dari hasil perkawinan lahirlah orang tua (ayah) Mas Pr dan kemudian lahir adik-adiknya beberapa tahun kemudian.

Sebagai anak kuli kontrak, orang tua Mas Pr sudah dibiasakan hidup di daerah perkebunan di Sumatera Utara. Orang tua Mas Pr sempat mampu mengenyam pendidikan sampai SLTP. Kebiasaan hidup di lingkungan perkebunan dan melihat kehidupan para karyawan di perusahaan perkebunan cukup yang baik, terbetik niat untuk bisa bekerja di perusahaan perkebunan. Dengan modal pendidikan SLTP mereka mencoba melamar dan ternyata dapat diterima sebagai karyawan di PTPN II. Walaupun tidak sampai menduduki jabatan yang tinggi (manajer), namun kehidupan keluarga orang tua Mas Pr dengan penghasilanyang memadai cukup baik. Pada akhir tahun 70-an mereka sudah selesai masa tugas di PTPN II dan dipensiun. Orang tua Mas Pr punya anak tunggal Mas Pr sendiri. Pada awal tahun 80-an ada informasi akan dibuka di berbagai tempat perkebunan plasma kelapa sawit di Sumatera Utara. Bagi para peserta akan menerima 2 hektar perkebunan kelapa sawit dengan tanaman kelapa sawitnya

yang sudah siap panen dan lahan pangan kosong 0,5 hektar serta sementara belum panen akan menerima jatah jaminan hidup. Di lokasi plasma para peserta juga mendapatkan jatah rumah sederhana, yaitu dinding papan dan atap seng. Untuk mengisi waktu karena sudah pensiun, tidak punya lahan perkebunan untuk kegiatan. Maka orang tua Mas Pr mencoba mendaftar ke Proyek PIR. Kebetulan bagi para pensiunan PTP diberi kesempatan untuk mendaftar dan ternyata diterima. Perkebunan plasma yang dibangun tersebut antara lain PIR – ADB Besitang sebagai plasma dari inti PTPN II, pada tahun 1982/1983 dan dikonversi/mulai berproduksi pada tahun 1985/1986. Kemudian ada perkebunan plasma PIR local ada di kecamatan lain, yaitu di Kecamatan Selesai, Sungai Bingai, Salafia dan Wampu. Namun orang tua Mas Pr tertarik untuk ikut di plasma PIR-ADB Besitang.

Pada tahun 1982 orang tua Mas Pr diterima menjadi peserta PIR. Mereka mendapatkan sesuai yang dijanjikan oleh Proyek PIR, berupa perumahan sederhana, 2 hektar lahan, 0,5 hektar lahan pangan (food crop) dan lahan pekarangan (0,5 hektar). Di samping mendapatkan lahan pertanian, orang tua juga mendapat jatah jaminan hidup, yaitu beras dan uang lauk-pauk. Bagi para peserta plasma pada tahun-tahun awal perkebunan plasma boleh dikatakan agak memprihatinkan, meskipun ada jatah jaminan hidup dan dapat bekerja sebagai pekerja dan mendapatkan upah di plasma. Namun semuanya hanya cukup untuk hidup pas-pasan, sebab tanaman kelapa sawit belum menghasilkan. Beruntung bagi orang tua Mas Pr di samping adanya jadup dan upah karena ikut bekerja di plasma, juga masih menerima uang pensiun dari PTPN, sehingga walaupun pada awal kehidupan di PIR belum menerima hasil panen kelapa sawit bisa untuk memenuhi kebutuhan hidup di desa perkebunan.

Mas Pr selama itu juga mengikuti orang tuanya tinggal di lokasi perkebunan PIR-ADB Besitang. Mereka mampu mengikuti pendidikan sampai lulus SLTA. Karena orang tua sudah lanjut usia jatah lahan plasma dan lahan pangan diserahkan kepada Mas Pr. Kemudian pada tahun 80-an orang tua meninggal dan kepemilikan lahan sepenuhnya dimiliki Mas Pr. Mas Pr kawin dengan seorang gadis yang kebetulan guru di SD Desa PIR-ADB Besitang. Isterinya

lulusan SPG (Sekolah Pendidikan Guru). Di samping mengajar di SD untuk meningkatkan kemampuan mengajar dan meningkatkan jabatannya isteri Mas Pr juga ikut kuliah di Universitas Terbuka. Pada awal tahun 2004 mereka telah selesai mengikuti Diploma III Pendidikan dan telah diwisuda. Dari pendidikan tambahan tersebut mereka mendapat dengan gelar AMPd. Dari perkawinannya mendapatkan dua orang anak. Karena Mas Pr berpendidikan SLTA mereka diangkat menjadi salah satu karyawan KUD. Tugas yang mereka tangani sekarang adalah mengatur pengangkutan TBS dari kebun sampai pabrik pengolahan. Kehidupan keluarga Mas Pr nampaknya cukup sejahtera. Mereka mendapatkan beberapa sumber pendapatan, antara lain : (1) Dari penerimaan hasil penjualan kelapa sawit di plasma yang dikelola KUD menggantikan ayahnya; (2). Pendapatan dari gaji sebagai karyawan KUD; dan (3). Pendapatan dari gaji guru yang diterima isterinya. Dari berbagai sumber tersebut keluarga Mas Pr dapat menerima rata-rata per bulan di atas Rp 4 juta. Menurut pengakuannya dari seluruh pendapatan tersebut cukup untuk memenuhi kehidupan rumah tangganya.

Kesejahteraan keluarga Mas Pr juga nampak dari kekayaan yang mereka miliki. Keluarga ini telah memiliki satu kendaraan roda empat (minibus), satu sepeda motor, televisi, radio, kipas angin besar, lost speaker dsb. Hanya rumahnya meskipun sudah diperluas, namun belum dibangun yang lebih permanen, seperti dinding tembok dan lantai keramik sebagaimana tetangga-tetangganya yang lain. Menurut penuturan isterinya mereka belum membangun rumahnya yang lebih permanen, karena biayanya sedang digunakan untuk membiayai dua anaknya. Dua anaknya selama ini dikirim ke kota Medan untuk melanjutkan pendidikan SLTP dan SLTA di sana. Bagi keluarga Mas Pr investasi pendidikan anak lebih utama dari pada untuk membangun rumah yang lebih permanen, meskipun rumah yang bagus juga penting. Bagi mereka pendidikan adalah investasi penting untuk masa depan kehidupan anak-anaknya. Sebagaimana warga lainnya di lokasi Desa PIR-ADB ini, mereka sudah harus mulai berfikir bahwa pengembangan perluasan lahan kelapa sawit ke depan sudah makin terbatas. Apalagi bila mengikuti sistem waris seperti di Jawa, yaitu lahan milik orang tua harus dipecah dan dibagikan kepada anak-anaknya setelah orang tua sudah lanjut usia atau meninggal dan anak-

anaknya harus membangun keluarga baru. Apabila lahan kelapa sawit harus dibagi-bagikan kepada anak-anaknya nanti, berarti pemilikan lahan semakin sempit tiap rumah tangga dan kalau kehidupannya hanya mengharapkan lahan plasma yang ada akan terjadi penurunan kesejahteraan. Oleh karena itu, keluarga Mas Par mulai berfikir anak harus dibekali dengan pendidikan yang cukup agar mereka dapat mendapatkan berbagai alternatif kesempatan kerja, tidak harus semuanya mengelola lahan perkebunan. Mungkin mereka bisa bekerja di luar perkebunan atau di perkebunan namun bisa bekerja di jasa perkebunan, seperti KUD. Untuk menjadi pengurus atau karyawan KUD-pun selama ini makin dituntut memiliki pendidikan dan kemampuan teknologi yang lebih maju. Antara lain pengetahuan manajemen organisasi, kemampuan administrasi dan ketrampilan pemanfaatan komputer. Pengurus dan karyawan KUD yang sekarang sudah tua-tua, sebagian besar sudah usia pensiun dan suatu saat harus diganti oleh tenaga muda yang lebih kreatif dan produktif agar produktivitas perkebunan plasma dapat dipertahankan atau ditingkatkan.

(Wawancara Mendalam, 2004)

Strategi kelangsungan hidup

Bagi para petani peserta PIR di Desa PIR-ADB Besitang adanya keterbatasan lahan untuk pengembangan usaha perkebunan kelapa sawit telah menjadi pemikiran mereka. Cadangan lahan legal untuk usaha perkebunan tersebut sudah tidak mungkin lagi. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga baik saat ini maupun di masa mendatang perlu adanya langkah strategi. Ada beberapa strategi yang dilakukan oleh para rumah tangga peserta PIR – ADB ini untuk kelangsungan hidupnya. Strategi yang mereka terapkan antara lain adalah :

1. Memperluas/ menambah areal perkebunan dan pertanian

Menambah areal pertanian dan perkebunan merupakan salah satu strategi yang dilakukan sebagian petani di daerah penelitian untuk masa depan keluarganya. Ada beberapa cara yang digunakan untuk menambah areal pertaniannya. Bagi mereka yang memiliki banyak modal atau uang dengan cara membeli lahan plasma atau food crop milik tetangganya atau sama-sama peserta PIR yang kebetulan sangat membutuhkan uang. Ada juga yang membeli lahan ladang atau kebun penduduk di sekitar lokasi. Lahan tersebut ada yang sudah merupakan kebun kelapa sawit, tapi ada yang masih

merupakan ladang untuk tanaman pangan. Namun lahan untuk perluasan tersebut sangat terbatas. Oleh karena itu, ada petani peserta PIR yang sampai membeli lahan kelapa sawit di wilayah Propinsi Riau. Menurutnyanya harganya relatif murah dan lokasinya tidak begitu jauh dari Langkat.

2. Meminjam ke KUD atau lembaga keuangan lainnya

KUD Rahmat Tani telah memberikan kesempatan kepada para anggotanya (petani peserta) meminjam uang, apabila ada kebutuhan uang rumah tangga yang mendesak. Dalam penelitian ini ada sekitar 96 persen responden yang mengatakan bahwa apabila ada kesulitan keuangan sering pinjam ke KUD Rahmat Tani. Pengembaliannya dapat diangsur melalui potongan penerimaan uang penjualan panen TBS tiap bulan. Bagi para petani peserta dengan adanya simpan pinjam uang di KUD ini cukup menolong. Uang tersebut cukup menolong bagi rumah tangga petani apabila memerlukan uang tunai yang mendesak, seperti memerlukan uang tunai untuk membayar sekolah anak, untuk membeli kendaraan, untuk hajatan dsb.

3. Menambah usahanya di luar pertanian/ perkebunan

Ada rumah tangga petani peserta yang untuk kelangsungan hidupnya menambah usahanya di luar pertanian atau perkebunan atau memiliki usaha/ pekerjaan tambahan. Di daerah penelitian sudah terdapat bervariasi usaha di luar pertanian. Antara lain adalah usaha angkutan, usaha perdagangan dan usaha jasa telekomunikasi. Usaha-usaha tersebut kebanyakan dilakukan oleh para petani peserta dan atau anggota keluarganya. Seperti kasus Pak KS, di samping sebagai petani peserta juga menjalankan usaha kedai saprodi milik KUD. Sedangkan anaknya memiliki usaha angkutan yang biasanya mengangkut TBS dari plasma ke pabrik pengolahan kelapa sawit. Secara ekonomis nampaknya kehidupan keluarga KS cukup baik dan saat ini baru saja membangun rumah yang cukup bagus. Rumah bagus di daerah penelitian biasanya ditandai dengan dinding tembok batu bata dan lantainya dari keramik. Sebagian tembok di teras rumah biasanya juga diberi ornamen keramik.

4. Isteri atau anak disuruh bekerja

Ada sebagian para petani peserta ini, di samping mereka sendiri bekerja di plasma untuk mendapatkan upah mingguan, isteri dan anaknya yang dewasa juga disuruh bekerja di plasma. Mereka bekerja berdasarkan kesempatan kerja yang ada dan kemampuan fisik yang dimiliki. Jadi dengan adanya PIR ini sebetulnya telah memberikan lapangan kerja bagi kepala keluarga dan anggota keluarganya. Hanya bagi anak-anak muda yang berpendidikan

tinggi ada indikasi tak mau mengikuti orang tuanya sebagai pekerja di plasma. Sedang kesempatan kerja sebagai staf di KUD atau kantor pemerintah setempat sangat terbatas. Oleh karena itu, telah terjadi adanya gejala mobilitas keluar bagi anak-anak muda yang berpendidikan tinggi. Mereka lebih senang mencari pekerjaan di kantor-kantor pemerintah atau swasta di kota-kota Sumatera Utara, seperti Medan, Stabat, Sibolga, Pematangsiantar dsb.

5. Membuat suatu prioritas pengeluaran rumah tangga

Ada rumah tangga yang membuat prioritas pengeluaran untuk mencapai tujuan dalam keluarga, yaitu antara memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga, membangun rumah yang bagus dan menyekolahkan anak yang tinggi. Seperti kasus keluarga Pak Pr (Ilustrasi 2) pendapatan yang dia terima setiap bulan mencapai lebih dari Rp 3 juta. Namun keluarga tersebut tetap masih menggunakan prioritas pengeluaran. Karena dua orang anaknya harus melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi di Medan, mereka merelakan rumah yang diterima dari proyek PIR dulu dipertahankan sampai sekarang. Mereka belum mengikuti tetangganya yang sudah mampu membangun rumah bagus, namun pendidikan anak-anak mereka hanya SD atau tamat SLTP saja. Bagi keluarga SP investasi pendidikan untuk anak sangat penting bagi masa depan mereka. Mereka tidak bisa memaksakan bahwa anak-anaknya harus hidup di perkebunan seperti orang tuanya.

6. Menjual simpanan barang

Di antara para petani peserta PIR ada yang mengaku memiliki barang-barang berharga yang berupa perhiasan, peralatan elektronik dan ternak. Barang dan ternak tersebut memang dapat dijual apabila rumah tangga tersebut membutuhkan uang tunai yang mendesak. Namun kasus ini hanya dilakukan oleh satu persen dari seluruh rumah tangga yang menjadi sampel.

5.6. Penutup

Usaha PIR perkebunan kelapa sawit telah memberikan variasi kegiatan yang cukup banyak (lebih dari 10 jenis kegiatan). Kegiatan-kegiatan tersebut berlangsung sepanjang tahun, bulan dan minggu, meskipun tidak penuh dalam seminggu dan penuh selama 8 jam per hari. Kegiatan-kegiatan di perkebunan tersebut selama ini cukup menyerap tenaga kerja yang cukup banyak. Sebagian besar tenaga kerja yang ada di daerah penelitian dapat mampu terserap, meskipun kebanyakan hanya bekerja sebagai pekerja harian lepas. Dengan upah rata-rata antara Rp 5000,- - Rp 7.500 per hari selama 4-5 jam. Mereka umumnya tenaga kerja yang latar pendidikannya rendah (SD ke

bawah). Banyaknya kegiatan tersebut bahkan memanfaatkan tenaga kerja pendatang (bukan peserta PIR), baik yang berasal dari luar desa maupun para pengungsi dari Aceh. Sebagian yang lain bekerja sebagai tenaga kerja tetap dan dibayar dalam bentuk bulanan yang ditempatkan sebagai pengurus dan karyawan KUD. Mereka berasal dari peserta PIR namun berpendidikan SLTP dan SLTA serta umumnya didominasi kelompok tenaga kerja usia tua (di atas 40 tahun), termasuk para pensiunan karyawan PTPN.

Keberadaan dan perkembangan usaha PIR perkebunan kelapa sawit selama ini telah membangkitkan roda perekonomian desa, di mana rata-rata uang yang beredar di desa penelitian mencapai sekitar Rp 1 milyar per bulan. Sehingga telah mampu menumbuhkan dampak ganda terhadap kesempatan kerja di sektor lain. Sektor-sektor tersebut antara lain perdagangan, komunikasi, transportasi, kesehatan, jasa kemasyarakatan dsb. Tenaga kerja yang tertampung dalam sektor-sektor tersebut adalah para keluarga petani peserta PIR maupun para pendatang di luar petani peserta.

Untuk tenaga kerja muda yang berpendidikan tinggi sayangnya tidak mudah ditampung dalam kesempatan kerja di desa penelitian. Hal ini disebabkan pekerjaan-pekerjaan yang dapat dilakukan atau semestinya dilakukan oleh tenaga muda yang berpendidikan tinggi masih banyak diduduki oleh generasi tua yang pendidikannya hanya SLTA ke bawah. Di samping itu, juga pekerjaan-pekerjaan tersebut ada yang tidak sesuai dengan tingkat dan bidang pendidikan para tenaga muda. Sebagai akibatnya banyak tenaga muda berpendidikan tinggi harus ke luar desa mencari pekerjaan formal yang lebih sesuai. Sebagian lagi ada yang masih tetap bertahan tinggal di desa sebagai penganggur atau statusnya sebagai pencari kerja.

Secara umum kesejahteraan keluarga petani peserta PIR cukup baik, hasil penerimaan penjualan TBS tiap bulannya rata-rata mencapai sekitar Rp 2 juta per rumah tangga. Pendapatan tersebut belum termasuk upah yang diterima karena keterlibatannya dalam kegiatan harian di plasma. Kemudian ada sebagian petani lain yang memiliki usaha tambahan seperti perdagangan, jasa angkutan, jasa perbengkelan, usaha perkebunan di luar lokasi dsb. Kesejahteraan juga tercermin dari pemilikan lahan, alat-alat elektronik, kendaraan dan kondisi perumahan yang semakin baik. Strategi yang digunakan untuk mempertahankan atau meningkatkan kehidupan para rumah tangga petani peserta PIR telah ditempuh dengan berbagai cara. Di samping penerimaan dari hasil plasma, ada yang mengusahakan lahan tambahan, mengerahkan isteri dan anak-anaknya ikut sebagai tenaga harian di plasma, memaksimalkan pemanfaatan lahan, terutama untuk foodcrop dan pekarangan, dan usaha ternak.

PROSPEK PENYERAPAN TENAGA KERJA DI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT**6.1. Pengantar**

Dalam rangka membahas prospek penyerapan tenaga kerja di perkebunan kelapa sawit, ada berbagai hal yang terkait dalam analisis, yaitu menyangkut aspek kebijakan daerah sebagai statement formal pemerintah, kelangsungan pengelolaan yang meliputi cara pemeliharaan dan pengembangannya. Bagaimana prospek pemasaran baik secara nasional maupun internasional. Kemudian secara umum bagaimana kaitannya dengan sumber daya manusia sebagai penyedia tenaga kerja, serta bagaimana penyerapan tenaga kerja yang memiliki kualitas dan kuantitas yang perlu disesuaikan dengan kondisi setempat serta kebutuhan daerah.

Peluang untuk memperluas pengembangan ekonomi di Indonesia melalui subsektor perkebunan salah satunya adalah memberi kesempatan kepada investor untuk memperluas usaha di perkebunan kelapa sawit. Hal ini mengingat masih tersedia cadangan lahan di beberapa wilayah di Indonesia untuk perkebunan kelapa sawit, terutama ke Daerah Indonesia Timur, seperti wilayah Kalimantan, Papua dan Sulawesi. Sedangkan khusus wilayah Sumatera, karena keterbatasan lahan, maka lebih diutamakan untuk melakukan peremajaan dan peningkatan produktivitas.

Selama kurun waktu sepuluh tahun terakhir, perluasan lahan perkebunan kelapa sawit di Indonesia telah mengalami peningkatan yang cukup pesat. Pada tahun 2003 secara nasional luas perkebunan lahan kelapa sawit telah mencapai sekitar 4,7 juta hektar, yang terdiri atas perkebunan plasma 1,7 juta hektar, perkebunan besar nasional 556,331 hektar dan perkebunan besar swasta sebanyak 2,4 juta hektar. Dengan pesatnya pengembangan lahan tanaman kelapa sawit tersebut, diharapkan dapat berhasil menyerap banyak tenaga kerja, baik yang mempunyai kualitas terampil hingga teknologi tinggi. Agar dapat mengurangi pengangguran yang selama ini menjadi masalah utama di Indonesia.

6.2. Kebijakan Daerah dan Kelangsungan Pengelolaan Kelapa Sawit

Indonesia hingga tahun 2007 diperkirakan akan menambah 80 unit pabrik pengolahan kelapa sawit (Bisnis Indonesia, 3 Maret 2004). Pabrik-pabrik tersebut terutama akan dibangun di Kalimantan, Sumatera, Sulawesi dan Papua. Besarnya jumlah tambahan pabrik pengolahan kelapa sawit tersebut untuk mengantisipasi penambahan luas lahan sekitar 200.000 hektar kelapa sawit. Oleh karena itu, dengan pelaksanaan OTDA prospek kelapa sawit ke depan akan dapat menopang perkembangan ekonomi daerah maupun perekonomian nasional. Pemerintah daerah dengan otonomi yang diberikan mempunyai peluang dan juga cara bagaimana mengantisipasinya ke depan. Kesiapan sumber daya manusia khususnya tenaga kerja yang akan menangani dan mengelola potensi perkebunan tersebut sangat diperlukan, sehingga diharapkan dapat membawa prospek yang lebih baik terhadap penyerapan tenaga kerja dan kehidupan masyarakat.

Kebijakan umum tentang pengembangan kelapa sawit melalui pola PIR terus mengalami dinamika hingga saat ini. Pelaksanaan program PIR tersebut mempunyai dampak positif terhadap pembangunan ekonomi secara nasional. Hal ini terkait dengan berbagai usaha pola PIR yang hampir sama dengan program kemitraan yang berlaku hingga saat ini. Sedangkan aset perusahaan unit pengolahan yang biasanya dikuasai oleh inti (BUMN / Swasta) dapat dimiliki secara bersama-sama, baik oleh perusahaan inti BUMN/ Swasta maupun oleh dan KUD atau Plasma.

Perkebunan merupakan sektor penting bagi ekonomi nasional, karena subsektor tersebut selain sebagai penyumbang dari usaha perkebunan, juga terkait erat dengan proses industri pengolahan barang baku menjadi barang jadi. Proses pengelolaan perkebunan kelapa sawit tidak dapat lepas dengan kehidupan masyarakat petani, yang jumlahnya cukup besar dari penduduk di Indonesia. Perwujudan pembangunan perkebunan kelapa sawit telah dikembangkan melalui pola usaha Unit Pelaksana Proyek (UPP), Perusahaan Inti Rakyat (PIR) dan Perkebunan Besar. Meskipun demikian usaha tersebut belum menunjukkan hasil yang memadai. Hal ini dapat dilihat sejak tahun 2001 kebijakan pembangunan perkebunan diarahkan kepada azas kebersamaan ekonomi melalui pengembangan sistem dan usaha agribisnis yang berdaya saing, dan berkelanjutan (Disbun Prop. SUMUT, 2004). Juga dalam Renstra Pemerintah Daerah telah memprogramkan peningkatan kualitas komoditas unggulan yang semuanya berbasis kepada agrobisnis dan agroindustri. Akan tetapi untuk menunjang program tersebut, terdapat hambatan dalam pemberdayaan tenaga kerja, berupa keterbatasan kemampuan teknologi di bidang pertanian, sehingga ini menjadi upaya yang perlu direalisasikan.

Visi Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Utara dalam upaya meningkatkan pemberdayaan perekonomian petani, telah tertuang dalam rencana strategi Dinas Perkebunan di Sumatera Utara tahun 2001-2005. Visi tersebut adalah sebagai berikut :

'Terwujudnya sistem dan usaha agribisnis yang berdayasaing, berkerakyatan, berkelanjutan, terdesentralisasi dan berwawasan lingkungan melalui kawasan industri masyarakat perkebunan.'

Untuk mewujudkan visi di atas telah ditetapkan misi sebagai berikut :

1. Mendorong terwujudnya peningkatan pelayanan dalam pembangunan perkebunan;
2. Mendorong terwujudnya petani dan pengusaha yang profesional dan mandiri;
3. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya;
4. Mewujudkan lingkungan yang lestari;
5. Mengoptimalkan upaya peremajaan, intensifikasi, rehabilitasi ekstensifikasi dan diversifikasi tanaman;
6. Meningkatkan peran kelembagaan perkebunan.'

Untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan perkebunan tersebut, maka pada tahun 2004 pemerintah Propinsi Sumatera Utara berusaha mendorong dan memfasilitasi peningkatan produksi perkebunan terutama perkebunan rakyat. Wilayah yang dipilih sebagai pusat pengembangan agribisnis adalah kawasan industri masyarakat perkebunan. Kawasan tersebut berbasis pada komoditas yang berasas kebersamaan ekonomi untuk kesejahteraan dan keterpaduan (sinergis) antara kegiatan on farm dan off farm dengan salah satunya menghadirkan koperasi, asosiasi industri, perkebunan besar, perguruan tinggi, dunia penelitian dan IPTEK. Kemudian kelangsungan usaha kelapa sawit dengan pola PIR, akan dibahas berikut ini dengan mengambil kasus petani plasma kelapa sawit Desa PIR-ADB, Kecamatan Bésítang, Kabupaten Langkat dan merupakan wilayah PTPN II.

Pengelolaan Kelapa Sawit

Pengembangan perkebunan kelapa sawit sampai saat ini tampak menggembirakan, karena hampir sebagian besar wilayah di Indonesia telah mendapat perhatian melalui kebijakan perkebunan kelapa sawit. Khusus di Sumatera Utara perluasan lahan untuk pengembangan kelapa sawit sudah terbatas. Di beberapa wilayah kabupaten pengembangan usaha perkebunan kelapa sawit sudah cukup lama dan banyak tanaman kelapa sawit yang sudah tua. Rata – rata telah berusia di atas 20 tahun, sehingga produktivitasnya telah cenderung menurun. Kemudian yang perlu dipikirkan ke depan adalah bagaimana usaha pemerintah, perusahaan perkebunan

kelapa sawit dan petani kelapa sawit sendiri melakukan peremajaan kembali (replanting) sebagai usaha penggantian tanaman yang sudah tua dan tidak produktif lagi. Namun hendaknya juga dipikirkan bagaimana agar pada saat melakukan peremajaan tanaman sawit tersebut tidak serentak, sehingga produksi TBS tidak terhentinya sama sekali dan tidak terjadi penurunan pendapatan bagi petani secara drastis. Sebagai alternatif dapat dilakukan dengan sistem tanam sisipan. Seperti yang telah dikemukakan oleh salah seorang informan di Desa PIR-ABD Besitang, Kabupaten Langkat. Ia seorang petani sawit yang memiliki pengalaman banyak tentang penanaman kelapa sawit.

Ada dua sistem pengelolaan yang dilakukan oleh petani plasma dalam melakukan kegiatannya, yakni dengan sistem kelompok kolektif dan kelompok yang non kolektif. Pada sistem kelompok secara kolektif pengelolaan dan pemeliharaan tanaman perkebunan sawit sampai masa panen dan paska panen dilakukan secara bersama-sama dan hasilnya juga dibagi merata. Sedangkan dalam sistem kelompok non kolektif, kebersamaan biasanya hanya dilakukan pada saat pemasaran hasil produksi saja. Sistem yang berlaku di perkebunan Desa PIR-ADB Besitang, menggunakan sistem kelompok kolektif.

Kelompok tani berperan sebagai pekerja di lahan plasma yang mendapat upah dan uang bagi hasil TBS, sedangkan KUD berperan sebagai pengelola. Dalam bercocok tanam tanaman kelapa sawit biasanya setelah 4-6 tahun tanaman kelapa sawit telah menghasilkan. Kemudian produk puncaknya setelah usia belasan tahun. Selanjutnya pada umur 20-25 tahun biasanya menunjukkan penurunan produksi. Oleh karena itu, pada usia tersebut sudah dipikirkan bagaimana melakukan penanaman kembali. Dalam melakukan penanaman kembali ini pihak KUD telah melakukan pemotongan terhadap hasil penjualan setiap bulan. Penanaman kembali di kebun plasma PIR-ADB Besitang ini diperkirakan akan dilaksanakan tahun 2007. Ada suatu usulan dari Kepala Desa jika nanti akan melaksanakan replanting mestinya dilakukan dengan cara bertahap. Jadi tidak dilakukan serentak. Pendapat seperti itu tentu saja ada benarnya karena jika serentak akan terjadi gejolak dalam kehidupan petani, yaitu penurunan pendapatan petani secara drastis.

Lahan "foodcrop" adalah lahan pendamping petani kelapa sawit dari lahan pokok perkebunan yang rata-rata 0.5 ha. Lahan foodcrop ini digunakan oleh petani untuk tanaman rabung (istilah setempat untuk pohon karet), dan ada juga yang kelapa sawit. Tanaman keras dilahan foodcrop ini rata-rata saat ini umur tanamannya maksimal masih di bawah 10 tahun. Hasil panen dari lahan foodcrop sebetulnya cukup menambah penghasilan para rumah tangga petani. Namun demikian ada sebagian lahan ini yang telah dijual oleh petani. Walaupun pendapatan petani peserta di Desa PIR-ADB Besitang ini cukup baik, namun ada sebagian kecil petani yang telah menjual rumah dan

pekarangannya dan sebagian dari mereka diperkirakan pindah ke Riau. Alasan penjualan lahan dan pindah dari lokasi adalah ingin memperluas lahan perkebunan, sebab di desa ini kemungkinan perluasan lahan sudah tidak mungkin.

Dari bahasan tersebut menunjukkan bahwa usaha tanaman kelapa sawit perlu lahan yang relatif luas, di samping perlu kegiatan yang disiplin. Faktor kesabaran petani diperlukan untuk memperoleh hasil yang optimal. Di perkebunan diperlukan tenaga kerja ulet dan terampil dalam melaksanakan kegiatan di lahan. Umumnya mereka hanya menggunakan tenaga fisik. Bahkan ada kesan yang terjadi di perkebunan kelapa sawit di sekitar daerah Langkat ini kekurangan lahan garapan. Sehingga perambahan kawasan hutan lindung telah terjadi, seperti yang terjadi di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser. Perluasan lahan tanaman kelapa sawit juga telah menggeser lahan tanaman karet rakyat.

6.3. Prospek Potensi Perkebunan Kelapa Sawit

Potensi lahan untuk perluasan perkebunan terutama perkebunan kelapa sawit di kabupaten ini sudah sangat terbatas (Wawancara PTPN II). Lahan cadangan untuk perkebunan kelapa sawit secara besar-besaran sudah tidak mungkin lagi. Bahkan sebagian PTPN yang ada di Sumatera Utara sudah mulai mengalihkan pengembangannya ke Wilayah Indonesia Timur, antara lain ke Kalimantan, Papua dan Sulawesi, sebab sudah mengalami kesulitan mencari lahan di Sumatera Utara. Lahan yang masih tersisa adalah lahan hutan lindung, seperti Taman Nasional Gunung Leuser. Apabila akan terus dikembangkan akan mengganggu keseimbangan lingkungan.

Salah satu usaha untuk kelangsungan perkebunan kelapa sawit baik melalui Perkebunan Negara dan Swasta maupun Perkebunan Rakyat adalah memaksimalkan produktivitas lahan yang ada, yaitu dengan pemeliharaan dan pemupukan yang sebaik-baiknya agar produktivitas tanaman kelapa sawit tetap tinggi dan umur pohon yang produktif lebih panjang. Kemudian juga perlu segera mengadakan replanting bagi tanaman kelapa sawit yang sudah tua (yaitu di atas usia 25 tahun) dan produktivitasnya telah menurun dan tidak ekonomis lagi. Pohon-pohon tua tersebut apabila dipertahankan akan rugi, karena biaya pemeliharaan dan pemupukannya akan lebih tinggi dibandingkan nilai produksinya.

Menurut Turner dan Gillbanks, tanaman kelapa sawit dikatakan sudah tidak menguntungkan lagi (produksinya tidak sebanding dengan biaya pemeliharannya), jika usianya telah mencapai di atas 25 tahun dan ketinggian pohon telah mencapai 15 – 18 meter (Poeloengan, 1988). Peremajaan tanaman kelapa sawit tersebut juga harus memanfaatkan varietas bibit yang lebih unggul. Bagi perkebunan rakyat, seperti di PIR-ADB ini

perencanaan replanting memang betul-betul harus dilakukan sebaik-baiknya. Sebab untuk replanting memerlukan dana yang tidak sedikit dan usia pohon saat ini telah mencapai 22 – 23 tahun. KUD Rahmat Tani satu-satunya KUD yang mengelola plasma kelapa sawit di Desa PIR-ADB Besitang telah mengumpulkan dana sekitar Rp 4 milyar untuk program replanting untuk beberapa tahun mendatang. Suatu rencana yang cukup bagus untuk melestarikan usaha tanaman kelapa sawit dan mempertahankan pendapatan petani kelapa sawit yang selama ini telah dinikmati.

Di samping usaha memaksimalkan produktivitas lahan, ada sebagian masyarakat petani kelapa sawit, seperti di Desa PIR-ADB yang untuk memperluas lahan perkebunan kelapa sawitnya dengan cara merombak atau mengganti tanaman keras yang lain. Kebanyakan dari mereka merombak tanaman karet yang sudah tua dan tidak produktif menjadi tanaman kelapa sawit. Sebagian mereka menganggap bahwa harga getah karet akhir-akhir ini sudah tidak menjanjikan lagi dibandingkan dengan harga TBS kelapa sawit. Di samping itu, pemasaran TBS kelapa sawit sekarang semakin mudah dan dekat dengan pabrik-pabrik pengolahan kelapa sawit.

Hasil Sampingan Sawit Belum Dioptimalkan

Hasil sampingan CPO dari kelapa sawit seperti bungkil inti sawit sebagai pakan ternak belum diolah atau dimanfaatkan secara baik. Hal lain seperti lumpur sawit, sabut sawit dan daun sawit sebetulnya merupakan bahan mentah yang dapat diolah. Juga hanya sedikit sekali dan bisa dikatakan tidak ada petani yang memanfaatkan daun dan pelepah sebagai atap rumbia.

Sabut sawit yang memiliki kandungan metabolisme rendah dibanding rumput gajah dengan cara menambah urea dapat dibuat isokalori dan isonitrogen dengan rerumputan yang baik untuk makanan sapi. Demikian juga lumpur kelapa sawit bisa berfungsi pengganti dedak padi. Pelepah daun sawit bisa dikatakan terbuang percuma. Pada hal di Malaysia (Waspada, 6 January 2004) bahwa bahan baku tersebut dapat diolah menjadi pelet yang bisa diekspor ke beberapa negara maju untuk pakan (Oil Palm food). Namun sekarang di sekitar Besitang telah ada pabrik pembuatan plywood (kayu lapis) dari pohon kelapa sawit tua. Ini dimulai dari PT ASIA FORESTAMA RAYA (AFR) Hal ini bahan bakunya berasal dari PTPN II Sawit Seberang.

Cangkang kelapa sawit sekarang diminati oleh pasar Eropa untuk bahan bakar (arang)

Pengamatan yang dilakukan di lapangan, ditemukan bahwa petani belum sepenuhnya mengerti akan pemanfaatan hasil produksi lainnya dari kelapa sawit tersebut. Meskipun beberapa orang sebagai pengurus koperasi sebetulnya sudah mengetahuinya akan masing-masing kegunaan dari bagian kelapa sawit tersebut. Di lain pihak tampaknya belum tersedianya perusahaan yang berminat untuk mengolah hasil sampingan dari buah kelapa sawit tersebut. Hal ini selain memerlukan investasi yang besar, teknologi yang sesuai dan juga diperlukan sumber daya manusia yang kredibel dan profesional dalam bidang industri pengolahan lanjutan kelapa sawit tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, telah terungkap pada bab sebelumnya bahwa penghasilan petani peserta PIR mencapai sekitar 2 juta rupiah setiap bulannya. Penghasilan tersebut hanya berasal dari penerimaan hasil lahan plasma kelapa sawit. Penghasilan tambahan lain tentu saja diperoleh dari upah hasil bekerja di plasma. Kemudian hasil bertani lain seperti penanaman dari tanaman perkebunan di lahan pekarangan dan lahan foodcrop. Sehingga sebetulnya kehidupan sebagai petani kelapa sawit dalam pola PIR mengindikasikan cukup menjanjikan. Meskipun berbagai keinginan tentu saja belum bisa terpenuhi hanya dengan usaha tanaman sawit saja.

Janjang kosong buah kelapa sawit, yang diperkirakan memiliki berat yang sama dengan berat produksi kelapa sawit dapat dimanfaatkan untuk industri kertas dan bahan baku pupuk. Ini juga belum dipikirkan untuk diolah. Hal ini sebagai potensi industri baru yang dapat menyerap tenaga kerja. Kemudian limbah cair yang dapat dimanfaatkan untuk pupuk. Mukti Sarjono (1996) memperkirakan setiap 1 ton TBS akan menghasilkan 1 ton limbah. Jika secara nasional diperhitungkan lebih dari 146 pabrik dengan kapasitas 25 juta ton TBS per tahun, maka juga berapa ton yang dihasilkan. Pemanfaatan limbah tersebut juga potensi penyerapan tenaga kerja.

6.4. Prospek Pemasaran Kelapa Sawit

Hasil dari perkebunan kelapa sawit yang telah dijadikan komoditas selama ini adalah buah sawitnya. Kemudian dalam perdagangannya disebut dengan tandan buah segar (TBS) memang setiap bulannya hasil panen berfluktuasi. Pada penjualan sawit dalam pola PIR sebelum petani lunas kredit buah segar (TBS) harus dimasukkan dalam PTP. Tetapi kasus petani plasma di Desa PIR-ADB Besitang menunjukkan bahwa sejak 1991 hingga saat ini petani diberikan kebebasan untuk melakukan penjualan melalui tender yang dikoordinir oleh KUD setempat. Untuk menentukan kepada siapa kelapa sawit plasma harus dijual tergantung penawaran mekanisme pasar. Tentu saja menurut harga pasar, siapa yang memiliki penawaran tertinggi itu yang akan dipilih. Meskipun juga dipahami bahwa proses penawaran ini hanya dilakukan oleh KUD sebagai representatif petani plasma sebagai anggotanya.

Secara makro, kapasitas produksi nasional pabrik minyak goreng dari kelapa sawit pada tahun 1998 mencapai 7.977.630 ton, namun ternyata hanya dicapai 30,1 persen. Hal tersebut disebabkan rendahnya pasokan TBS ke pabrik minyak goreng yang ada. Apabila harga pasar CPO di internasional lebih baik dibandingkan harga di dalam negeri, maka produsen biasanya akan memilih ekspor dari pada memasok ke pabrik minyak goreng yang ada dalam negeri. Maka untuk melindungi kelangsungan pabrik di dalam negeri tentunya pemerintah perlu menaikkan pajak ekspor. Sebelum terjadinya krisis moneter 1997, produksi minyak goreng mencapai 2.691.702 ton, tetapi pada akhir tahun 1998 turun menjadi 2.402.498 ton. Hasil tersebut banyak terserap untuk kebutuhan dalam negeri. Perkembangan pasar yaitu minyak goreng yang diekspor sebelum krisis telah terjadi grafik yang meningkat, volume ekspor tahun 1995 adalah 281.959 ton dan pada tahun 1996 menjadi 690.259 ton, kemudian pada tahun 1997 adalah 1.586.499 ton. Keadaan ini diharapkan akan terulang kembali setelah masa perbaikan keadaan sekarang ini. Namun demikian ternyata di negara kita masih juga melakukan impor minyak goreng pada tahun 1997 adalah 85.698 ton. (Pusat Penelitian Kelapa Sawit dalam kumpulan Kelapa Sawit Dalam Berita, antara Januari-Maret 2004).

Tabel 6.1 memberikan gambaran kondisi ekspor minyak goreng dari hasil kelapa sawit sebelum dan setelah terjadinya krisis. Pertumbuhan rata-rata produksi 1996-2003 adalah 22 persen, di mana Indonesia sedang melakukan ekstensifikasi secara besar-besaran penanaman kelapa sawit. Tetapi setelah kondisi krisis moneter dunia dan melanda Indonesia yang terjadi pada 1998 pemasaran kelapa sawit mengalami goncangan, sehingga volume ekspor sedikit menurun. Kondisi tahun 1998 sebenarnya dipicu oleh perkembangan dalam negeri yang tidak menentu dan berpengaruh terhadap pasar minyak goreng. Sedangkan laju pertumbuhan konsumsi dalam negeri selama tujuh tahun terakhir (1996-2003) mengalami pertumbuhan sebesar 11,3 persen.

Tabel 6.1 : Perkembangan Produksi dan Konsumsi CPO di Indonesia, 1996-2003

Tahun	Produksi (000ton)	Ekspor (000ton)	Konsumsi (000 ton)
(1)	(2)	(3)	(4)
1996	4.500	1.851	2.500
1997	5.400	2.982	2.800
1998	5.400	2.260	2.800
1999	6.300	3.319	3.000
2000	7.100	4.140	3.000
2001	8.000	4.940	2.900
2002	9.000	6.380	2.900
2003	9.800	6.830	3.100

Sumber : Oil World, Kompas 7 Oktober 2004

Ekspor CPO dunia pada tahun 2004 Indonesia masih tampak tertinggal bila dibandingkan dengan Malaysia, baru menguasai 33,3 persen sedangkan Malaysia yang telah mencapai 56,9 persen. Negara yang menjadi importir terbesar CPO Indonesia masih Pakistan dan Belanda. Diperkirakan ekspor Indonesia ke Amerika akan mengalami penurunan pada lima tahun ke depan (Bisnis, 27 January 2004).

Pengalaman dari pabrik minyak goreng yang ada di Kecamatan Sei Lapan menunjukkan bahwa dari hasil CPO 100 persen ternyata 94 persen adalah minyak goreng. Dengan lahan industri pengolahan seluas 3 hektar, untuk memasak CPO menjadi minyak goreng ternyata bisa memiliki produksi berkapasitas 300 000 ton CPO per tahun. Mereka mampu menyerap tenaga kerja 688 orang, yang terdiri dari 56 tenaga staff dan 632 tenaga buruh. Gambaran tersebut di atas menunjukkan bahwa usaha kelapa sawit masih memiliki prospek ke depan yang lebih baik. Namun usaha perkebunan kelapa sawit tidak hanya berhenti pada melakukan penanaman kelapa sawit dan mendapatkan hasilnya hanya berbentuk TBS, akan tetapi perlu dikembangkan pada usaha produksi pengolahan. Sebagai contoh di lokasi penelitian, petani plasma pada umumnya hanya mengerti bahwa lahan hanya dapat menghasilkan buah kelapa sawit. Untuk proses selanjutnya dikuasai oleh perusahaan mengolah menjadi bubur kelapa sawit.

Dengan melihat pengembangan kelapa sawit selama ini, diperkirakan pada 2005 Indonesia akan menyamai Malaysia. Bahkan pihak Oil World (Jerman) menaruh harapan bahwa produk kelapa sawit Indonesia akan mendominasi di pasaran internasional. Hal ini mengingat Indonesia memiliki sumber daya lahan yang cukup besar.

Minyak kelapa sawit juga mempunyai daya saing tinggi dibandingkan dengan minyak nabati lainnya karena:

1. Kelapa sawit produktivitas per hektarnya cukup tinggi.
2. Kelapa sawit merupakan tanaman perkebunan tahunan yang handal terhadap penyakit dan iklim.
3. Minyak kelapa sawit tidak terbukti meningkatkan kolesterol tinggi, bahkan mengandung pro-vitamin A.

6.5. Peluang dan Tantangan Penyerapan Tenaga Kerja di Perkebunan Kelapa sawit.

Kegiatan-kegiatan di perkebunan kelapa sawit merupakan kegiatan dalam perkebunan yang memerlukan tenaga kerja yang cukup banyak. Petani peserta plasma sebagai tenaga kerja utama dalam pengelolaan tanaman sawit, seperti juga pengelolaan tanaman lainnya (karet). Bahkan seperti yang dituturkan oleh Jan Breman bahwa awal mula munculnya budaya perkebunan di Sumatera Utara tidak lepas dari sejarah terbentuknya kuli kontrak pada masa kolonialisasi Belanda (Breman, 1997). Pada waktu itu perkebunan tanaman lada terutama ditanam di daerah Langkat. Seperti dinyatakan dan dipetik dari Jan Breman berikut ini :

“Tentang penguasa di Serdang Anderson menyatakan”
perniagaan dan pertanian berkembang di bawah
Pemerintahan yang bijak”. Penduduk kawasan itu terdiri
atas 3.000 orang Melayu dan 8.000 orang batak. Lada dari
daerah hulu dibawa ke hilir melalui Sungai, jumlah
penduduk Langkat ditaksir 7.000 orang Melayu dan 13.000
orang Batak. Budidaya lada masih terus diperluas, mutunya
sangat baik.”.

Dari kenyataan ini ingin menunjukkan bahwa pada dasarnya sejak dulu peluang pekebun di daerah Langkat sudah dikenal.

Para kuli kontrak tersebut mayoritas adalah orang-orang Jawa. Mulanya mereka terdiri dari pekerja-pekerja perkebunan yang datang karena kontrak atau datang dengan orang tua mereka di masa sebelum perang. Mereka ini datang dari daerah pertanian di Jawa ke Sumatera Utara (Sajogyo dan Pudjiwati S, 222, 1982)

Hasil buah kelapa sawit merupakan suatu komoditas yang dapat meningkatkan devisa negara dan daerah dari sektor non-migas untuk memenuhi kebutuhan akan minyak nabati bagi kebutuhan sehari-hari. Oleh karenanya sudah selayaknya jika pemerintah dan semua komponen untuk berusaha meningkatkan produksi kelapa sawit melalui kegiatan ekstensifikasi, intensifikasi, rehabilitasi dan juga diversifikasi. Usaha

ekstensifikasi yang dilakukan seperti dilakukan program PIR terutama di Sumatera Utara adalah PIR-trans. Pengembangan dengan pola PIR dilakukan sebagai pembinaan perkebunan rakyat. Dengan usaha pola PIR juga memperkenalkan teknologi penanaman yang dikomandoi oleh suatu perusahaan besar dan juga manajemen pengelolaan usaha tani yang maju.

Setelah konversi petani sebenarnya memiliki tanggung jawab terhadap lahan kebunnya, karena pada dasarnya Inti hanya melakukan pembinaan dan membantu mengatasi persoalan pengelolaan dan pemasaran. Inti tentu saja pada mulanya menerima hasil TBS sawit dengan jalur pemasaran yang sudah diatur melalui Koperasi Unit Desa yang telah didirikan bersama.

Peluang untuk bisa memanfaatkan hasil binaan dari inti tersebut sebetulnya diwujudkan dengan melakukan manajemen pengelolaan keuangan rumah tangga petani. Hal ini karena setiap petani peserta PIR rata-rata sebulan telah memperoleh pendapatan yang relatif cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, pendidikan dan kebutuhan lainnya. Namun demikian tampaknya memang belum tampak bahwa semangat orang muda untuk terjun sebagai tenaga kerja di perkebunan sawit. Hal ini karena karena anak-anaknya banyak yang berpendidikan pergi ke kota lain. Bagi mereka yang kurang pendidikan saja yang mau terjun di perkebunan kelapa sawit.

Ekspor seperti ke Negara Jerman ternyata produk turunan CPO adalah yang diminati di negara ini. Produksi turunan seperti mentega dan minyak bisa diekpor ke negara lainnya (Siregar. A dan Syaad Afifudin, 2004) Sampai tahun 2007, diperkirakan Indonesia akan menerima 80 Unit Pabrik Kelapa sawit menyusul tumbuhnya perkebunan kelapa sawit 200 000 ha. Ketua umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menyatakan bahwa pada dua tahun terakhir sebetulnya banyak investor ingin menanamkan modalnya dalam kelapa sawit. Dari sini tentu saja akan membutuhkan banyak tenaga kerja yang dapat diserap. Sebagai gambaran perusahaan Pengolahan Kelapa Sawit Karimun yang memiliki area luas 500 hektar perkebunan kelapa sawit pada tahun itu sekitar 150 orang tenaga kerja dari staf sampai pekerjanya dapat diserap. Hal ini belum tenaga kerja yang ada di lapangan perkebunan. Yang bekerja di pabrik umumnya berpendidikan SMA kejuruan dan juga umum di samping sarjana.

Dilihat dari kebijakan pemerintah daerah pada uraian di muka, maka ada peluang daerah untuk memperluas kesempatan penanaman kelapa sawit. Belajar dari TKI (Tenaga Kerja Indonesia) yang datang secara haram ke Malaysia saja per bulan gaji yang diterima sekitar 400 ringgit (Rp 840.000,- belum termasuk bonus dari perusahaan) (Waspada 13 January 2004). Sejak masa kolonialisasi bahwa Sumatera Utara termasuk daerah Langkat khususnya Besitang sudah diunggulkan sebagai kawasan penghasil perkebunan kelapa sawit, lada, cokelat maupun kelapa. Kebijakan pemerintah Indonesia masih

menetapkan bahwa daerah ini masih menjadi pusat penghasil perkebunan yang cukup dikenal sampai saat ini

Menurut data tentang kesesuaian lahan, tampaknya tanaman kelapa sawit, kelapa dan karet cocok ditanam di Kabupaten Langkat. Untuk tanaman kelapa sawit misalnya memanfaatkan lahan sekitar 250 hektar, kelapa 335 hektar dan karet 120 hektar. Diperkirakan ada sekitar 209.834 hektar adalah sebagai lahan perkebunan dan untuk hutan 125.091 hektar dan semak belukar 2.960 hektar. Oleh karena itu, tampaknya masih ada ruang yang belum dimanfaatkan. Oleh karena itu, di samping tanah sebagai modal pertama untuk lebih diintensifkan juga memikirkan untuk mempertahankan tanah yang sudah dibudidayakan untuk peremajaan kembali.

Secara geografis Kabupaten Langkat cukup strategis di mana jarak dari Medan tidak terlalu jauh. Di samping daerah itu merupakan jalur lintas antar Medan dan daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Pengaruh pasar minyak kelapa sawit terhadap luas lahan seperti yang dinyatakan oleh Syaad Afifudin (2004) staf pengajar Universitas Sumatera Utara bahwa perusahaan akan lebih cenderung melakukan ekspor dari pada memenuhi kebutuhan dalam negeri. Dalam pemenuhan kebutuhan dalam negeri memerlukan dana yang lebih besar dan direpotkan dengan birokrasi. Kondisi tersebut terjadi ketika resesi pemasaran hasil olahan kelapa sawit di dalam negeri harganya menurun. Di samping itu, telah terjadi beberapa spekulasi yang menahan harga. Sehingga harga di pasar dalam negeri tidak terjadi kondisi yang sehat. Oleh karena itu, bukan sesuatu yang mustahil jika keadaan ini tidak didukung oleh kebijakan pemerintah akan merugikan baik petani maupun perusahaan perkebunan kelapa sawit sendiri.

6.6. Isu Ketenagakerjaan.

Masalah ketenagakerjaan pada dasarnya terkait erat dengan pembahasan sumber daya manusia. Menurut Bank Dunia (1990) bahwa pengertian pengembangan sumber daya manusia sebetulnya sebagai human development artinya melakukan pengembangan manusia itu sendiri. Unsur-unsur yang perlu dikembangkan adalah pendidikan dan ketrampilan; kesehatan dan gizi; kesempatan kerja; lingkungan hidup pengembangan karier dan kehidupan berpolitik yang bebas. Dalam hal ini CIDA (Canadian International Development Agency seperti disitir oleh Noer Effendi (1995) bahwa pengembangan sumber daya manusia menekankan manusia sebagai alat (means) maupun sebagai tujuan akhir suatu pembangunan. Dalam jangka pendek dapat disebutkan bahwa pengembangan pendidikan dan pelatihan untuk menerima perkembangan teknologi dan mempermudah mereka untuk terlibat dalam kehidupan sosio-ekonomi.

Dari pengertian tersebut sasaran pengembangan sumber daya manusia adalah meletakkan manusia sebagai subyek yang perlu pendidikan dan ketrampilan serta pekerjaan sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan sosial ekonominya. Bagaimana dalam tenaga kerja di perkebunan kelapa sawit dalam hal ini dari proses tanam sampai panen serta pengolahan di pabrik tampaknya menarik untuk dibahas.

Dalam kegiatan perkebunan kelapa sawit, PIR umumnya mereka sebagai petani peserta yang memiliki lahan untuk diolah, lahan yang dimiliki oleh petani tersebut terkenal dengan lahan plasma dan foodcrop. Lahan plasma adalah kurang lebih 2 hektar untuk tanaman sawit mengikuti pola perusahaan inti rakyat. Lahan foodcrop yang sedianya diperuntukkan tanaman pangan, seperti polowijo atau padi (luasnya 0,5 hektar). Namun demikian tanaman tersebut jarang ditemukan di lahan petani. Di samping itu, petani juga memiliki lahan sekitar rumah luasnya sekitar seperempat hektar.

Lahan yang disebut lahan foodcrop ini sekarang banyak ditanami karet dan kelapa sawit. Pengelolaan lahan ini memang dikerjakan sendiri bersama anggota keluarganya. Menurut data umum bahwa petani kelapa sawit hampir 45 persen mempunyai anggota keluarga 4-5 orang. Ada yang memiliki anggota lebih dari itu adalah 37,5 persen, Secara empirik saja bahwa petani kelapa sawit memiliki cadangan tenaga kerja yang cukup secara kuantitatif. Petani yang berumur 40 tahun cukup besar juga yakni 42,5 persen (lihat Djafar, 1990). Namun demikian ternyata sebagian dari mereka adalah berpendidikan Sekolah Dasar. Kondisi ini tidak jauh berbeda dengan kondisi di wilayah penelitian di mana lebih dari 60 persennya petani kelapa sawit berumur 50 tahun. Oleh karena itu, prospek ketenagakerjaan perlu memperoleh perhatian. Bagaimana usaha pemerintah menyertakan generasi berikutnya untuk tetap dapat melanjutkan melakukan budidaya tanaman sawit, sehingga dapat berproduksi secara maksimal. Karena bagaimanapun sumber daya manusia akan menjadi penting untuk merespon iklim globalisasi tenaga kerja dan agar mampu bersaing dengan tenaga dari luar daerah maupun negara tetangga.

Pengembangan perkebunan kelapa sawit terutama melalui pola PIR yang termasuk sistem trans perannya dominan mendukung keberhasilan program transmigrasi. Setiap unit pengembangan perkebunan kelapa sawit banyak membuka lapangan kerja banyak tenaga kerja untuk melakukan pekerjaan pada tingkat tingkat lapisan usaha perkebunan. Tenaga kerja yang terserap dalam pengelolaan kebun 1994 mencapai 1,1 juta tenaga kerja untuk 110 unit pabrik, sehingga bisa diprediksi setiap unitnya dapat memperkerjakan sekitar 10.000 orang tenaga kerja.

Petani saat ini tinggal menerima hasil, banyak generasi mudanya yang tidak mengetahui bagaimana proses dari tahap awal penanaman. Petani dan

anggota keluarganya sekarang tinggal memungut hasil, padahal menurut penuturan para informan pada masa awalnya memerlukan keuletan dan ketabahan dalam usaha penanaman kelapa sawit tersebut. Ada indikasi bahwa generasi sekarang banyak yang kurang menekuni bekerja di ladang, bahkan di antara mereka banyak yang melanjutkan pendidikan di luar daerahnya dan tidak kembali. Di luar daerah mereka cenderung mencari pekerjaan di sektor formal dan di luar bidang pertanian dan perkebunan.

Sistem kelompok adalah salah satu cara merespon teknologi dan mengurangi perbedaan hasil panen di antara petani peserta. Cara ini tentu saja mengurangi kesenjangan antara petani yang hasil panennya bagus dan yang kurang bagus, kemungkinan karena terserang hama atau penyakit. Dalam arti ekonomi ternyata bahwa sistem pengelolaan perkebunan secara kolektif akan memberikan hasil yang lebih baik, dan juga lebih efisien dan efektif.

Hasil produksi kelapa sawit dalam perkembangannya bukan saja untuk kebutuhan dalam negeri, tetapi juga untuk memenuhi permintaan ekspor. Peluang untuk peningkatan devisa negara cukup terbuka. Kemudian beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan sebagai faktor pendukung adalah kemampuan teknologi, kesediaan lahan, kebutuhan listrik sebagai tenaga penggerak, investasi dan ketersediaan tenaga kerja. Kebutuhan teknologi selama ini sudah menggunakan teknologi modern, terutama dalam rangka pendirian pabrik yang peralatan mesinnya berasal dari luar negeri. Kebutuhan air dan listrik di beberapa daerah khususnya di Sumatera Utara juga dirasakan masih jauh dari mencukupi. Kemudian penyiapan tenaga kerja dapat dikatakan secara kuantitas dikatakan cukup, namun dalam kualitasnya masih belum memenuhi harapan. Kemudian bagaimana keterkaitannya dengan persolan tenaga kerja di pertanian yang sekaligus sebagai petani. Peluang pelatihan ketrampilan menjadi serius dalam keterkaitannya meningkatkan daya dorong terhadap tenaga kerja muda.

Dalam bidang pertanian termasuk di dalamnya lapangan usaha perkebunan, ada empat usaha pokok untuk dasar kebijakan yang terkait dengan aspek pertumbuhan perekonomian dan ketenagakerjaan. Usaha tersebut terutama untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan petani terutama petani kecil. Meskipun persentase mereka yang bekerja di pertanian cenderung mengalami penurunan, tetapi sub sektor perkebunan diperkirakan tetap merupakan sektor yang dapat menampung pencari kerja. Dalam hal ini, kelapa sawit sebagai komoditas agribisnis yang hakekatnya merupakan usaha diversifikasi secara vertikal untuk dikerjakan dari proses pra-panen sampai pasca panen. Dalam rangka mendorong tenaga kerja muda untuk tertarik ke usaha kelapa sawit tidak ada jalan lain kecuali bagaimana kelapa sawit dapat diusahakan secara modern dan efisien, sehingga upah tenaga kerja petani kelapa sawit dapat meningkat.

Khusus kasus Kabupaten Langkat sebagai daerah yang strategis baik sebagai wilayah yang berbatasan dengan Aceh dan Sumatera Utara menjadi potensi dalam pendistribusian hasil perekonomian. Bahkan daerah Sumatera Utara memiliki wilayah yang berbatasan dengan perairan internasional yakni Selat Malaka. Hasil produksi kelapa sawit dan getah karet mempunyai kemudahan dalam aspek pemasaran terutama beberapa perusahaan pengolahan sawit (PTPN) dan karet di sekitar Kabupaten Langkat tersebut.

6.7. Penutup

Selama ini peran perkebunan kelapa sawit terhadap pembangunan ekonomi daerah maupun nasional terus mengalami peningkatan. Di lain pihak masyarakat perkebunan (rakyat) semakin menunjukkan keberhasilan dalam usaha pengelolaan kelapa sawit melalui pola PIR. Kebijakan daerah merupakan salah satu yang dapat mendorong terangkatnya kegiatan kelapa sawit untuk mendukung terlaksananya program pembangunan pabrik pengolahan sawit. Namun demikian, tidak ada sesuatu kegiatan yang tidak memiliki kekurangan dan masalah baik dalam usaha pengembangannya maupun dalam aspek manajemennya secara nasional maupun lokal.

Kemudian masalah pemasaran hasil kelapa sawit perlu diimbangi dengan kebijakan pengolahan. Karena jika didasari dengan pemikiran bagaimana petani dapat didekatkan dengan pihak pengolahan sawit akan lebih memutus rantai yang panjang yang selalu dialami dalam bidang pemasaran hasil pertanian. Penciptaan lapangan kerja di perkebunan kelapa sawit tidak bisa dihindarkan dengan kebijakan ekstensifikasi lahan. Untuk wilayah yang ada keterbatasan lahan untuk kelangsungan (sustainability) usaha perkebunan kelapa sawit termasuk pola PIR adalah usaha replanting (penanaman kembali) yang tepat, agar penyerapan tenaga kerja di usaha ini terus berlangsung. Usaha PIR dengan sistem plasma dan inti sebetulnya merupakan pilihan kebijakan yang baik. Hal lain yang belum dilihat adalah intensifikasi lahan, di mana sistem multiple cropping dalam usaha tani campuran perlu dipikirkan.

Pengetrapan teknologi untuk pemanfaatan hasil sampingan pohon sawit agar dikembangkan serta diperkenalkan pada petani plasma agar dapat memperluas jenis komoditas yang diolah. Hal ini dapat dilakukan dengan diversifikasi pengolahan hasil pohon sawit, yang akan banyak menyerap banyak tenaga kerja. Di lain pihak perlu selalu memantau pasar di mana komoditas minyak kelapa sawit menjadi tumpuan ekspor. Untuk kelangsungan usaha dan produksi dalam kasus perkebunan di wilayah Besitang perlu dipikirkan untuk mengganti pohon kelapa sawit yang sudah tidak memiliki produksi optimal dengan sistem replanting yang tepat.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**7.1. Kesimpulan**

Dari uraian dan kajian dalam bab-bab tersebut di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Hubungan kemitraan antara inti dan plasma sejak awal pembukaan PIR cukup harmonis. Pada tahun-tahun awal sebelum panen TBS maupun sesudah panen TBS para petani plasma masih sangat menggantungkan kegiatannya di plasma kepada inti, dari mulai pemeliharaan, panen sampai pemasaran TBS. Pada waktu para petani plasma belum banyak memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit. Dengan modal pemilikan lahan dan tenaga kerja, pihak petani plasma merasa diuntungkan dengan ikut PIR, karena adanya bimbingan cara pengelolaan kebun kelapa sawit yang benar. Namun kemudian para petani plasma merasa pihak inti nampak lebih mendominasi dalam pemasaran TBS, pemasaran TBS dikendalikan oleh inti dan dirasakan oleh para petani plasma kurang terbuka, sehingga pihak petani plasma merasa tidak mendapatkan hak sepenuhnya. Kemudian dengan telah didirikan KUD yang dikelola para petani plasma sendiri, peran inti pada awal tahun 90-an mulai diambil alih oleh KUD. Peran yang dilakukan KUD adalah mengelola semua usaha perkebunan kelapa sawit di plasma, mulai dari pemeliharaan, pemanenan sampai pemasaran. Sejak dikelola sendiri oleh KUD tersebut produksi di plasma makin baik, pemasaran lebih terbuka dan lancar serta para petani plasma lebih banyak menikmati hasilnya. Oleh karena itu, sejak dikelola KUD tersebut lebih nampak adanya kemandirian para petani plasma dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit sendiri, tanpa ada campur tangan oleh pihak luar. Meskipun untuk teknis kegiatan di perkebunan plasma pihak KUD masih tetap sering berkonsultasi dengan perusahaan inti untuk meningkatkan produktivitas.
2. Perkebunan kelapa sawit, khususnya pola PIR telah memberikan kesempatan kerja yang cukup banyak bagi tenaga kerja. Berbagai kegiatan di perkebunan plasma kelapa sawit meliputi penyiangan, pemupukan, pembrantasan hama, pembersihan lingkungan, pembersihan pohon sampai pemanenan memberikan lapangan kerja

baik kepada tenaga kerja petani, keluarga dan penduduk di sekitarnya. Hadirnya perkebunan kelapa sawit juga telah menciptakan multiple effects terhadap terbukanya lapangan kerja yang lain, seperti kesempatan kerja di pabrik pengolahan, usaha angkutan, usaha perdagangan, usaha perbengkelan, usaha pendidikan, usaha telekomunikasi, dan jasa lainnya.

3. Adanya penyerapan tenaga kerja di perkebunan plasma kelapa sawit telah memberikan kesejahteraan bagi para petani plasma beserta keluarganya. Pendapatan mereka cukup baik, rata-rata pendapatan rumah tangga petani perkebunan plasma kelapa sawit dapat mencapai Rp 2 juta lebih. Para petani plasma tersebut menerima pendapatan dari hasil panen yang dikelola KUD rata-rata sekitar Rp 1,5 juta per bulan. Kemudian masih ditambah dengan pendapatan dari hasil kerja sebagai pekerja di plasma bersama anggota keluarganya dan juga pendapatan dari usaha lain di luar perkebunan. Pekerjaan di perkebunan plasma kelapa sawit tidak banyak menuntut pendidikan yang tinggi, hanya memerlukan tenaga yang kuat dan trampil. Oleh karena itu, mampu menampung tenaga kerja dari berbagai segmen, laki-laki/perempuan, tua/ muda, dan berbagai latar belakang pendidikan, terutama untuk pendidikan yang rendah yang merupakan mayoritas tenaga kerja di daerah pedesaan daerah penelitian.
4. Ada beberapa faktor yang ikut berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di perkebunan kelapa sawit pola PIR. Faktor-faktor tersebut meliputi faktor internal dan eksternal. Dalam faktor internal tersebut antara lain ketersediaan lahan. Perluasan lahan di daerah penelitian sudah semakin terbatas, namun dengan adanya perubahan teknologi seperti peningkatan pemeliharaan tanaman, replanting dan pemilihan bibit yang lebih unggul tetap akan membuka kesempatan kerja. Permodalan yang sudah dirintis oleh para petani plasma berupa pengumpulan dana untuk replanting yang dilola oleh KUD Rahmat Tani (mencapai Rp 4 milyar, tahun 2004). Kualitas SDM yang berupa peningkatan kemampuan usaha perkebunan di lahan plasma dan foodcrop juga telah membuka kesempatan kerja bagi para petani dan pencari kerja. Faktor eksternal adalah adanya kebijakan pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah, berupa diversifikasi CPO, akan membuka kesempatan kerja yang lebih banyak. Untuk usaha diversifikasi tersebut dibutuhkan investasi baru, sehingga perlu adanya iklim investasi yang baik. Selama ini iklim investasi masih belum begitu kondusif. Pemberian kredit (seperti dari ADB) mampu membuka lahan, penanaman dan pemeliharaan tanaman kelapa sawit dan dapat memberi lapangan kerja serta pendapatan bagi petani. Kelancaran pemasaran baik di tingkat nasional maupun internasional selama ini

menjamin kelangsungan usaha perkebunan kelapa sawit yang berarti juga kelangsungan penyerapan tenaga kerja. Adanya kelembagaan ekonomi, seperti KUD Rahmat Tani sebagai pengelola plasma telah membuka kesempatan kerja yang cukup banyak baik yang dalam lingkup organisasi KUD sendiri maupun pada pengembangan unit usaha di plasma.

5. Prospek penyerapan tenaga kerja di perkebunan plasma kelapa sawit di daerah penelitian masih tetap baik, meskipun baik di Sumatera Utara maupun di daerah penelitian lahan untuk perluasan perkebunan kelapa sawit relatif terbatas. Namun dengan usaha intensifikasi lahan, penggunaan bibit yang lebih unggul dan replanting/ peremajaan apabila dilakukan sebaik-baiknya dengan teknologi yang memadai akan tetap menyerap tenaga kerja yang ada dan sekaligus memberikan pendapatan yang lebih baik bagi petani kelapa sawit dan keluarganya. Adanya diversifikasi produk dari pemanfaatan hasil dari pohon kelapa sawit (seperti pelepahnya, daunnya dan batang-batangya yang sudah tua) akan memberikan peluang kerja bagi penduduk yang kreatif. Di industri hilir (pabrik pengolahan) diversifikasi produk buah kelapa sawit, tidak hanya menghasilkan produk CPO, tapi juga produk lain (seperti oleokimia, kompos, pakan ternak, arang dsb). Adanya diversifikasi produk tersebut akan membuka divisi-divisi baru dalam pabrik pengolahan dan sekaligus membuka peluang kerja, meskipun harus menggunakan teknologi yang maju. Berarti akan membuka peluang bagi para tenaga kerja yang berkualitas, antara lain mereka yang memiliki latar belakang pendidikan yang terkait dengan teknologi pengolahan hasil kelapa sawit.
6. Prospek penyerapan tenaga kerja secara nasional masih cukup baik. Di propinsi-propinsi seperti Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Timur dan propinsi-propinsi di Indonesia Timur, melihat potensi lahan dan aksesibilitasnya masih terbuka lebar untuk dikembangkan/ dibuka usaha perkebunan kelapa sawit dan sekaligus membuka lapangan kerja cukup banyak. Pengembangan dan pembukaan lahan baru perkebunan kelapa sawit tersebut sudah mulai dirintis oleh beberapa PTP yang tidak lagi membuka perkebunan kelapa sawit di Sumatera Utara, tapi sudah merambah ke wilayah Indonesia Timur. Usaha ini semestinya diikuti oleh PTP – PTP yang lain.

7.2. Implikasi Kebijakan

1. Beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan sebagai faktor pendukung adalah kemampuan teknologi, kesediaan lahan, kebutuhan listrik sebagai tenaga penggerak, investasi dan ketersediaan tenaga kerja.

Kebutuhan teknologi sampai sekarang ini masih banyak teknologi modern dalam rangka membangun pabrik yang berasal dari luar negeri. Kebutuhan air dan listrik di beberapa daerah khususnya di Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara juga dirasakan masih jauh dari mencukupi. Penyiapan tenaga kerja walaupun secara kuantitas cukup, namun secara kualitas masih belum memenuhi harapan. Perlu perhatian keterkaitan persoalan tenaga kerja baik sebagai buruh di pertanian sekaligus sebagai petani, melalui pelatihan dan ketrampilan agar dapat meningkatkan daya dorong terhadap tenaga kerja muda. Untuk mengkomodir permasalahan perkebunan rakyat tersebut perlu peran Pemerintah Daerah dan dinas-dinas terkait yang ada di bawahnya (Dinas Pertanian & Perkebunan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pertambangan dan Energi dsb.)

2. Dalam bidang lapangan usaha perkebunan, perlu kebijakan yang terkait dengan aspek pertumbuhan perekonomian dan ketenagakerjaan. Usaha tersebut terutama untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan petani, terutama petani kecil. Meskipun persentase mereka yang bekerja di pertanian cenderung mengalami penurunan tetapi sektor perkebunan diperkirakan tetap merupakan sektor yang dapat menampung pencari kerja. Kelapa sawit sebagai komoditas agribisnis yang hakekatnya merupakan usaha diversifikasi secara vertikal untuk dikerjakan dari proses pra panen sampai pasca panen dan pengolahan dan pemasaran. Dalam rangka mendorong tenaga kerja muda untuk tertarik ke sektor perkebunan khususnya kelapa sawit, upah tenaga kerja petani kelapa sawit dapat ditingkatkan.
3. Masalah pemasaran hasil kelapa sawit perlu diimbangi dengan kebijakan pengolahan. Karena jika didasari dengan pemikiran bagaimana bisa petani didekatkan dengan pihak pengolahan sawit akan lebih memutus rantai yang panjang yang selalu dialami dalam bidang pemasaran hasil pertanian. Penciptaan lapangan kerja di perkebunan kelapa sawit tampaknya tidak bisa dihindari dengan kebijakan ekstensifikasi lahan. Kemudian bagi penanaman kembali tampaknya merupakan pilihan yang perlu segera diperhatikan di beberapa lahan di daerah penelitian tersebut. Usaha PIR dengan sistem plasma dan inti sebetulnya merupakan pilihan kebijakan yang baik. Namun intensifikasi lahan, dengan sistem multiple cropping dalam usaha tani campuran perlu dipikirkan.
4. Teknologi untuk pemanfaatan semua hasil sampingan pohon sawit agar diperkenalkan untuk suatu perluasan jenis komoditas yang diolah. Dengan diversifikasi pengolahan hasil pohon sawit tentu saja akan banyak menyerap banyak tenaga kerja. Hal lain adalah selalu memantau pasar di mana komoditas minyak kelapa sawit tampaknya

masih merupakan hal yang menjadi tumpuan ekspor. Kemudian untuk kelangsungan produksi dalam kasus perkebunan di wilayah Besitang misalnya perlu dipikirkan untuk mengganti pohon kelapa sawit yang sudah tidak memiliki produksi optimal agar segera diremajakan dengan sistem replanting.

5. Prospek ke depan agro industri di Propinsi Sumatera Utara, berdasarkan potensi pertanian di Kabupaten Langkat khususnya sektor industri kelapa sawit, maka kegiatan ekonomi yang dapat menyerap investor adalah pengelolaan minyak goreng dan oleokimia. Pengolahan minyak goreng dan oleokimia dipilih sebagai bidang usaha yang layak dikembangkan, karena di wilayah Kabupaten Langkat terdapat banyak kebun dan pabrik pengolahan sawit. Hasil CPO dari pabrik untuk konsumsi dalam negeri dan diekspor ke luar negeri, Adanya pabrik tersebut memberikan nilai tambah dari produk terhadap pendapatan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas BS dan Burhani Syah (1981)
'Beberapa Aspek Sosial Ekonomi Petani Kelapa Sawit Proyek Pengembangan Perkebunan Rakyat Sumatera Utara' dalam *Buletin BPP Medan*, No 12 (1).
- Afifuddin, Sya'ad, (2004)
"Pengaruh pasar Minyak Kelapa Sawit Terhadap Luas lahan Kelapa Sawit di Sumatera Utara"., *Mimbar Umum*, Februari dan Maret 2004.
- Ahmad, Rofiq (1998)
Perkebunan dari NES ke PIR. Jakarta, Puspa Swara, 1998.
- Andi Nuhung, Iskandar (2003)
Perusahaan Inti Rakyat dan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan : Studi Kasus PIR-BUN Sumatera Selatan, Jakarta : Yarsif Watapone.
- Arifin, Bustanul (2004)
Analisis Ekonomi Pertanian Indonesia. Jakarta, Kompas Media Nusantara, 2004
- Amir, M. S., (1999)
Ekspor Impor: Teori & Penerapannya, Jakarta : Pustaka Binaman Pressindo.
- Amsden, (1990)
The Giant Miracle: The Case Of South Korea, Oxford : Oxford University Press.
- Ashley, C dan D. Carney (1999)
Sustainable Livelihoods: Lessons from early experience, London : DFID.
- Badan Pusat Statistik, (1985)
Analisa Perkembangan Perdagangan Luar Negeri, Jakarta : BPS.
- Badan Pusat Statistik, (2000)
Produk Domestik Bruto (PDB) Menurut Pembangunan : Triwulan I/ 1996 – I/2000, Jakarta : BPS.

- Badan Pusat Statistik (2000)
Indikator Ekonomi April 2000, Jakarta : BPS.
- Badan Pusat Statistik, (1999)
Ekspor 1998, Jakarta : BPS.
- Badan Pusat Statistik, (2001)
'Biodiesel, sebuah harapan baru', *Kompas*, 22-10-01, hal 25.
- Badan Pusat Statistik (2001)
Penduduk Sumatera Utara, Sensus Penduduk Tahun 2000,
Jakarta : BPS
- BPS & Bappeda Langkat (2002)
Kabupaten Langkat Dalam Angka Tahun 2002, Stabat : BPS dan
Bappeda Langkat.
- BPS & Bappeda Langkat (2002)
Kabupaten Langkat Dalam Angka Tahun 2002, Stabat : BPS dan
Bappeda Langkat.
- Bangun, Derom, (1998)
'Permintaan domestic terhadap kelapa sawit terus meningkat dari
tahun ketahun', *Konferensi Internasional tentang Kelapa Sawit di
Nusa Dua*, di Bali, Nusa Dua : Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit
Indonesia [Gapki], Ketua), hal: 9.
- Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Propinsi SUMUT (2000)
Profil Proyek Investasi
- Badrun, M (1995)
"Strategi Dan Konsep Pengembangan Kelapa Sawit", *Makalah dalam
Seminar
Peluang dan Tantangan Industri Kelapa Sawit Menyongsong Abad
XXI*, Medan 1-2 Agustus 1995.
- Breman, Jan, (1997)
Menjinakkan Sang Kuli, politik colonial pada awal abad ke-20,
Jakarta : PT Pustaka Utama Grafiti Dan KITLV.
- Carriere, Elizabeth, (2001),
Conceptual frameworks for anti-poverty interventions, London : DFID-
unpublish paper.

- Depdagri (1992)
Profil Propinsi Sumatera Utara, Jakarta : Yayasan Bhakti Wawasan Nusantara.
- Dirjenbun (1992)
Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan, Jakarta : Direktur Jenderal Perkebunan.
- Dirjenbun (1992)
Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan, Jakarta : Direktur Jenderal Perkebunan.
- Dwinita, L. (1999)
'Identifikasi Strategi Global dan Generik Komoditas Kelapa Sawit di Indonesia', *Media Perkebunan*, No 27, April 1999
- Dja'far, Bahtiar Saleh Abbas, dan Burhani Syah, (1982),
'Analisa usaha tani dan pemasaran kelapa sawit: Proyek pengembangan perkebunan rakyat Sumatera Utara', *Buletin BPP Medan*, 13(1 dan 2), 51-56.
- Djafar, Bahtiar S. Abbas dan Daswir, (1990)
'Pengaruh Sistem Kelompok Terhadap Pendapatan Usahatani Pada Petani Kelapa Sawit PIR-Lokal', *Bulletin Perkebunan*, April, 1990, Pusat Penelitian Perkebunan.
- Djafar, dkk. (1982)
Analisa Ushatani Dan Pemasaran Kelapa Sawit, Proyek Pengembangan Perkebunan Rakyat Sumatera Utara. *Bulletin Balai Penelitian Perkebunan*, Vol. 13 No. 1 & 2, Maret-Juni, Medan 1982.
- Djojohadikusumo, Sumitro, (1991),
Perkembangan Pemikiran Ekonomi, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Effendi, Tadjudin Noer (1995)
Sumber Daya Manusia peluang Kerja dan Kemiskinan, Yogyakarta : PT Tiara Wacana.
- Girsang P, Daswir dan PM Naibaho (1994)
Analisis Pembangunan dan Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit Pola 'PIRLOK' dalam *Berita Pusat Penelitian Kelapa Sawit Medan*, Vol 2 No.2 1994.

- Guritno, P dkk (2003).
Tinjauan Ekonomi Industri Kelapa Sawit, Pusat Penelitian Kelapa Sawit, Medan
- Hadisumarto, Dr. Djunaedi, (2000),
Poverty reduction strategy in Indonesia, Tokio : Presentation at the Consultative Group for Indonesia meeting).
- Hardjono, Joan, (1999),
A social assessment of the land certification program: The Indonesian Land Administration Project, Jakarta : The World Bank and AusAID.
- Karseno, AR dan Arti Adjie (2001)
Kebijakan Ekonomi dan Pembangunan Kelembagaan di Indonesia. Yogyakarta, AMP YKPN, 2001
- Kompas, 6 April 2001
'Pengungsi Aceh, beban berat bagi Sumatera Utara'.
- Kompas. 2000.
Mengkaji "Corporate Farming" dengan Kepala Dingin,
<http://www.kompas.com/kompas-cetak/0008/14/ekonomi/meng39.htm>
- Kolom, (2004),
'Subsidi pupuk dan benih ditambah Rp.339,2 miliar', *Suara Pembaharuan*, Kamis 23 September 2004, h. 7.
- KUD Rahmat Tani
'Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KUD Desa PIR-ADB Kec. Besitang, Kabupaten Langkat'.
- KUD Rahmad Tani, (2003),
Laporan pertanggung-jawaban badan pengawas KUD Rahmad Tani PIR ADB Besitang, Langkat : KUD Rahmad Tani.
- KUD Rahmad Tani, (2003)
Laporan pertanggung-jawaban pengurus KUD Rahmad Tani PIR ADB Besitang tahun buku 2003, Langkat : KUD Rahmad Tani.
- Lal, Dipak, (1983),
The Poverty of Development Economics, Sussex : The Institute of Economic Affairs.

- Mill, John Stuart, (1998),
Principles of Political Economy, London : John W. Parker.
- Moser, Carolina, (1998),
'The asset vulnerability framework: Reassessing urban poverty development strategies', *World Development Report*, 26(1): 1-19.
- Pitono, Djoko, (2002),
'Peran industri manufaktur sebagai penghela pembangunan nasional berkelanjutan dengan sumberdaya alam sebagai platform berdasarkan pendekatan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (knowledge)', *Kasus: Sawit sebagai penggerak, pemicu dan pemacu pembangunan Iptek*, akarta : Ringkasan untuk rapat Dewan Riset Nasional Inti tanggal 5-11-2002, versi 25-11-2002).
- Prasetyohadi, (2000),
Mengatasi kemiskinan di Maluku dan Jawa Timur, Jakarta : UNDP.
- Presiden Republik Indonesia, 2004,
Pidato Pertanggungjawaban Presiden Megawati Soekarnoputri di depan Sidang Tahunan MPR-RI pada tanggal 23 September 2004, *Harian Suara Pembaharuan*, 23 September 2004).
- PT. Rekayasa Industri, (2002),
Prospek dan tatanan industri kelapa sawit dalam perekonomian Indonesia, (PT Rekayasa Industri, September).
- Priyambodo, Arif, dkk (1995)
Model Pengembangan Pola Perusahaan Inti Rakyat Pada Sub. Sektor Perkebunan Kelapa Sawit. *Warta Pusat Penelitian Kelapa Sawit Vol. 3 No. 3, Oktober*, Medan 1995.
- Poeloengan, Zulkarnain (1988)
'Karakteristik lahan sebagai alat penilai kesesuaian lahan untuk tanaman kelapa sawit', dalam *Buletin Perkebunan*, Vol. 19, No. 2, Juni 1988, Balai Penelitian Perkebunan Kelapa Sawit.
- Rustian, Frida, dkk (2001)
Mengenal Usaha Pertanian Kontrak. Bandung, Akatiga 2001
- Sartono Kartodirjo & Djoko Suryo (1991)
Sejarah Perkebunan di Indonesia : Kajian Sosial-Ekonomi, Yogyakarta : Penerbit Aditya Media.

- Sajogyo dan Pudjiwati Sajogyo, (1982)
Sosiologi Pedesaan, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, Gadjah Mada University Press
- Sen, Amartya, (1999),
Beyond the crisis: Development strategies in Asia, London : Institute of Southeast Asian Studies).
- Sitorus, E (1995)
Kontribusi PIR Kelapa Sawit Pada Pengembangan Wilayah. Seminar Nasional Kelapa Sawit, Medan 1995
- Smith, Adam, (1976),
The Wealth of Nations, London : Penguin Books.
- Suharto, Rosediana, Dr., (2002),
Upaya Peningkatan Ekspor Minyak Kelapa Sawit Indonesia, *The Indonesian Palm Oil Board*.
- Susanto, Hari, (2002),
'Daya saing ekonomi nasional', Makalah dipresentasikan pada *Seminar Hasil Penelitian P2E – LIPI* Jakarta.
- Tim Evaluasi Insp Jen dan Dir Jen Perkebunan Departemen Pertanian, (1996),
'Evaluasi keberhasilan dan manfaat proyek PIR-OPHIR PTPN VI (eks PTP VI) Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat', Jakarta : Departemen Pertanian, Nopember 1996).
- Weiss, J., (1988),
Industry in Developing Countries: Theory, Policy and Evidence, London : Routledge.
- World Bank, (1999),
'Essays on agricultural institutions and policy', Rural Development and National Resources unit, East Asia and Pasific region, June.
- World Bank, (2000),
Attacking Poverty: World Development Report 2000-2001, New York : World Bank.
- World Bank, (2001),
Poverty reduction in Indonesia: Constructing a new strategy, EAPR : Rural Development and National Resources Unit.

Lampiran : 3

DAFTAR ISTILAH LOKAL

<i>Afdeling</i>	: kawasan perkebunan
<i>Angkong</i>	: gerobak sorong beroda satu untuk angkut tandan kelapa sawit dari sekitar pohonsawit ke truk.
<i>BANPROM</i>	: Badan Investasi & Promosi
<i>BHL</i>	: Buruh Harian Lepas
<i>Brondol</i>	: memungut buah KS yang rontok
<i>Buruh pasar</i>	: pekerja memelihara jalan di plasma
<i>Dodos buah</i>	: sejenis kapak yang juga digunakan memotong tandan dan pelepah
<i>Door Smeer</i>	: bengkel sepeda motor/ cuci sepeda motor
<i>Egrek</i>	: arit panjang digunakan untuk memotong tandan kelapa sawit
<i>Food crop</i>	: lahan 0,5 ha yang diberikan peserta PIR untuk tanaman bahan makan
<i>Kapak buah</i>	: kapak yang digunakan memotong tangkai tandan KS & memotong pelepah kelapa sawit
<i>KUD Rata</i>	: KUD Rahmat Tani
<i>Kedai</i>	: warung tempat jual barang klontong, minuman dan makanan
<i>Kereta</i>	: sepeda motor
<i>Mbabat</i>	: kegiatan membersihkan piringan sawit agar piringan bersih dari gulma.
<i>Miringi</i>	: menyangi/ membersihkan rumput sekitar pohon kelapa sawit
<i>Mocok-mocok</i>	: pekerjaan srabutan
<i>Moket</i>	: kegiatan pembuatan lubang tanah di sekitar pohon kelapa sawit yang digunakan untuk menaburkan pupuk.
<i>Motor</i>	: mobil/ kendaraan besar roda empat
<i>Mandor</i>	: petugas yang kegiatannya mengawasi kegiatan kelompok kerja di kelapa sawit (mandor panen, mandor pemupukan, mandor penyangian dsb)
<i>Ngubu/kubu</i>	: kuli angkut/ buruh angkut TBS dari plasma ke pabrik
<i>Ndongkel</i>	: kegiatan membersihkan tunggul tanaman lama yang masih ada di perkebunan.

Nguler	:	Kegiatan mencari kepompong/ulat di bawah akar pohon sawit.
Ngupu	:	kegiatan mencari kupu pada malam hari di plasma dengan menggunakan lampu petromaks.
<i>Parang babat</i>	:	parang yang digunakan untuk penyiangan di piringan pohon kelapa sawit
<i>PIR – ADB</i>	:	Perusahaan Inti Rakyat – Asian Development Bank.
<i>P4</i>	:	pelatihan/penyuluhan tentang usaha penanaman kelapa sawit.
<i>TBS</i>	:	tandan buah segar
<i>Tanah eigendom</i>	:	tanah perumahan, persil-persil kecil
<i>Tanah opstal</i>	:	tanah peruntukan pabrik
<i>Tanah erfpacht</i>	:	tanah peruntukan bercocok tanam
<i>TNGL</i>	:	Taman Nasional Gunung Leuser

Lampiran 4 :

